

BULETIN ILMIAH LITBANG PERDAGANGAN

VOL. 6 NO. 1, JULI 2012

ISSN : 2089-4287

PENGARAH :

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan

PENANGGUNG JAWAB :

Sekretaris Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan
Kepala Pusat Data dan Informasi Perdagangan

DEWAN REDAKSI/EDITOR :

Ketua: Ir. Tjahya Widayanti, MSc (*Domestic Trade*)

Wakil Ketua: Dr. Ir. Kasan, MM (*Foreign Trade*)

Anggota :

Dr. Masyhuri, APU (*Economic History*)

Dr. Wayan R. Susila, APU (*Trade and Agricultural Economics*)

Zamroni Salim, Ph.D (*International Trade and Development*)

Dra. Nuryati Lagoda (*International Trade*)

MITRA BESTARI :

Prof. Dr. Abuzar Asra, MSc (*Trade and Poverty*)

Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, MA (*Trade and Development*)

Dr. Ir. Hartoyo, MSc (*Consumers Protection and Trade Standards, Agricultural Economics*)

Prof. Dr. Rina Oktaviani (*International Trade – CGE Modelling*)

Sjamsu Rahardja, Ph.D (*Macroeconomics & International Trade*)

Prof. Drs. Sukarna Wiranta, MA (*Domestic Trade*)

Dr. Slamet Sutomo (*Domestic Trade*)

Prof. Zainudin DJafar, MA, Ph.D (*International Relationship*)

REDAKSI PELAKSANA :

Adi Nurjaman, SE, MM

Maulida lestari, SE, ME

Ulfah Anjarwati, BBA

Neneng Uliyah, SE

ALAMAT REDAKSI :

Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan
Kementerian Perdagangan, RI
Gedung Utama Lantai 4

JL. M.I. Ridwan Rais No.5, Jakarta Pusat 10110

Telp. (021) 23528681

Fax. (021) 23528691

evalap-bppkp@kemendag.go.id

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan dapat diakses melalui:
http://www.kemendag.go.id/publikasi_buletin_ilmiah_perdagangan

Terakreditasi C

Berdasarkan SK. Kepala LIPI No.629/D/2011
(381/AU1/P2MBI/07/2011)

Diterbitkan 2 kali dalam satu tahun (Juli dan Desember)
Oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan
Kementerian Perdagangan

PENGANTAR REDAKSI

Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan Volume 6 No. 1 bulan Juli 2012 menampilkan 7 tulisan yang terdiri dari 5 tulisan yang membahas mengenai sub sektor perdagangan luar negeri/ perdagangan internasional dan 2 tulisan lainnya mengenai sub sektor perdagangan dalam negeri. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan yang terbit setiap semesternya merupakan salah satu media bagi Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan untuk menyebarluaskan hasil kajian dan analisis kepada seluruh *stakeholders*.

Adapun judul yang dimuat dalam buletin kali ini adalah Dekomposisi Pertumbuhan dan Diversifikasi Ekspor Non Migas Indonesia; IJ-EPA dan Implikasinya Terhadap Kinerja Perdagangan Indonesia-Jepang; Analisis Faktor dan Proyeksi Konsumsi Pangan Nasional : Kasus pada Komoditas: Beras, Kedelai dan Daging Sapi; Dampak Kebijakan Bea Keluar Terhadap Ekspor dan Industri Pengolahan Kakao; Kinerja Daya Saing Produk Perikanan Indonesia di Pasar Global; Analisis Dampak Kebijakan Tarif Impor Serat Kapas Terhadap

Kesejahteraan Petani Serat Kapas di Indonesia; dan Potensi Perdagangan dan Investasi Industri Serat Rayon di Indonesia.

Tulisan dalam Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan cukup beragam, namun tetap merupakan bagian dari sektor perdagangan ataupun sektor yang terkait perdagangan. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh penulis yang telah berpartisipasi dalam buletin ini. Secara khusus, Redaksi juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Drs. Sukarna Wiranta, MA; Prof. Dr. Abuzar Asra, MSc; Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, MA; Prof. Dr. Rina Oktaviani; Sjamsu Rahardja, Ph.D; Prof. Zainudin Djafar, MA, Ph.D; Dr. Ir. Hartoyo, MSc; dan Dr. Slamet Sutomo sebagai Mitra Bestari yang telah melakukan penelaahan terhadap naskah yang ada.

Akhir kata, semoga Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan memberi kontribusi yang berarti terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perdagangan maupun yang terkait dengan perdagangan.

**BULETIN ILMIAH
LITBANG PERDAGANGAN
VOL. 6 NO. 1, JULI 2012**

DAFTAR ISI

DEKOMPOSISI PERTUMBUHAN DAN DIVERSIFIKASI EKSPOR NON MIGAS INDONESIA	1
<i>Aditya P. Alhayat</i>	
IJ-EPA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA PERDAGANGAN INDONESIA - JEPANG	19
<i>Aziza R. Salam, Sefiani Rayadiani, dan Immanuel Lingga</i>	
ANALISIS FAKTOR DAN PROYEKSI KONSUMSI PANGAN NASIONAL: KASUS PADA KOMODITAS: BERAS, KEDELAI DAN DAGING SAPI	37
<i>Yudha Hadian Nur, Yati Nuryati, Ranni Resnia, A.Sigit Santoso</i>	
DAMPAK KEBIJAKAN BEA KELUAR TERHADAP EKSPOR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAKAO	53
<i>Makmun Syadullah</i>	
KINERJA DAYA SAING PRODUK PERIKANAN INDONESIA DI PASAR GLOBAL	69
<i>Deasi Natalia, Nurozy</i>	
ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN TARIF IMPOR SERAT KAPAS TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI SERAT KAPAS DI INDONESIA ...	89
<i>Iwan Hermawan</i>	
POTENSI PERDAGANGAN DAN INVESTASI SERAT RAYON DI INDONESIA	109
<i>Rahayu Ningsih</i>	

DEKOMPOSISI PERTUMBUHAN DAN DIVERSIFIKASI EKSPOR NON MIGAS INDONESIA

Indonesian Non Oil Export Growth Decomposition and Diversification

Aditya P. Alhayat

Calon Peneliti pada Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan,
Jl. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta, alhayat_limited@yahoo.com

Naskah diterima : 1 Februari 2012

Disetujui diterbitkan : 10 Juni 2012

Abstrak

Studi ini ditujukan untuk mengetahui peran komponen pertumbuhan ekspor non migas Indonesia yang pada tahun 2010 mencatatkan pertumbuhan signifikan, sekaligus untuk menganalisis struktur ekspor. Pada dasarnya, studi ini mengikuti kajian yang dilakukan oleh Amiti dan Freud (2007) untuk mengetahui kontribusi produk baru terhadap pertumbuhan ekspor dengan menggunakan dua metode yang saling melengkapi. Metode pertama adalah dekomposisi pertumbuhan ekspor menjadi produk baru, produk menghilang, dan produk bertahan yang menyediakan informasi mengenai besarnya penciptaan dan pengurangan ekspor. Metode kedua adalah Indeks Feenstra atas varietas pertumbuhan ekspor netto yang menyediakan suatu indikasi pentingnya varietas baru dalam perdagangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor non migas Indonesia lebih ditopang oleh tingginya pertumbuhan ekspor untuk produk-produk yang telah ada sebelumnya (margin intensif) daripada produk-produk baru (margin ekstensif), terutama selama pemulihan ekonomi di tahun 2010. Selain itu, kecilnya pertumbuhan varietas netto menunjukkan kurang berpengaruhnya margin ekstensif pada pertumbuhan ekspor Indonesia. Berdasarkan wilayah, Asia masih menjadi tujuan ekspor utama yang paling tinggi menyumbang margin intensif maupun margin ekstensif. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat menjaga stabilitas produk-produk ekspor yang telah ada serta memelihara pasar produk ekspor di kawasan Asia.

Kata kunci : Diversifikasi Ekspor, Marjin Intensif, Marjin Ekstensif

Abstract

This study aims to determine the role of export growth components of the Indonesian non oil and gas which experienced significant growth in 2010 as well as to analyze the recent export structure. Basically, the study follows the paper of Amiti and Freud (2007) which examined the contribution of new varieties to export growth using two complementary methods. The first is a decomposition of export growth into new, disappearing, and existing varieties and offers more information on the magnitude of export creation and destruction. The second is the Feenstra Index of net export variety growth which provides an indication of the importance of new varieties in trade. The results of analysis showed that the growth of Indonesian export of non oil and gas was mainly driven by high export growth of existing products (the intensive margin) rather than in new varieties (the extensive margin), particularly during the economic recovery in 2010. In addition, the small net variety growth indicates the less importance of extensive margin on Indonesian export growth. According to the region, Asia is still a major export destination contributing for the highest intensive and extensive margin. Therefore, the government is expected to maintain the sustainability of the existing export products and the Asia market.

Keywords: Export Diversification, Intensive Margin, Extensive Margin

JEL Classification: F10, F43

PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian global tahun 2010 menunjukkan pemulihan setelah pada tahun 2009 mengalami kontraksi sebagai akibat rembetan dampak krisis subprime-mortgage Amerika Serikat. Negara-negara berkembang dan emerging memiliki peranan penting dalam pemulihan perekonomian global yang ditunjukkan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju. Pada tahun 2010, perekonomian di negara berkembang dan emerging tumbuh 7,3%, sedangkan di negara maju hanya tumbuh 3,1%. Bahkan pada saat krisis global tahun 2009, pertumbuhan ekonomi di negara berkembang dan emerging masih tumbuh 2,8% sementara negara maju mengalami penurunan 3,7% (IMF, 2011).

Sehubungan dengan pergerakan positif perekonomian global tersebut, kinerja perdagangan dunia juga menunjukkan hal yang menggembirakan. Volume perdagangan dunia juga mencatatkan pertumbuhan positif pada tahun 2010 sebesar 12,8% yang juga dimotori oleh negara-negara berkembang dan emerging (IMF, 2011). Dalam hal ini, Indonesia juga menikmati pemulihan perekonomian dunia karena nilai ekspor yang semakin meningkat.

Pada tahun 2010, peningkatan ekspor Indonesia mencapai 35,4% yang sumber utama pertumbuhannya berasal dari ekspor non minyak dan gas (non migas) sebesar 27,7%. Jika

melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2006-2010, tingginya sumber pertumbuhan ekspor non migas cukup beralasan dikarenakan tingginya pangsa rata-rata sektor ini terhadap total ekspor sebesar 80,8%. Seiring dengan penerimaan migas yang cenderung menurun dan tidak dapat diperbarui, sektor non migas merupakan tumpuan utama bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspornya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, arah kebijakan sektor perdagangan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, Rencana Strategis Kementerian Perdagangan (Renstra Kemendag) 2010-2014, maupun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan ditujukan untuk meningkatkan peran ekspor, terutama ekspor non migas. Untuk mendorong peningkatan ekspor non migas, kebijakan perdagangan luar negeri diarahkan pada peningkatan daya saing produk ekspor non migas melalui diversifikasi pasar serta peningkatan keberagaman dan kualitas produk.

Dalam hal ini, diversifikasi ekspor secara umum bertujuan mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Diversifikasi membuat suatu negara tahan terhadap gejolak *terms of trade* melalui stabilisasi penerimaan ekspor. Ali, Alwang, dan Siegel (1991) bahkan menyebutkan bahwa diversifikasi

perdagangan dapat membantu mencapai tujuan kebijakan yang berorientasi terhadap stabilitas maupun pertumbuhan. Diversifikasi mampu memperkecil instabilitas penerimaan ekspor dengan menyediakan basis ekspor yang luas dan meningkatkan pertumbuhan dengan mensubstitusi komoditas dengan *trend* harga positif dengan barang dengan *trend* harga yang menurun atau melalui peningkatan nilai tambah komoditas barang dengan pemrosesan lebih lanjut.

Namun demikian, dalam dokumen perencanaan pemerintah tidak terlalu banyak membahas mengenai diversifikasi produk ekspor. Dalam RPJMN 2010-2014 memang disebutkan bahwa peningkatan kualitas dan keberagaman produk ekspor diukur dengan meningkatnya indeks diversifikasi produk ekspor non migas, tetapi tidak dicantumkan bagaimana/rumus mengukurnya dan kondisi keberagaman tersebut. Dalam RKP juga tidak dibahas mengenai ukuran diversifikasi produk. Hanya Renstra Kemendag yang mencantumkan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi upaya diversifikasi produk yang telah dilakukan, yaitu menggunakan kontribusi ekspor komoditi-komoditi di luar 10 produk utama. Produk utama ekspor non migas yang dimaksud adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronik, karet dan produk karet, sawit dan produk sawit, produk hasil hutan, alas kaki, otomotif, udang, kakao, dan kopi.

Terkait dengan perkembangan ekspor yang tumbuh positif pada saat pemulihan ekonomi dan kebijakan pemerintah untuk mendorong diversifikasi ekspor, studi ini ingin mengetahui komponen pertumbuhan ekspor non migas Indonesia. Apakah pertumbuhan ekspor non migas ditopang oleh ekspor produk baru (margin ekstensif) atau masih ditopang oleh produk lama yang telah biasa diekspor (margin intensif)? Bagaimana peran margin intensif dan ekstensif pada tujuan ekspor yang berbeda (diversifikasi pasar)? Dalam hal ini, studi menggunakan pendekatan dekomposisi produk dan pasar sehingga diharapkan dapat menambah perspektif dalam menggambarkan dan mengukur diversifikasi produk ekspor non migas Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan Samen (2010), gagasan bahwa ekspor menstimulasi ekonomi telah ada selama kurun waktu yang lama. Namun pertanyaan kunci adalah bagaimana teori perdagangan tradisional menjelaskan diversifikasi ekspor dan pertumbuhan. Secara umum, teori merkantilisme berpendapat bahwa kekuatan perdagangan nasional diukur oleh besarnya logam mulia dan surplus perdagangan yang diperoleh melalui perluasan ekspor atau meminimalkan impor. Teori perdagangan klasik Adam Smith (1776) dan David Ricardo (1817) menekankan pada keunggulan mutlak atau komparatif dalam memproduksi

sesuatu, dalam mengekspor produk tertentu, dan melakukan spesialisasi dalam ekspor tersebut sehingga memperoleh keuntungan dari perdagangan (Samen, 2010). Selain itu, terdapat pula teori Hechscher dan Ohlin yang menekankan pada sumber keunggulan komparatif berupa faktor kelimpahan sumber daya sebagai penjelas terjadinya perdagangan.

Berbeda halnya dengan teori perdagangan internasional yang dianut oleh aliran klasik dan neoklasik yang menekankan pentingnya spesialisasi, teori ekonomi struktural berpendapat bahwa diversifikasi dari sektor primer ke sektor manufaktur sangat penting untuk mengatasi volatilitas dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (Mohan, 2011). Konsep diversifikasi semakin penting seiring dengan munculnya teori modern mengenai manajemen portofolio yang dikembangkan oleh Harry Markowitz. Berdasarkan pepatah umum “jangan menaruh semua telur dalam keranjang yang sama” dan terinspirasi oleh teori pilihan portofolio modern, diversifikasi telah dianggap sebagai sarana untuk mengurangi ketergantungan negara pada produk tertentu atau sangat dibatasi oleh berbagai macam produk utama yang umumnya diekspor dengan nilai tambah yang rendah (Samen, 2010). Banyak negara-negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan sangat bergantung pada sejumlah komoditi perdagangan

akan memperoleh manfaat melalui diversifikasi ekonomi dengan memilih portofolio ekspor yang mengoptimalkan risiko pasar dan keuntungan yang akan didapat.

Perkembangan literatur terbaru menekankan bahwa struktur ekspor berbeda antar negara, tahun, dan produk dikarenakan perbedaan kontribusi margin intensif dan ekstensif terhadap pertumbuhan ekspor (Tsivadze, 2011). Tingginya pangsa margin intensif mengindikasikan tingkat konsentrasi yang signifikan, sedangkan peningkatan kontribusi margin ekstensif menunjukkan pola diversifikasi. Oleh sebab itu, analisis terhadap kontribusi relatif tiap-tiap margin tersebut sangat penting dalam menentukan faktor-faktor yang peningkatan perdagangan. Sebagai contoh, Hummels dan Klenow (2005) berpandangan bahwa suatu negara dapat meningkatkan volume ekspor melalui beberapa jalan: melakukan ekspor yang lebih banyak pada barang yang sama (margin intensif), memperluas cakupan barang ekspor (margin ekstensif), atau dengan mengekspor lebih banyak barang berkualitas tinggi (margin kualitas). Sementara itu, Amurgo-Pacheco dan Pierola (2008) menambahkan dimensi geografis dengan melihat struktur ekspor pada “produk lama ke tujuan lama”: (margin intensif), “produk lama ke tujuan baru” (margin ekstensif geografis), “produk baru ke tujuan lama” (margin ekstensif produk), dan “produk baru ke tujuan

baru” (dapat dipertimbangkan sebagai marjin ekstensif produk dan geografis).

Menggunakan data perdagangan 126 negara di dunia tahun 1995, Hummels dan Klenow (2005) melakukan dekomposisi ekspor suatu negara menjadi marjin intensif dan ekstensif, serta mendekomposisikan lebih lanjut menjadi komponen harga dan kuantitas. Selain itu, hasil dekomposisi dihubungkan dengan ukuran perekonomian negara (PDB *Purchasing Power Parity*). Pengukuran marjin ekstensif mengikuti teori harga konsumen dengan mengadaptasi metodologi dalam Feenstra (1994). Sebagian besar variasi ekspor untuk keseluruhan negara disebabkan oleh variasi dalam marjin ekstensif yang besarnya mencapai 62%. Dalam hal ini, negara dengan perekonomian besar lebih mengeksport produk dengan harga yang tinggi, sesuai dengan industrinya (produsen) yang menghasilkan produk berkualitas tinggi.

Brenton dan Newfarmer (2007) melakukan dekomposisi terhadap pertumbuhan ekspor terhadap 99 negara selama periode 1995-2004. Selain tingginya marjin intensif, peningkatan produk lama di pasar lama lebih berperan penting dalam pertumbuhan ekspor dibandingkan dengan diversifikasi pada produk baru dan pasar baru. Dalam marjin intensif, *lagging countries* (negara dengan pertumbuhan ekspor yang lambat) terlihat mengalami tingkat kematian produk (tidak lagi diekspor) yang lebih tinggi dibandingkan negara

dengan kinerja ekspor yang superior. Sementara itu dalam marjin ekstensif, ekspor ke pasar/tujuan baru lebih penting dibandingkan penemuan ekspor produk baru, yaitu menyumbang sekitar 18% terhadap total pertumbuhan ekspor.

Amiti dan Freund (2007), menyelidiki faktor-faktor di balik pertumbuhan fenomenal ekspor China (450%) antara tahun 1992 dan 2006. Mereka melakukan dekomposisi pertumbuhan ekspor dalam berbagai dimensi, diantaranya dengan membagi ke dalam marjin intensif dan marjin ekstensif. Mereka menemukan bahwa pertumbuhan ekspor China berasal dari intensifikasi arus perdagangan yang ada dan nilai ekstensif marjin semakin besar ketika menggunakan data yang lebih terdisagregasi.

Dengan menggunakan metodologi yang dikembangkan oleh Hummels dan Klenow (2005), Liapis dan Fournier (2008) mendekomposisi ekspor pertanian menjadi marjin intensif dan marjin ekstensif dengan sampel 122 negara eksportir pada tahun 2005. Hasil studi menunjukkan marjin intensif (ekspor lebih banyak pada kelompok produk yang sama kepada mitra dagang yang sama) berperan besar dalam ekspor sektor pertanian. Marjin ekstensif (mengeksport produk lebih banyak untuk mitra dagang yang lainnya) kurang lebih 47% dari tambahan ekspor untuk negara-negara kaya dan hanya 40% dari tambahan ekspor negara dengan angkatan kerja yang besar. Hasil studi

Liapis dan Fournier (2008) lebih lanjut menunjukkan bahwa margin intensif didominasi oleh penambahan volume. Dalam hal ini, negara kaya melakukan ekspor dengan volume yang lebih tinggi tetapi bukan berasal dari produk-produk berkualitas tinggi pada pasar tertentu dikarenakan harga yang tidak jauh berbeda dengan negara-negara miskin.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Kebanyakan studi empiris dekomposisi ekspor menggunakan data sekumpulan negara yang umumnya terbagi dalam negara maju dan negara berkembang untuk mendapatkan pola umum kontribusi margin intensif dan ekstensif dalam pertumbuhan ekspor, seperti pada Hummels dan Klenow (2005), Brenton dan Newfarmer (2007), Amurgo-Pacheco dan Pierola

(2008), dan Liapis dan Fournier (2008). Dikarenakan studi ini memfokuskan pada Indonesia, maka metode yang dibangun Amiti dan Freud (2007, 2008) dipandang sebagai referensi yang tepat, selain aspek kemudahan dalam perhitungannya. Meskipun demikian, studi ini tidak mengabaikan referensi-referensi lain dengan memasukkan unsur geografis dalam perhitungan dekomposisi pertumbuhan ekspor.

Untuk mengetahui komponen pertumbuhan ekspor non migas terkait dengan keberagaman/diversifikasi produk, maka dilakukan dekomposisi pertumbuhan menjadi margin intensif (intensifikasi) dan margin ekstensif (ekstensifikasi/diversifikasi). Dekomposisi pertumbuhan ekspor didefinisikan secara sederhana, seperti yang dilakukan oleh Amiti dan Freud (2007) sebagai berikut:

$$\frac{\sum_i V_{ti} - \sum_i V_{0i}}{\sum_i V_{0i}} = \frac{\sum V_{ti}(I_{t0}^E) - \sum V_{0i}(I_{t0}^E)}{\sum_i V_{0i}} - \frac{\sum V_{0i}(I_{t0}^D)}{\sum_i V_{0i}} + \frac{\sum V_{ti}(I_{t0}^N)}{\sum_i V_{0i}} \dots\dots\dots (1)$$

dimana:

I_{t0}^E = variabel indikator yang menunjukkan bahwa suatu produk diekspor baik pada periode t maupun periode 0 (produk yang bertahan)

I_{t0}^D = variabel indikator yang menunjukkan bahwa suatu produk diekspor pada periode 0 namun tidak diekspor pada periode t (produk yang menghilang)

I_{t0}^N = variabel indikator yang menunjukkan bahwa suatu produk diekspor pada periode t namun tidak diekspor pada periode 0 (produk baru)

V_{ti} = nilai perdagangan pada waktu t dalam produk i ($V_{ti} = p_{ti}q_{ti}$)

V_{0i} = nilai perdagangan pada periode 0 dalam produk i ($V_{0i} = p_{0i}q_{0i}$)

Persamaan (1) merupakan persamaan identitas pertumbuhan perdagangan terhadap periode dasar yang didekomposisikan menjadi tiga bagian: (i) pertumbuhan produk yang diekspor di seluruh periode, produk yang bertahan (*existing products*); (ii) pengurangan dalam pertumbuhan ekspor dikarenakan produk tidak lagi diekspor, produk yang menghilang (*disappearing goods*); dan (iii) peningkatan pertumbuhan ekspor dikarenakan adanya ekspor produk baru, margin ekstensif. Pangsa pertumbuhan margin intensif didefinisikan sebagai pangsa pertumbuhan produk yang bertahan dikurangi produk yang menghilang. Hal tersebut dikarenakan produk yang menghilang pada dasarnya masih merupakan bagian dari produk kategori yang lama. Dengan dekomposisi seperti ini, diversifikasi produk yang ditunjukkan dengan munculnya produk-produk baru (margin ekstensif) dapat terlihat jelas.

Selain dekomposisi produk, juga dilakukan dekomposisi tujuan ekspor yang dikelompokkan menjadi lima region, yaitu Amerika, Eropa, Asia, Australia Oceania, dan Afrika. Hal ini bertujuan untuk mengetahui peran masing-masing pasar dalam menopang margin intensif dan ekstensif.

Secara teknis, perhitungan margin intensif dan ekstensif menggunakan Microsoft Office Excel 2007 dengan langkah-langkah umum sebagai berikut. Pertama, data ekspor non migas Indonesia HS 10 digit berdasarkan

negara tujuan dikelompokkan ke dalam lima region. Kemudian, masing-masing produk dalam region tersebut diidentifikasi mana yang termasuk produk yang bertahan (lama), produk menghilang (tidak lagi diekspor), dan produk baru, tentu saja tergantung tahun dasar yang digunakan. Dalam hal ini, dibandingkan antara tahun 2010 dengan tahun 2009 dan tahun 2010 dengan tahun 2006. Selanjutnya, dihitung pertumbuhan nilai ekspor masing-masing produk kemudian diagregasikan ke dalam kategori produk dan region. Nilai pertumbuhan kategori produk ekstensif tiap-tiap region dibagi dengan nilai pertumbuhan total sehingga didapat margin ekstensif, demikian pula untuk menghitung margin intensif dengan menjumlah pangsa pertumbuhan kategori produk bertahan dan produk yang menghilang.

Selain metode dekomposisi pertumbuhan ekspor, digunakan pula Indeks Feenstra atas pertumbuhan varietas ekspor netto yang menyediakan suatu indikasi pentingnya produk baru dalam perdagangan. Indeks ini diilhami oleh upaya Feenstra (1994) dalam mengukur harga impor yang melibatkan produk baru, yang justru mengarah pada indeks natural pertumbuhan varietas dan telah populer digunakan dalam literatur (Amiti dan Freud, 2008). Dengan mendenotasikan I sebagai himpunan produk (varietas) yang tersedia di kedua periode, $I \subseteq (I_t \cap I_{t-1})$, Indeks Feenstra pertumbuhan varietas netto didefinisikan sebagai pecahan dari pengeluaran di

periode $t-1$ pada produk $i \in I$ relatif terhadap seluruh himpunan $i \in I_{t-1}$ sebagai rasio terhadap pecahan dari pengeluaran di periode t pada produk $i \in I$ relatif terhadap seluruh himpunan

$i \in I_t$, dikurangi satu. Dimisalkan V_{ti} merupakan nilai perdagangan di waktu t pada produk ($V_{ti} = p_{ti}q_{ti}$), maka indeks Feenstra pertumbuhan varietas netto dinotasikan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Feenstra} = \frac{\sum_{i \in I} V_{t-1i} / \sum_{i \in I_{t-1}} V_{t-1i}}{\sum_{i \in I} V_t / \sum_{i \in I_t} V_{ti}} - 1 \dots\dots\dots (2)$$

Nilai indeks akan sama dengan nol jika tidak terdapat pertumbuhan dalam keragaman terhadap periode dasar dan nilai indeks bernilai positif jika keragaman produk telah mengalami peningkatan. Metode ini memiliki kelebihan dalam hal terjadi pemecahan klasifikasi kode HS perdagangan. Jika pangsa perdagangan untuk produk yang ada di masing-masing periode terhadap total perdagangan tidak berubah maka nilai indeks juga tidak akan berubah. Namun demikian, jika terjadi pemecahan klasifikasi HS dimana klasifikasi yang baru lebih banyak dibandingkan dengan klasifikasi yang hilang atau dilebur maka indeks akan cenderung memperbesar margin ekstentif. Kelemahan indeks ini dalam mengukur relatif pentingnya varietas baru dalam pertumbuhan ekspor adalah jika terjadi banyak pergolakan dimana nilai ekspor untuk produk baru sama dengan produk yang menghilang maka pertumbuhan varietas netto adalah nol. Dari sisi importir, kesejahteraan diindikasikan meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah varietas produk yang tersedia. Sementara dari sisi eksportir, perubahan

varietas dapat dijadikan indikasi bahwa betapa pentingnya produk baru untuk meningkatkan pertumbuhan ekspor.

Perhitungan Indeks Feenstra juga menggunakan data perdagangan non migas klasifikasi HS 10 digit dari BPS dengan memanfaatkan software Microsoft Office Excel 2007. Langkah perhitungannya mirip dengan dekomposisi ekspor, terutama dalam mengidentifikasi produk yang sama yang diekspor pada kedua tahun. Sebagai contoh, dicari terlebih dahulu produk yang diekspor pada tahun 2009 dan tahun 2010. Nilai ekspor produk tersebut di tahun 2009 dijumlah dan dibagi dengan total ekspor tahun bersangkutan sehingga didapat pangsa tahun 2009, demikian juga dihitung pangsa produk yang sama tahun 2010. Pangsa tahun 2009 dibagi dengan pangsa tahun 2010 dikurangi satu didapat indeks varietas netto Feenstra. Perhitungan indeks ini juga dilakukan untuk masing-masing wilayah tujuan ekspor.

Selanjutnya, dianalisis mengenai apa yang mendorong pertumbuhan margin intensif, apakah akibat pertumbuhan volume atau kenaikan harga. Nilai dan

volume produk ekspor yang termasuk dalam marjin intensif (produk bertahan dan menghilang) diagregasikan berdasarkan region kemudian dihitung pertumbuhannya. Sebelum menghitung pertumbuhan harga, nilai ekspor dibagi dulu dengan volumenya sehingga didapat unit harga untuk tahun yang bersangkutan.

Data

Data yang digunakan dalam studi ini adalah ekspor non migas Indonesia dengan klasifikasi HS 2007 disagregasi 10 digit, bersumber dari BPS yang diperoleh melalui Pusat Data dan Informasi Perdagangan, Kementerian Perdagangan. Dengan menggunakan data yang lebih terdisagregasi, munculnya produk baru akan teramati lebih jelas dalam perhitungan. Penggunaan data HS-10 digit juga dilakukan dalam studi Aminiti dan Freud (2007) serta Hillberry dan McDaniel (2002). Selain itu, hasil studi Hummel dan Klenow (2005) dengan menggunakan agregasi data 6, 5, 4, 3, 2, dan 1 digit menunjukkan bahwa pemilihan disagregasi data akan menentukan marjin ekstensif. Semakin teragregasi data, nilai ekstensif marjin akan semakin rendah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Struktur Ekspor Non Migas Indonesia, 2006-2010

Nilai ekspor non migas Indonesia ke dunia selama 2006-2010 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,9%

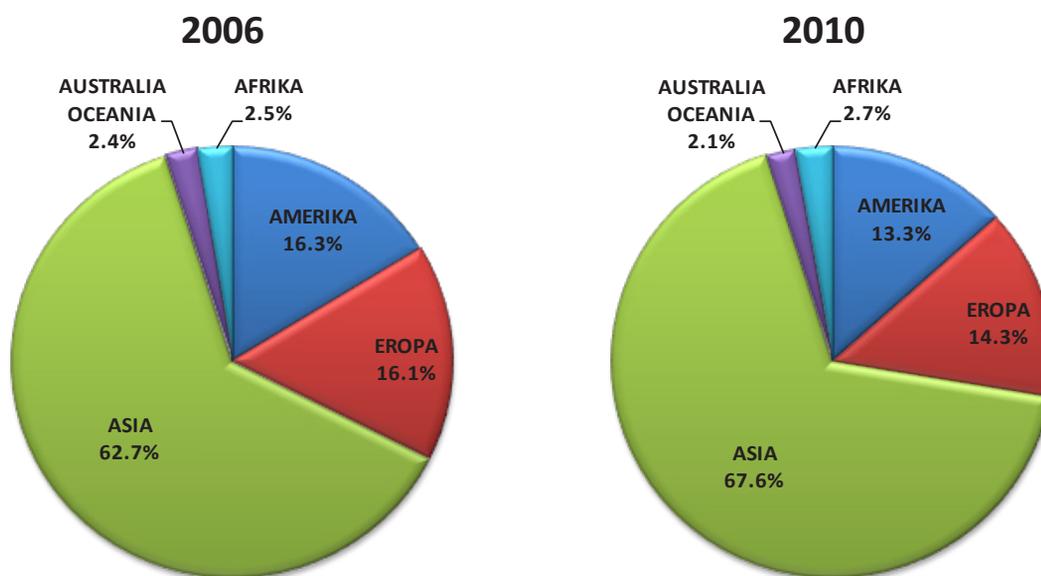
per tahun. Kontraksi ekspor non migas terjadi pada tahun 2009 dengan penurunan sebesar 9,6% sebagai dampak dari krisis perekonomian global. Penurunan terbesar terjadi di sektor industri (16,9%), diikuti oleh penurunan sektor pertanian (5,1%). Sektor hasil tambang justru mencatatkan peningkatan 32,1%. Pada tahun 2010, ekspor non migas Indonesia ke dunia untuk sektor pertanian tumbuh 14,9%, sektor industri tumbuh 33,5%, dan sektor hasil tambang tumbuh 35,6%. Kenaikan ekspor non migas Indonesia tahun 2010 tersebut didukung oleh peningkatan ekspor ke semua region. Ekspor non migas ke Amerika naik 32,3%, Eropa naik 27,6%, Asia naik 34,7%, Australia Oceania naik 34,5%, dan Afrika naik 26,3%.

Dilihat berdasarkan wilayah, ekspor non migas Indonesia selama periode 2006-2010 paling banyak ditujukan ke Asia. Pada tahun 2006, ekspor non migas Indonesia ke Asia sebesar US\$ 49,9 miliar dan meningkat hampir dua kali lipat di tahun 2010 menjadi US\$ 87,7 miliar. Tren ekspor non migas ke Asia menunjukkan peningkatan yang paling tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya yaitu 13% per tahun. Selain meningkat secara absolut, pangsa nilai ekspor non migas Indonesia ke Asia juga mengalami peningkatan dari 62,7% di tahun 2006 menjadi 67,6% di tahun 2010.

Secara keseluruhan, tujuan ekspor non migas Indonesia ke beberapa wilayah periode 2006-2010 mengalami

pergeseran, meskipun dalam nilai yang kecil (Gambar 1). Asia masih menjadi tujuan utama ekspor non migas. Amerika yang menempati peringkat kedua ekspor non migas Indonesia tahun 2006 dengan pangsa 16,3% menurun menjadi 13,3% pada tahun 2010. Posisinya digeser oleh ekspor non migas ke Eropa yang pada 2010 memiliki pangsa sebesar

14,3%. Dalam hal ini, ekspor non migas ke Amerika dan Eropa mengalami penurunan. Pangsa nilai ekspor non migas ke Australia Oceania juga mengalami penurunan dari 2,4% (2006) menjadi 2,1% (2010), sedangkan pangsa ekspor non migas ke Afrika mengalami peningkatan dari 2,5% (2006) menjadi 2,7% (2010).



Gambar 1. Pangsa Tujuan Ekspor Non Migas Indonesia berdasarkan Wilayah

Sumber: BPS (2011), diolah

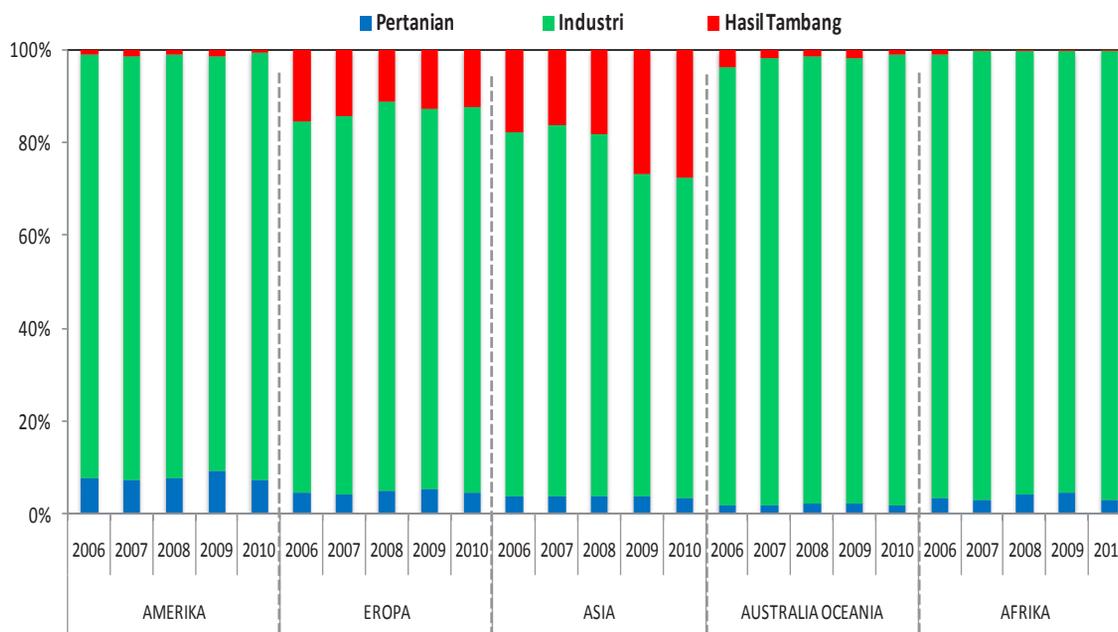
Secara keseluruhan, ekspor sektor industri mendominasi ke seluruh region tujuan ekspor non migas Indonesia sebagaimana terlihat pada Gambar 2. Proporsi ekspor sektor pertanian relatif besar di Amerika dibandingkan region yang lain, dengan pangsa rata-rata 2006-2010 sebesar 7,7%. Sementara itu, pangsa sektor hasil pertambangan terlihat cukup besar di Asia dan Eropa.

Komposisi ekspor sektor hasil tambang terhadap ekspor non migas Indonesia ke Eropa cenderung menurun selama periode 2006-2010, namun sebaliknya komposisi ekspor sektor hasil tambang ke Asia cenderung meningkat.

Bila dilihat berdasarkan negara, ekspor sektor pertambangan Indonesia ke Asia banyak ditujukan pada partner dagang utama seperti Jepang, China,

dan Korea Selatan yang juga merupakan mitra perjanjian perdagangan bebas bagi Indonesia. Pada tahun 2010, pangsa nilai ekspor hasil tambang ke Asia terhadap

ekspor non migasnya mencapai 27,6%. Untuk Australia Oceania dan Afrika, proporsi sektor pertanian dan hasil tambang relatif sangat kecil.

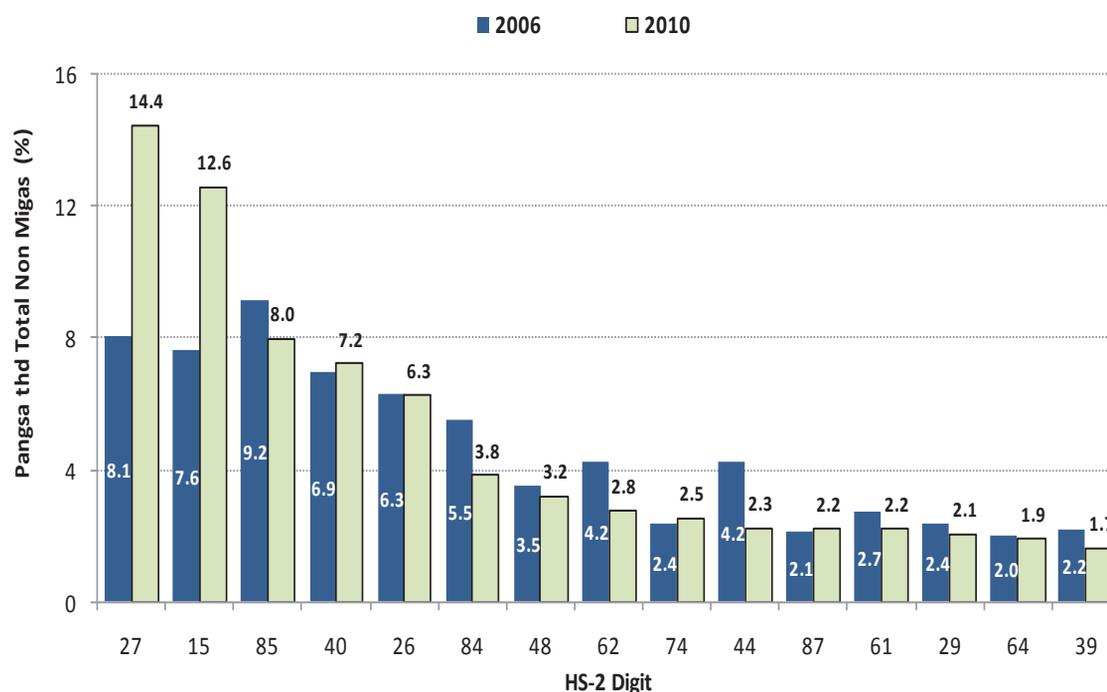


Gambar 2. Pangsa Nilai Ekspor Non Migas Sektoral Indonesia pada masing-masing Region Tujuan Ekspor, 2006-2010

Sumber: BPS (2011), diolah

Seperti terlihat pada Gambar 3, selama periode 2006-2010 komposisi produk ekspor Indonesia menggunakan HS-2 digit tidak terlalu menunjukkan perubahan yang signifikan kecuali untuk produk bahan bakar mineral (HS 27) serta lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15). Pada tahun 2006, pangsa ekspor bahan bakar mineral terhadap total ekspor non migas Indonesia ke dunia sebesar 8,1% dan pada tahun 2010 melonjak menjadi 14,4%. Sementara itu, pangsa

nilai ekspor lemak dan minyak hewan/nabati terhadap total ekspor non migas Indonesia ke dunia juga mengalami peningkatan dari 7,6% pada tahun 2006 menjadi 12,6% pada tahun 2010. Jika dilihat lebih mendalam lagi, komoditi yang penyumbang terbesar terhadap ekspor bahan bakar mineral adalah batu bara sedangkan komoditi yang berkontribusi besar terhadap ekspor lemak dan minyak hewan/nabati adalah *crude palm oil* (CPO).



Gambar 3. Distribusi Produk Ekspor Non Migas Indonesia ke Dunia berdasarkan HS 2 Digit

Sumber: BPS (2011), diolah

Keterangan:

- Produk diranking berdasarkan nilai terbesar tahun 2010 dan diambil 15 kategori produk tertinggi yang merepresentasikan kurang lebih 70% ekspor non migas Indonesia.
- Uraian produk (HS 2 digit) adalah sebagai berikut:

27	bahan bakar mineral	84	mesin-mesin/pesawat mekanik	87	kendaraan dan bagiannya
15	lemak & minyak hewan/nabati	48	kertas/karton	61	produk-produk rajutan
85	mesin/peralatan listrik	62	pakaian jadi bukan rajutan	29	bahan kimia organik
40	karet dan produk dari karet	74	tembaga	64	alas kaki
26	bijih, kerak,, dan abu logam	44	kayu, produk dari kayu	39	plastik dan produk dari plastic

Marjin Intensif dan Ekstensif

Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana tersaji pada Tabel 1, pertumbuhan nilai ekspor non migas Indonesia ke dunia tahun 2010 terhadap tahun 2009 lebih didominasi oleh marjin intensif (98,4%) dibandingkan dengan marjin ekstensif (1,6%). Selama periode 2009 dan 2010 terdapat 20.847 produk (HS-10 digit) ekspor non migas

Indonesia ke dunia yang terdiri dari 2.845 produk baru yang muncul di tahun 2010 (ekstensifikasi), 14.485 produk yang tetap ada baik di tahun 2009 maupun 2010, dan 3.506 produk yang menghilang di tahun 2010. Jumlah produk baru memiliki pangsa 13,7%, produk bertahan 69,5%, dan produk menghilang 16,8%.

Tingginya peran margin intensif daripada margin ekstensif pada studi ini mengkonfirmasi hasil studi-studi sebelumnya. Sebagai contoh, Brenton dan Newfarmer (2007) menemukan bahwa secara agregat, kontribusi pertumbuhan margin intensif (80,4%) lebih mendominasi dibandingkan dengan margin ekstensif (19,6%). Sementara itu, dalam studi Amiti dan Freund (2007) ditemukan bahwa intensifikasi arus perdagangan yang telah ada (margin intensif) mencapai lebih dari 95%.

Jika dilihat dari jumlah produknya, ekspor produk baru lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah produk

ekspor yang menghilang. Namun dilihat dari nilainya, produk baru kontribusinya terhadap nilai pertumbuhan tahun 2012 masih lebih besar dibanding dengan produk ekspor yang hilang. Tingginya margin intensif mengindikasikan bahwa pertumbuhan non migas Indonesia lebih banyak ditopang oleh produk-produk yang secara historis sering diekspor. Dengan kata lain, penciptaan produk ekspor baru (keberagaman/diversifikasi produk) sangat rendah yang bisa disebabkan rendahnya inovasi industri maupun kesulitan dalam memasarkan produk baru di tujuan ekspor.

Tabel 1. Dekomposisi Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas Indonesia

Tujuan Ekspor	2010/2009					2010/2006				
	Pangsa Pertumbuhan Non Migas dari:				Pertumbuhan Non Migas	Pangsa Pertumbuhan Non Migas dari:				Pertumbuhan Non Migas
	Bertahan	Menghilang	Intensif	Ekstensif		Bertahan	Menghilang	Intensif	Ekstensif	
DUNIA	99.8%	1.4%	98.4%	1.6%	33.1%	95.7%	4.4%	91.3%	8.7%	63.0%
	[14,485]	[3,506]		[2,856]	[20,847]	[12,664]	[4,909]		[4,677]	[22,250]
AMERIKA	13.0%	0.3%	12.7%	0.4%		7.9%	1.1%	6.8%	1.9%	
	[2,364]	[702]		[599]		[2,036]	[1,051]		[927]	
EROPA	12.5%	0.3%	12.2%	0.2%		10.9%	1.0%	9.8%	1.6%	
	[2,737]	[835]		[611]		[2,405]	[1,141]		[943]	
ASIA	69.9%	0.4%	69.5%	0.5%		72.7%	1.5%	71.2%	4.1%	
	[5,759]	[689]		[616]		[5,198]	[902]		[1,177]	
AUSTRALIA OCEANIA	2.0%	0.2%	1.9%	0.3%		1.5%	0.4%	1.1%	0.6%	
	[2,023]	[706]		[550]		[1,725]	[997]		[848]	
AFRIKA	2.3%	0.2%	2.1%	0.2%		2.7%	0.4%	2.3%	0.6%	
	[1,602]	[574]		[480]		[1,300]	[818]		[782]	

Sumber : Hasil Perhitungan Penulis (2011)
Keterangan : Angka dalam [...] menunjukkan jumlah produk (HS-10 digit)

Berdasarkan region, margin intensif pertumbuhan ekspor non migas 2010 lebih banyak disumbang oleh Asia, yaitu sebesar 69,5%. Hasil ini konsisten dengan data sebelumnya yang menun-

jukkan bahwa Asia merupakan tujuan utama ekspor non migas Indonesia. Produk yang menghilang banyak terjadi di Eropa, Australia Oceania dan Amerika yang mengindikasikan susah nya produk

Indonesia untuk masuk ke negara-negara maju yang memiliki standar mutu produk yang tinggi.

Dengan memperpanjang rentang waktu (2006-2010), diperoleh hasil yang sama yaitu bahwa pertumbuhan non migas Indonesia lebih ditopang oleh pertumbuhan margin intensif daripada margin ekstensif. Namun demikian, nilai margin ekstensif semakin besar disebabkan variasi produk baru yang diekspor semakin banyak. Margin ekstensif ekspor Indonesia ke dunia 2010/2006 sebesar 8,7%, lebih tinggi daripada margin ekstensif 2010/2009 yang hanya sebesar 1,6%. Hal ini dikarenakan semakin panjang rentang tahun yang digunakan semakin banyak produk baru yang muncul. Pada periode 2010/2009, sebanyak 2.856 produk yang dikategorikan dalam margin ekstensif, berbeda dengan periode 2010/2006 yang berjumlah 4.677 produk atau mengalami peningkatan 63,8%.

Asia masih menjadi tujuan ekspor utama yang menyumbang tertinggi terhadap margin intensif maupun margin ekstensif pertumbuhan ekspor non migas Indonesia, masing-masing sebesar 71,2% dan 4,1%. Selama periode lima tahun tersebut, margin ekstensif ke Afrika sama dengan margin ekstensif ke Australia Oceania meskipun jumlah produk ekspor lebih sedikit. Hal ini memberikan sinyal bahwa pasar Afrika prospektif untuk terus dikembangkan, salah satunya dengan mengalihkan

tujuan ekspor dari negara-negara maju yang memiliki hambatan non-tarif tinggi. Diversifikasi produk ekspor ke wilayah baru (misalnya Afrika) tidak harus dengan mengeksport produk yang benar-benar baru (inovasi produk), tetapi dapat dengan memasarkan produk yang biasa diekspor ke tujuan yang lama pada wilayah baru tersebut.

Variasi Pertumbuhan Ekspor

Dengan menggunakan Indeks Feenstra, jumlah varietas ekspor Indonesia ke dunia 2010/1009 mengalami pertumbuhan yang positif meski angkanya sangat kecil (0,0004). Sementara itu, ekspor produk baru ke Amerika, Eropa, Asia, dan Afrika menunjukkan relatif tidak penting terhadap pertumbuhan ekspor tahun 2010/2009 (Tabel 2). Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan ekspor yang terjadi pada tahun 2010 lebih didorong oleh produk lama yang biasa diekspor ke empat kawasan tersebut. Produk ekspor Indonesia yang bertahan di saat krisis perkonomian dunia 2009 memberikan andil yang tinggi terhadap nilai ekspor Indonesia 2010, tahun dimana Indonesia menikmati pertumbuhan ekspor non migas yang tinggi. Sementara itu dengan menggunakan tahun dasar 2006, varietas pertumbuhan ekspor Indonesia ke dunia tahun 2010 menunjukkan angka Indeks Feenstra yang lebih besar (0.0171). Hal ini berarti ekspor produk baru semakin penting dalam pertumbuhan ekspor.

Tabel 2. Variasi Pertumbuhan Netto

Tujuan Ekspor	Indeks Feenstra	
	2010/2009	2010/2006
DUNIA	0.0004	0.0171
AMERIKA	-0.0006	0.0111
EROPA	-0.0023	0.0026
ASIA	-0.0002	0.0087
AUSTRALIA OCEANIA	0.0084	-0.0080
AFRIKA	-0.0115	0.0033

Sumber: Hasil Perhitungan Penulis (2011)

Pertumbuhan Margin Intensif

Dengan menggunakan dekomposisi ekspor maupun Indeks Feenstra, terlihat bahwa pertumbuhan ekspor non migas Indonesia tahun 2010 terhadap tahun 2009 lebih didorong oleh margin intensif atau produk yang biasa diekspor sebelumnya.

Seperti dilihat pada Tabel 3, produk-produk dalam margin intensif yang diekspor ke dunia tahun 2010 mengalami peningkatan nilai sebesar 33,8% dan peningkatan volume sebesar 27,1% dibandingkan tahun 2009. Semua region tujuan ekspor non migas Indonesia mengalami peningkatan nilai,

namun tidak semua volume ekspor di seluruh tujuan mengalami peningkatan. Sebagai contoh, volume ekspor non migas ke Eropa dan Australia Oceania masing-masing mengalami penurunan 12,7% dan 6,2%. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan yang tinggi pada margin intensif pada tahun 2010 lebih ditopang oleh tingginya harga di tingkat internasional. Selain itu, penurunan volume ekspor di Eropa merepresentasikan belum pulihnya sektor industri di wilayah tersebut karena permintaan bahan baku industri yang cenderung rendah.

Tabel 3. Pertumbuhan Margin Intensif, 2010/2009

Tujuan Ekspor	Pertumbuhan (%)		
	Nilai	Volume	Unit Harga
Amerika	33.4	10.4	20.8
Eropa	28.7	-12.7	47.5
Asia	35.0	31.6	2.5
Australia Oceania	37.8	-6.2	46.8
Afrika	31.3	4.0	26.3
Dunia	33.8	27.1	5.3

Sumber: Hasil Perhitungan Penulis (2011)

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Tujuan ekspor non migas Indonesia ke beberapa wilayah periode 2006-2010 mengalami sedikit pergeseran. Benua Amerika yang menempati peringkat kedua tujuan ekspor non migas Indonesia tahun 2006 digeser posisinya oleh Eropa pada tahun 2010. Namun demikian, Asia masih menjadi tujuan utama ekspor non migas Indonesia. Selama periode 2006-2010, sektor industri masih dominan pada struktur ekspor Indonesia untuk seluruh kawasan tujuan ekspor. Meskipun demikian, pangsa ekspor hasil tambang ke Asia cenderung meningkat. Sementara itu, komposisi produk ekspor Indonesia tahun 2010 lebih terkonsentrasi pada produk bahan bakar mineral (HS 27) serta lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15) dibandingkan tahun 2006.

Terkait dengan komponen pertumbuhan, ekspor non migas Indonesia lebih ditopang oleh pertumbuhan margin intensif daripada margin ekstensif. Margin intensif ekspor non migas 2010/2009 mencapai 98,4% sedangkan periode 2010/2006 sebesar 91,3%. Tingginya margin intensif mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekspor non migas Indonesia pada periode pemulihan ekonomi global sangat mengandalkan pada produk tradisional yang biasa diekspor selama ini. Meskipun krisis perekonomian global mengakibatkan pengurangan permintaan, tetapi produk kategori ini relatif dapat bertahan di

pasaran karena umumnya berada pada tahap kedewasaan produk yang telah melewati persaingan. Pada level mikro, perusahaan akan mendapatkan keuntungan dengan menjaga pasokan, peningkatan kualitas dan produksi pada produk tersebut. Hal ini juga dapat diinterpretasikan rendahnya inovasi produk baru selama periode krisis ekonomi global karena biaya pengembangan (investasi) yang tinggi dan produk berada tahap penemuan (*discovery*) dimana masih mencari pasar ekspor yang lebih bagus dan stabil.

Selain itu dilihat berdasarkan region, Asia menjadi tujuan ekspor utama yang menyumbang tertinggi terhadap margin intensif maupun ekstensif pertumbuhan ekspor non migas Indonesia, sedangkan diversifikasi produk ke pasar Afrika mengalami peningkatan. Pertumbuhan margin intensif, terutama ke kawasan Eropa dan Australia Oceania, disebabkan oleh peningkatan harga dibandingkan dengan volume ekspor. Dengan demikian, kinerja ekspor Indonesia relatif rentan terhadap gejolak eksternal terutama terkait fluktuasi harga komoditas internasional.

Pemerintah diharapkan dapat menjaga keberlangsungan produk ekspor pada pasar yang telah ada karena masih tingginya peran margin intensif pertumbuhan ekspor non migas. Pasar di kawasan Asia harus tetap dijaga karena memberikan kontribusi yang penting bagi ekspor non migas Indonesia. Selain itu, kawasan Afrika

dapat menjadi pasar alternatif untuk produk Indonesia yang memiliki daya saing ekspor tinggi sebagai antisipasi pasar Eropa yang belum pulih benar dari krisis ekonomi dan meningkatnya risiko utang di kawasan Eropa.

Kesuksesan dalam mencapai pertumbuhan ekspor dan peningkatan diversifikasi tidak hanya ditentukan oleh munculnya produk baru dan masuknya produk ke pasar baru, tetapi juga kesinambungan dan peningkatan aliran produk ekspor. Oleh karena itu, studi lanjutan dapat dilakukan misalnya dengan memasukkan unsur survival suatu produk dalam memasuki pasar baru. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk mengetahui seberapa lama promosi harus tetap dilakukan agar suatu produk tetap berada di pasar tujuan ekspor dalam jangka waktu yang lama dan bukan hanya sekali muncul kemudian menghilang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, R., J. Alwang, dan P. B. Siegel. (1991). Is Export Diversification the Best Way to Achieve Export Growth and Stability? A Look at Three African Countries. World Bank Working Papers No. 729.
- Amiti, M. dan C. Freund. (2007). An Anatomy of China's Export Growth. Global Implications of China's Trade, Investment and Growth Conference. IMF, Research Department, April.
- Amiti, M. dan C. Freund (2008). The Anatomy of China's Export Growth. Policy Research Working Paper, WPS 4628, The World Bank Development Research Group
- Amurgo-Pacheco, A. and M. D. Pierola. (2008). Patterns of Export Diversification in Developing Countries: Intensive and Extensive Margins. The World Bank Policy Research Working Paper, WPS 4473.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2011). Data Ekspor dan Impor periode 2006-2010.
- Brenton, P dan R. Newfarmer. (2007). Watching More Than the Discovery Channel: Export Cycles and Diversification in Development. The World Bank Policy Research Working Paper, WPS 4302,
- Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2009). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional 2005-2009.
- Feenstra, R. C. (1994). New Product Varieties and the Measurement of International Prices. American Economic Review, vol. 84(1), pp. 157-177.
- Hillberry, R. H. and C. A. McDaniel. (2002). A Decomposition of North American Trade Growth since NAFTA. U.S. International Trade Commission Working Paper 2002-12-A.
- Hummels, D. dan P. J. Klenow. (2005). The Variety and Quality of a Nation's Exports. American Economic Review, pp. 704-723.
- International Monetary Fund (IMF). (2011). World Economic Outlook:

- Slowing Growth, Rising Risks. September 2011.
- Kehoe, T. J. dan K. J. Ruhl. (2009). How Important is the New Goods Margin in International Trade? Federal Reserve Bank of Minneapolis, Research Department Staff Report No. 324.
- Kementerian Perdagangan. (2010). Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Periode 2010-2014.
- Liapis, P. S. dan A. Fournier. (2008). How Important is the Extensive Margin in Agricultural Trade? International Trade Research Consortium (IATRC) Winter Meeting, December.
- Mohan, P. (2011). Caribbean Export Diversification along its Development Path. University of the West Indies.
- Republik Indonesia. (2010). Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
- Republik Indonesia. (2010). Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011.
- Republik Indonesia. (2011). Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012.
- Ricardo, D. (1817). On the Principles of Political Economy and Taxation. London: John Murray
- Samen, S. (2010). A Primer on Export Diversification: Key Concepts, Theoretical Underpinnings and Empirical Evidence. World Bank Institute.
- Smith, A. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London: Methuen & Co., Ltd.
- Tsivadze, N. (2011). Export Diversification in Georgia: Intensive and Extensive Margins. Master's Thesis: International School of Economics, Tbilisi State University.

IJ-EPA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA PERDAGANGAN INDONESIA - JEPANG

IJ-EPA and Its Implication to Trade Performance of Indonesia – Japan

Aziza R. Salam¹, Sefiani Rayadiani², dan Immanuel Lingga²

¹Peneliti, ²Calon Peneliti pada Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta, aziza@kemendag.go.id

Naskah diterima : 6 Maret 2012

Disetujui diterbitkan : 8 Juni 2012

Abstrak

Indonesia dan Jepang telah menandatangani perjanjian kerjasama Indonesia Jepang *Economic Partnership Agreement* (IJ-EPA) pada tahun 2007. Untuk mewujudkan kesepakatan perdagangan bebas tersebut dan untuk menghindari adanya *trade diversion* sebagai dampak dari tarif preferensi, maka kedua negara mempersyaratkan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk mensertifikasi asal barang yang diperdagangkan. Berdasarkan hasil analisa data statistik dan survey diperoleh kesimpulan bahwa pemanfaatan SKA Form IJ-EPA ternyata relatif lebih rendah dibandingkan dengan kesepakatan perdagangan bebas lainnya yang telah ditandatangani dan diimplementasikan di Indonesia. Ketidakefektifan yang terjadi dikarenakan beberapa faktor antara lain: masih adanya penggunaan Form A dalam ekspor ke Jepang, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di berbagai IPSKA, keengganan pencantuman struktur biaya dalam SKA Form IJ-EPA, dan kurangnya sosialisasi mengenai fasilitas IJ-EPA. Dari segi perdagangan bilateral, kesepakatan perdagangan bebas IJ-EPA berdampak pada perubahan pola impor Indonesia dari Jepang dimana terdapat beberapa produk yang mengalami lonjakan, seperti produk Kendaraan Bermotor dan Mesin Diesel. Sebaliknya, implementasi IJ-EPA tidak memiliki dampak yang berarti terhadap pola ekspor Indonesia ke Jepang.

Kata kunci : Indonesia-Jepang, Perdagangan Bebas, Surat Keterangan Asal

Abstract

In 2007 Indonesia and Japan signed a partnership agreement of Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA). In order to implement the IJ-EPA and to prevent trade diversion as an impact of tariff preferences, both governments required the Certificate of Origin (COO) scheme. This study elaborates the use of COO-IJ-EPA and the impact of IJ-EPA on bilateral trade performances between the two countries. According to data analysis and survey, it was found that the number of COO-IJ-EPA was the lowest compared to other free trade agreements. The low share of the COO-IJ-EPA was caused by the following factors: the use of Form A as an alternative choice in export activity, inadequate human resources at the institutions issuing COO, reluctance to disclose the production cost structure and the lack of socialization in regards with trade facilitation under IJ-EPA scheme. Bilateral agreement under IJ-EPA has also brought impact to the Indonesia's import pattern with Japan. After the implementation of the agreement, Indonesia's import for certain products increased significantly, such as importation of automotive products and diesel machines. On the contrary, the agreement did not have significant impact to Indonesia's export pattern.

Keywords : Indonesia-Japan, Free Trade, Certificate of Origin

JEL Classification : F13, F14

PENDAHULUAN

Hubungan kerjasama Indonesia–Jepang telah berjalan selama lebih dari 50 tahun, dimana bagi Indonesia, Jepang merupakan negara mitra dagang utama, baik dalam hal ekspor maupun impor. Jepang menempati peringkat pertama dengan pangsa pasar 12,72% sebagai negara tujuan ekspor non-migas Indonesia pada tahun 2010. Sementara itu, pada tahun yang sama posisi Jepang sebagai negara asal produk impor non-migas menempati peringkat kedua setelah Republik Rakyat China (RRC) dengan pangsa pasar 15,62%. Selain sebagai negara mitra dagang utama Indonesia, Jepang juga merupakan salah satu investor utama di Indonesia. Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Jepang di Indonesia pada tahun 2010 mencapai USD 712,6 juta yang meliputi 323 proyek (BPS, 2011 dan BKPM, 2011). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Jepang mempunyai peranan yang cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, khususnya terhadap pengembangan investasi di Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi yang lebih komprehensif antara Indonesia dengan Jepang, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tanggal 20 Agustus 2007 menyepakati adanya kemitraan ekonomi antara Indonesia dengan Jepang melalui penandatanganan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJ-EPA). Kesepakatan ini

merupakan perjanjian perdagangan bebas bilateral pertama yang dilakukan oleh Indonesia, yang disahkan melalui Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement Between The Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi) dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2008.

Berdasarkan data Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan, pada tahun 2010 pemanfaatan Surat Keterangan Asal (SKA) Form IJ-EPA hanya sekitar 16% terhadap ekspor nonmigas Indonesia ke Jepang dengan nilai USD 2,9 juta dan total Form SKA IJ-EPA sebanyak 53.182 lembar. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan terhadap pemanfaatan IJ-EPA tersebut. Tulisan ini akan menjawab dua permasalahan yaitu: 1) apa yang menyebabkan rendahnya pemanfaatan SKA Form IJ-EPA? dan 2) bagaimana dampak implementasi kesepakatan perdagangan bebas IJ-EPA terhadap kinerja perdagangan Indonesia dan Jepang?

TINJAUAN PUSTAKA

Komposisi, arah dan bentuk perdagangan internasional atau kegiatan perdagangan internasional suatu negara tidak terlepas dari segala tindakan pemerintahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan perdagangan internasional memiliki

implikasi yang sangat luas, tidak hanya dalam volume dan komposisi impor dan ekspor, pola investasi dan arah pengembangan, tetapi juga kondisi persaingan, kondisi biaya, sikap pebisnis dan wirausahawan, pola konsumsi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan internasional sangat penting dalam keputusan kebijakan ekonomi suatu negara dan kebijakan ini hanya salah satu bagian kebijakan makroekonomi yang harus dikombinasikan dan bersifat mendorong pembangunan perekonomian suatu negara.

Kebijakan perdagangan internasional dapat ditujukan untuk melindungi/memproteksi industri baru di dalam negeri yang sedang tumbuh (*infant industry*) dari persaingan dengan barang-barang impor. Adapun tujuan kebijakan perdagangan internasional yang bersifat proteksi adalah memaksimalkan produksi dalam negeri, memperluas lapangan kerja, memelihara tradisi nasional, menghindari resiko yang mungkin timbul jika hanya tergantung pada satu komoditi atau satu negara. Proteksi dapat dilakukan dengan penerapan berbagai instrumen kebijakan perdagangan internasional baik berupa hambatan perdagangan tarif maupun non tarif.

Kebijakan perdagangan internasional tidak hanya bersifat proteksi, tetapi juga upaya mendukung kebijakan perdagangan bebas yang memungkinkan suatu negara untuk berspesialisasi dalam memproduksi barang di mana negara

tersebut memiliki keunggulan komparatif. Pendukung kebijakan perdagangan bebas menekankan bahwa kebijakan perdagangan bebas akan mengarah pada efisiensi dan akan meningkatkan kesejahteraan nasional.

Bank Indonesia (2008) memaparkan beberapa instrumen kebijakan perdagangan internasional yang umum dipakai di berbagai negara, antara lain 1) Tarif impor tidak lain merupakan instrumen pajak yang dikenakan pemerintah atas barang-barang impor, 2) Kuota impor adalah instrumen pembatasan kuantitas barang yang dapat diimpor dalam kurun waktu tertentu, 3) *Voluntary Exports Restraints* (VER) merupakan instrument pembatasan yang dikenakan pemerintah negara eksportir terhadap kuantitas barang yang diekspor dalam jangka waktu tertentu, 4) Pajak (bea keluar) ekspor adalah instrumen pajak yang dikenakan pada barang ekspor. Seperti halnya tarif impor, pajak ekspor dapat berupa pajak khusus ataupun pajak ad valorem, 5) Subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu menutupi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri, sehingga produsen dalam negeri dapat menjual barangnya lebih murah dan bisa bersaing dengan barang impor, 6) *Voluntary Import Expansion* (VIE) merupakan instrumen kebijakan perdagangan internasional yang lahir dari kesepakatan antara dua negara mitra dagang untuk meningkatkan kuantitas impor tertentu yang berasal dari salah satu negara tersebut, dan

7) Dumping, kebijakan perdagangan internasional yang bertujuan untuk mengadakan diskriminasi harga, yakni produsen menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kekuatan monopoli di dalam negeri yang lebih besar dan terdapatnya hambatan yang cukup kuat menjadi persyaratan yang harus dipenuhi dalam kebijakan dumping.

Beberapa studi berkesimpulan bahwa perdagangan bebas berimplikasi positif bagi negara-negara yang terlibat. Di samping meningkatkan kesejahteraan, Lindert dan Kindleberger (1986) berpendapat bahwa perdagangan bebas juga meningkatkan kuantitas perdagangan dunia dan efisiensi. Urata dan Kiyota (2005) menemukan bahwa FTA di Asia Timur memberi pengaruh positif pada ekonomi. Ekspor dengan daya saing tinggi akan meningkat. Dermoredjo, Wahida, dan Hutabarat (2007) menunjukkan penurunan subsidi ekspor di negara maju berdampak pada peningkatan produksi pertanian Indonesia. Berbeda dengan hasil studi yang secara umum memberikan dampak positif, Haryadi et.al (2008) memperlihatkan bahwa liberalisasi perdagangan dengan cara menghapus semua hambatan perdagangan berdampak pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan Australia-Selandia Baru.

Salah satu indikator untuk mengukur dampak kerjasama perdagangan internasional adalah dengan melihat

terjadinya *trade diversion* dan *trade creation*. Efek positif, yaitu *trade creation* adalah terjadinya perdagangan akibat beralihnya konsumsi dari PDB yang bersifat *high-cost* ke produk impor dari luar negeri yang bersifat *low-cost*; dengan kata lain terjadi perdagangan yang mengikat intranegara mitra. Namun demikian, perbedaan tarif yang diberlakukan untuk mitra dan non mitra, merubah arah kecenderungan perdagangan sehingga menimbulkan efek negatif yaitu *trade diversion*, yang merujuk kepada perpindahan dari produk impor yang bersifat *low-cost* dari negara non anggota dengan produk impor yang bersifat *high-cost* dari negara mitra; dengan kata lain terjadi perdagangan yang menurun dengan negara non mitra. *Trade diversion* akan menurunkan efek kesejahteraan sehubungan dengan terjadinya perubahan orientasi suplai ke sumber yang relatif lebih mahal.

Manfaat perdagangan bebas sangat ditentukan oleh salah satu efek yang lebih dominan. Efek secara keseluruhan dapat bersifat positif, negatif ataupun netral, tergantung dari besarnya magnitude dari *trade creation* dan *trade diversion*. Perdagangan bebas akan sangat menguntungkan apabila dampaknya terhadap *trade creation* lebih besar dibandingkan dampaknya terhadap *trade diversion*.

Penelitian pemanfaatan SKA atau *Certificate of Origin* (COO) oleh berbagai perusahaan di Jepang, khususnya terkait dengan kesepakatan perdagangan

bebas secara bilateral yang dilakukan oleh Jepang dengan beberapa negara mitranya (Malaysia, Meksiko, dan Chili) telah dilakukan oleh Takahashi dan Urata pada tahun 2010. Hasil studi Takahashi dan Urata (2010) memperlihatkan bahwa tingkat pemanfaatan berkisar 12,2% untuk Japan-Malaysia FTA dan hingga 32,9% untuk Japan-Mexico FTA. Di samping itu, studi tersebut menemukan beberapa kendala utama yang membatasi pemanfaatan SKA dengan negara mitra FTA, yakni kecilnya perdagangan dengan negara mitra FTA, kesulitan mendapatkan SKA yang dibutuhkan, dan kurangnya pengetahuan tentang FTA. Dari segi tarif preferensi, perbedaan tarif MFN dan tarif preferensi sangat kecil. Studi tersebut juga menemukan karakteristik perusahaan yang menggunakan FTA, yaitu perusahaan besar, memiliki keterikatan bisnis dengan negara mitra FTA, dan perusahaan beroperasi dalam industri mesin transportasi.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan statistik deskriptif. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran dan analisis dampak implementasi kesepakatan perdagangan bebas IJ-EPA terhadap kinerja perdagangan Indonesia dan Jepang. Analisis deskriptif juga dilakukan untuk melihat tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap adanya kesepakatan perdagangan bebas IJ-EPA, termasuk

di dalamnya pemahaman terhadap persyaratan, prosedur penerbitan dan permasalahan rendahnya pemanfaatan SKA Form IJ-EPA.

Data

Studi ini mempergunakan dua jenis data, yakni data primer (data terkait pemahaman pelaku usaha terhadap adanya kesepakatan perdagangan bebas IJ-EPA, tarif preferensi IJ-EPA dan pemahaman akan persyaratan prosedur penerbitan SKA Form IJ-EPA serta kendala apa yang menghambat dalam proses penerbitan SKA Form IJ-EPA) dan data sekunder terkait dengan data ekspor impor, data realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA), dan data pemanfaatan Surat Keterangan Asal (SKA). Data primer digunakan untuk menjawab penyebab permasalahan rendahnya pemanfaatan SKA Form IJ-EPA.

Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara secara langsung dan penyebaran kuesioner ke berbagai instansi terkait, asosiasi, dan para pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor ke Jepang khususnya yang bergerak dalam industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya, Cokelat dan Kembang Gula, Garmen, Furnitur, dan Barang dari Plastik di Medan, Semarang, Denpasar, Manado, Surabaya, dan Bandung. Adapun teknik penarikan sampel dilakukan secara *purposive sampling*.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui pengumpulan data, dokumen, dan/atau publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik, Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan, *World Integrated Trade Solution* (WITS), dan berbagai sumber terkait lainnya guna memberikan gambaran dan analisis dampak implementasi kesepakatan perdagangan bebas IJ-EPA terhadap kinerja perdagangan Indonesia dan Jepang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala Pemanfaatan SKA Form IJ-EPA

Agar dapat memanfaatkan penghapusan atau pengurangan tarif bea masuk baik di Indonesia maupun di Jepang, dalam setiap kegiatan ekspor dan impor antara Indonesia dan Jepang harus dilengkapi dengan SKA preferensi Form IJ-EPA. Surat Keterangan Asal adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian baik bilateral, regional, multilateral dan unilateral. Dokumen SKA ini harus disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia akan memasuki wilayah Jepang atau sebaliknya barang ekspor Jepang akan memasuki wilayah Indonesia, untuk membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan, dan atau diolah di Indonesia atau di Jepang.

Seiring berjalannya waktu, pemanfaatan SKA Form IJ-EPA ternyata relatif lebih rendah dibandingkan dengan kesepakatan perdagangan bebas

lainnya yang telah ditandatangani dan diimplementasikan Indonesia. Berdasarkan catatan Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (2011), pangsa nilai SKA Form IJ-EPA terhadap ekspor non-migas Indonesia ke Jepang sepanjang tahun 2008-2010 dan Januari-September 2010/2011 cenderung fluktuatif. Pangsa nilai SKA Form IJ-EPA terhadap ekspor non-migas Indonesia ke Jepang tahun 2008 sebesar 12,4%, terendah dibandingkan dengan pangsa nilai SKA preferensi FTA lain terhadap ekspor non-migasnya (misalnya, SKA Form AK (AK-FTA) sebesar 63,1%, SKA Form D/ASEAN *Trade In Goods Agreement* (ASEAN AFTA) sebesar 40,5%, dan SKA Form E (AC-FTA) sebesar 23,2%) pada tahun yang sama. Rendahnya pangsa SKA tersebut disebabkan oleh jangka waktu pengimplementasian kesepakatan perdagangan bebas IJ-EPA yang baru berjalan selama enam bulan. Pada tahun 2009 pangsa nilai SKA Form IJ-EPA terhadap ekspor non-migas Indonesia ke Jepang naik menjadi 20,7%, kemudian turun menjadi 16% pada tahun 2010. Selama periode Januari-September 2011 pangsa nilai SKA Form IJ-EPA terhadap ekspor non-migas Indonesia ke Jepang sebesar 28,6%, sedangkan pangsa selama periode Januari-September 2011 mencapai 15,4%. Meskipun pangsa nilai SKA Form IJ-EPA terhadap ekspor non-migas Indonesia ke Jepang periode Januari-September 2011

lebih tinggi dibandingkan dengan periode lainnya, pangsa tetap lebih rendah dibandingkan dengan pangsa nilai SKA tarif preferensi FTA lainnya.

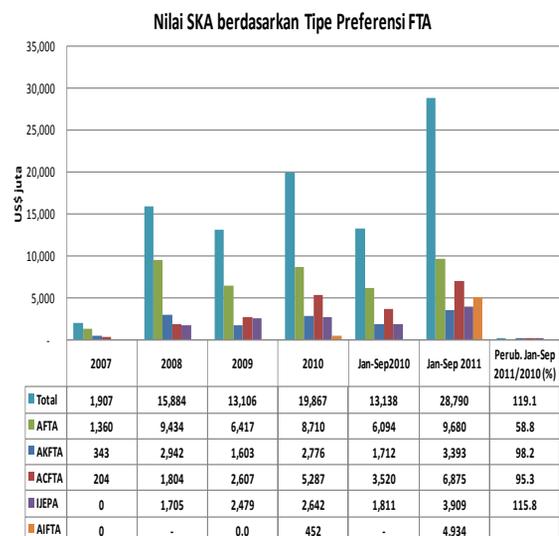
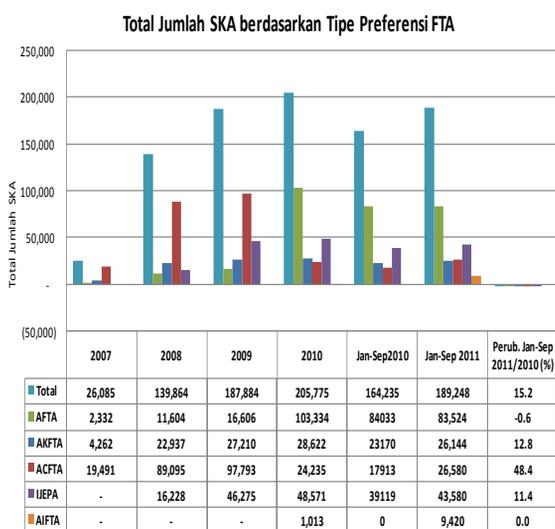
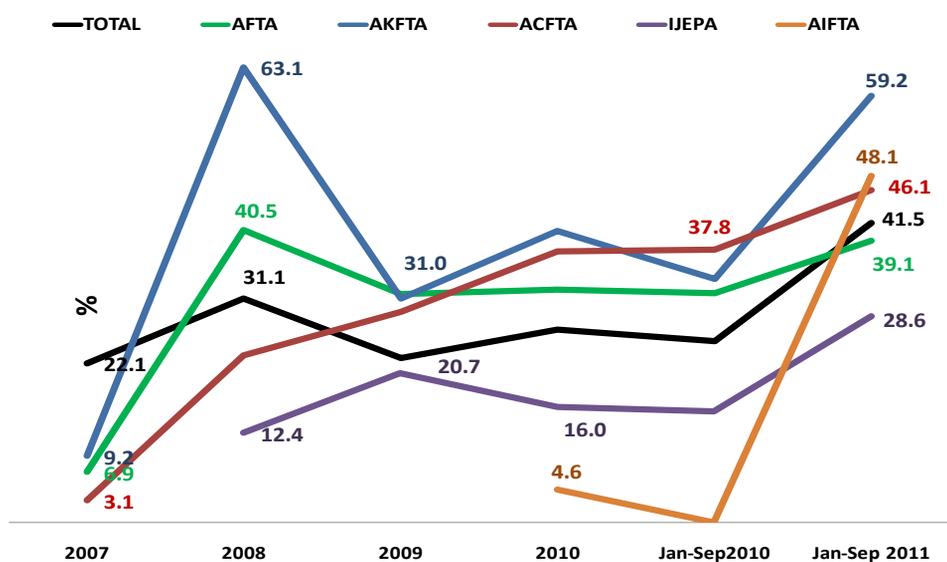
Perkembangan pemanfaatan SKA Form IJ-EPA dalam kegiatan ekspor Indonesia ke Jepang digambarkan dalam Gambar 1, yang menunjukkan pertumbuhan yang relatif tinggi. Pada tahun pertama pelaksanaan IJ-EPA, tahun 2008, Indonesia telah mengeluarkan 16.226 lembar SKA Form IJ-EPA. Kemudian terjadi peningkatan penerbitan SKA Form IJ-EPA pada tahun 2009 dan 2010 masing-masing sebesar 185,2% dan 5% menjadi sebanyak 46.272 lembar dan 53.182 lembar. Penerbitan SKA Form IJ-EPA periode Januari-September 2011 mencapai 43.580 lembar, melebihi jumlah penerbitan SKA Form IJ-EPA periode Januari-September 2010 sebanyak 39.119 lembar. Dengan kata lain, penerbitan SKA Form IJ-EPA periode Januari-September 2011 naik sebesar 11,4% dibandingkan dengan periode Januari-September 2010.

Dari sisi nilai, terjadi juga peningkatan nilai ekspor dengan menggunakan SKA Form IJ-EPA. Nilai ekspor dengan penggunaan SKA Form IJ-EPA meningkat dari USD 1,7 miliar pada tahun 2008 menjadi USD 2,5 miliar pada tahun 2009 dan USD 2,9 miliar pada tahun 2010. Sementara itu nilai SKA Form IJ-EPA periode Januari-September 2011 melonjak tajam sebesar 115,8% dari periode sebelumnya. Nilai ekspor dengan penggunaan SKA Form IJ-EPA periode

Januari-September 2010 hanya mencapai USD 1,8 miliar menjadi sebesar USD 3,9 miliar pada periode yang sama tahun 2011. Hal ini mengindikasikan semakin banyaknya para eksportir Indonesia yang memanfaatkan SKA Form IJ-EPA dan tarif preferensi IJ-EPA dalam melakukan ekspornya ke Jepang.

Berdasarkan data-data tersebut, dapat diperoleh nilai rata-rata ekspor SKA Form IJ-EPA kurun waktu 2008-2010. Pada tahun pertama kesepakatan perdagangan bebas IJ-EPA diimplementasikan, rata-rata nilai ekspor ke Jepang per dokumen SKA sekitar USD 105,1 ribu. Kemudian pada implementasi tahun berikutnya turun hampir mencapai 50%, menjadi sebesar USD 53,6 ribu per dokumen SKA Form IJ-EPA. Pada tahun 2010 nilai rata-rata ekspor per dokumen SKA Form IJ-EPA menjadi USD 54,1 ribu.

Ditinjau dari jenis produk, pemanfaatan SKA Form IJ-EPA selama tahun 2008-2010 didominasi oleh produk Plastik dan Barang Plastik, Bahan Bakar Mineral, Ikan dan Udang, Kayu dan Barang dari Kayu, Serat Staple Buatan, Peralatan Elektrik dan Elektronik, Kimia Organik, Katun, Furnitur, dan Aneka Produk Kimia. Peralatan Elektrik dan Elektronik tercatat memiliki pertumbuhan tertinggi dalam nilai ekspor Indonesia ke Jepang berdasarkan pemanfaatan SKA preferensi pada tahun 2009 dibanding dengan tahun 2008 dengan nilai sebesar 216,1%, sedangkan Aneka Produk Kimia memiliki pertumbuhan tertinggi



Gambar 1. Perkembangan Pemanfaatan Preferensi FTA Tahun 2007 – 2011 (Januari - September)

Sumber: Dit. Fasilitas Ekspor dan Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kemendag (2010), diolah Puska Daglu, BP2KP, Kemendag, 2011.

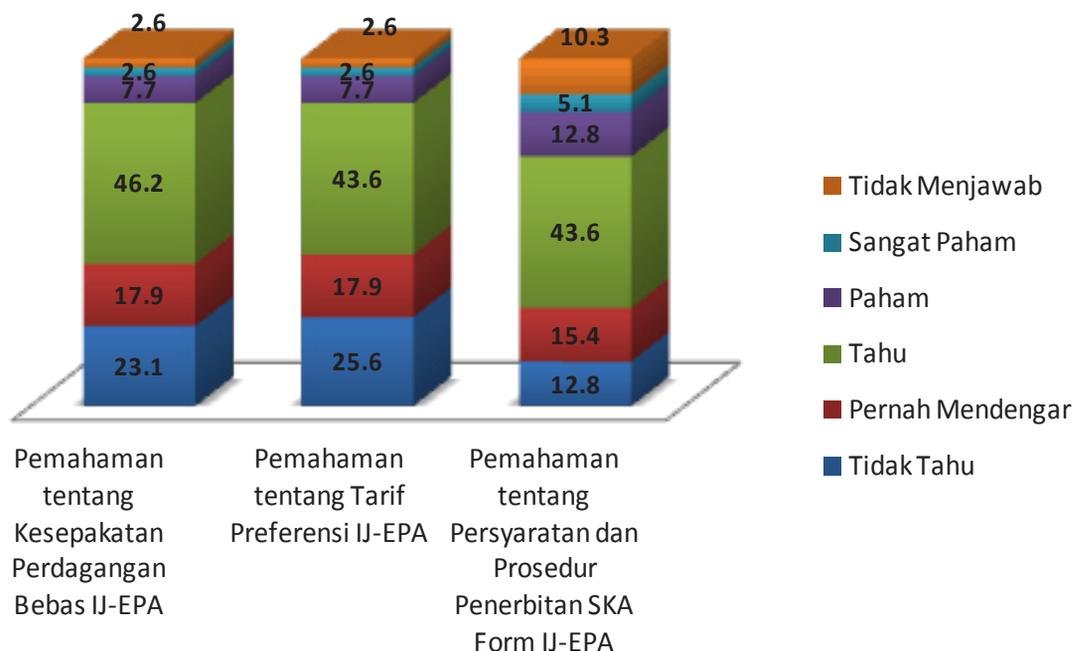
pada tahun 2010 dengan nilai sebesar 104,1%.

Berdasarkan hasil temuan lapangan di daerah sampel, hampir tiga perempat pelaku usaha yang bergerak di dalam industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya, industri Cokelat dan Kembang Gula, industri

Barang dari Plastik, industri Furnitur, dan industri Tekstil dan Produk Tekstil telah melakukan kegiatan ekspor ke Jepang selama lebih dari tiga tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa para responden tersebut telah melakukan ekspor ke Jepang jauh sebelum disepakatinya kesepakatan perdagangan bebas antara

Indonesia dengan Jepang melalui IJ-EPA yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Juli 2008. Sisanya adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor ke Jepang paska diberlakukannya IJ-EPA. Lebih dari setengah pelaku usaha yang diwawancarai telah mengetahui IJ-EPA sehingga sangat memahami kesepakatan tersebut, sedangkan sisanya hanya pernah mendengar dan tidak mengetahui tentang IJ-EPA. Dari segi pemahaman akan tarif preferensi IJ-EPA sebagaimana

diuraikan dalam Gambar 2, sebanyak 25,6% pelaku usaha tidak mengetahui tentang adanya tarif preferensi IJ-EPA dan pemanfaatannya. Ketidaktahuan tersebut disebabkan oleh ketidakpedulian para pelaku usaha sebagai eksportir akan manfaat tarif preferensi IJ-EPA. Manfaat keringanan tarif bea masuk preferensi IJ-EPA justru lebih banyak dinikmati oleh pihak pembeli atau importir dari Jepang.



Gambar 2. Pemahaman tentang Kesepakatan Perdagangan Bebas IJ-EPA, Tarif Preferensi IJ-EPA, dan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan SKA Form IJ-EPA

Sumber: Data Primer Kemendag (2011) diolah oleh Puska Daglu, BP2KP, Kemendag, 2011

Dari pelaku usaha yang menjadi responden sebanyak 23,1% tidak mengetahui tentang persyaratan dan prosedur penerbitan SKA Form IJ-EPA. Ketidaktahuan responden tersebut karena mereka menggunakan jasa

perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dalam penerbitan SKA Form IJ-EPA. Alasan lainnya adalah masih adanya importir dari Jepang yang menginginkan penggunaan SKA Form A dan tarif bea masuk untuk

produk tertentu yang telah 0% sebelum diimplementasikannya IJ-EPA. SKA Form A adalah surat keterangan asal non preferensi *Generalized System of Preferences* (GSP).¹

Penerbitan SKA Form IJ-EPA membutuhkan waktu satu hari kerja dari penerimaan berkas aplikasi penerbitan SKA Form IJ-EPA yang lengkap dengan biaya penggantian aplikasi SKA Form IJ-EPA sebesar Rp. 5.000,-. Namun dalam prakteknya, biaya penerbitan SKA Form IJ-EPA beragam di berbagai daerah survei. Gambar 2. menunjukkan bahwa hanya sebesar 25,6% dari total responden yang mengeluarkan biaya penerbitan SKA Form IJ-EPA sesuai dengan ketentuan resmi sebesar Rp.5.000,-. Sementara sekitar 23,1% dikenakan biaya penerbitan SKA Form IJ-EPA sebesar Rp. 5.001 – Rp. 50.000, Rp. 50.001-Rp. 70.000 (2,6%), dan biaya sesuai dengan ketentuan perusahaan EMKL (5,1%). Sekitar 43,6% dari total responden tidak bersedia menjawab mengenai pengenaan biaya penerbitan SKA Form IJ-EPA.

Secara keseluruhan, dalam proses penerbitan SKA Form IJ-EPA sekitar 64,1% dari pelaku usaha yang diwawancarai menghadapi berbagai kendala. Beberapa kendala utama yang dianggap menghambat dalam proses penerbitan SKA Form IJ-EPA, antara

lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di berbagai Instansi Penerbit SKA (IPSKA) (28,2%), keengganan pencantuman struktur biaya dalam SKA Form IJ-EPA (25,6%), dan pemilihan kode HS yang sesuai (23,1%), dan kurangnya sosialisasi mengenai fasilitas IJ-EPA (20,5%).

Keterbatasan SDM yang memiliki pemahaman tentang persyaratan dan prosedur penerbitan SKA Form IJ-EPA dan kompetensi dalam bidangnya menjadi suatu permasalahan tersendiri, baik bagi IPSKA yang telah melakukan otomasi secara online maupun IPSKA yang masih melakukan penerbitan SKA Form IJ-EPA secara manual (seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bitung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar). Sementara pencantuman struktur biaya dalam SKA Form IJ-EPA menjadi hambatan bagi sebagian pelaku usaha, karena dengan pencantuman struktur biaya akan berpengaruh terhadap pajak yang harus mereka bayarkan ke negara.

Pemilihan kode HS yang sesuai untuk dicantumkan dalam aplikasi SKA Form IJ-EPA juga membingungkan para pelaku usaha. Terkadang importir Jepang meminta para pelaku usaha

¹ GSP ini adalah kerjasama non preferensi antara negara-negara maju dengan negara berkembang, dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan devisa dan mempercepat industrialisasi dan pertumbuhan negara-negara berkembang, dengan memberikan dan membuka peluang untuk memasarkan barang-barang yang dihasilkannya, sehingga barang-barang tersebut dapat bersaing dipasaran negara-negara maju.

untuk mencantumkan kode HS nasional Jepang dalam aplikasi SKA Form IJ-EPA guna kepentingan tarif preferensi IJ-EPA. Adanya perbedaan dalam kode HS nasional Indonesia (10 digit) dengan kode HS nasional Jepang (9 digit) dan perbedaan dalam uraian barang tidak dapat secara langsung dikonversikan ke dalam HS nasional Jepang. Di samping itu, keterbatasan pengetahuan para responden dan petugas IPSKA menjadi penyebab lain dalam penentuan kode HS yang tepat. Untuk mengatasi permasalahan perbedaan kode HS dan pemilihan kode HS yang tepat, maka selama ini digunakan kode HS nasional Indonesia dalam aplikasi SKA Form IJ-EPA.

Minimnya sosialisasi mengenai fasilitas IJ-EPA dirasakan oleh 20,5% responden yang menganggap sebagai kendala dalam proses penerbitan SKA Form IJ-EPA di berbagai daerah. Hal ini terkait dengan masih adanya pelaku usaha yang tidak mengetahui keberadaan kesepakatan perdagangan bebas IJ-EPA, tarif preferensi IJ-EPA, dan persyaratan serta prosedur penerbitan SKA.

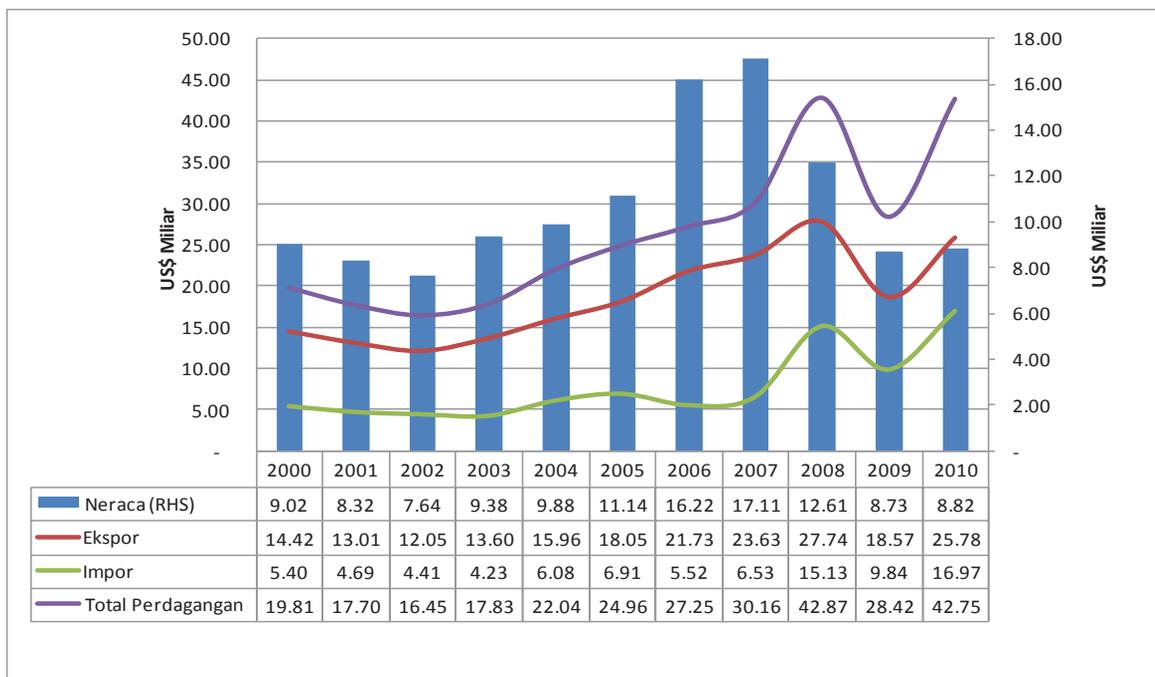
Dampak Implementasi Kesepakatan Perdagangan Bebas IJ-EPA terhadap Kinerja Perdagangan Indonesia dan Jepang

Pada periode 2001-2010, kinerja perdagangan Indonesia dan Jepang menunjukkan kecenderungan (*tren*) peningkatan dalam nilai per-

dagangannya. Dari Gambar 4 terlihat bahwa total perdagangan pada tahun 2001 yang hanya sebesar USD 17,7 miliar telah meningkat menjadi USD 42,75 miliar dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 12,99% per tahun. Persentase pertumbuhan perdagangan Indonesia-Jepang ini adalah dua % lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan perdagangan Jepang ke dunia.

Pada sisi neraca perdagangan, Indonesia selalu menikmati surplus perdagangan dengan Jepang yang nilainya bervariasi, meskipun Jepang selalu mencatatkan surplus dagangannya ke dunia. Pada periode 2001-2010, surplus perdagangan Indonesia dengan Jepang tertinggi dicatat pada tahun 2007 mencapai USD 17,11 miliar meskipun tren neraca perdagangan cenderung landai. Pada tahun 2006 terjadi lonjakan surplus perdagangan yang meningkat sebesar 45% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, naik dari USD 11,14 miliar pada tahun 2005 menjadi USD 16,22 miliar pada tahun 2006.

Berdasarkan pengelompokan golongan barang, neraca perdagangan migas Indonesia-Jepang cenderung menunjukkan peningkatan surplus selama kurun waktu 2004-2010 sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar 4. Surplus perdagangan migas tertinggi terjadi pada tahun 2008 dengan nilai sebesar USD 13,7 miliar. Sementara itu, neraca perdagangan non-migas Indonesia-Jepang tahun 2004-2010 cenderung

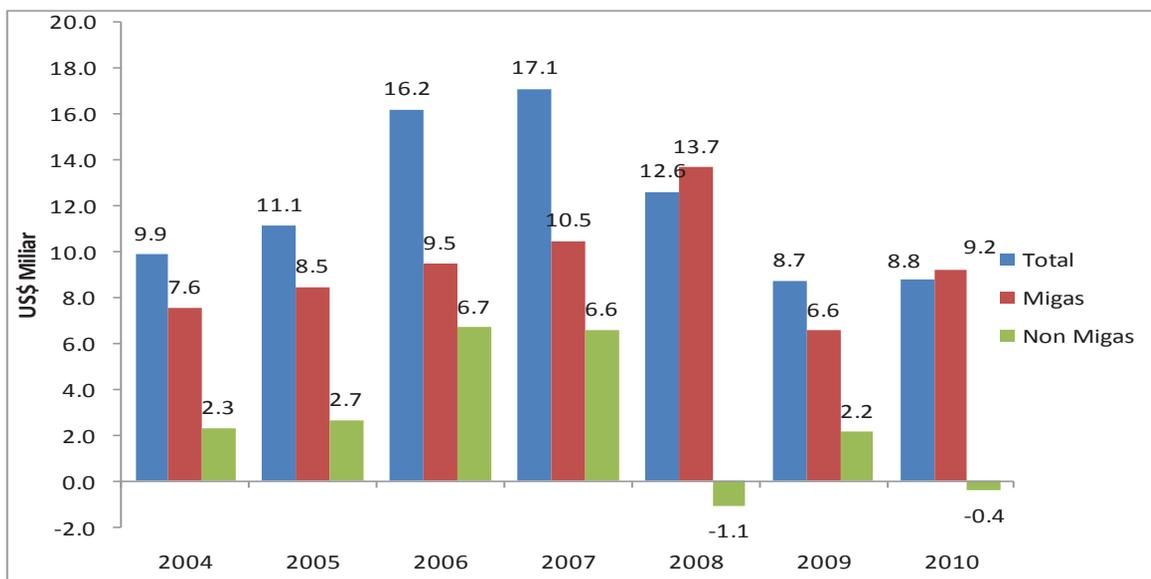


Gambar 3. Perdagangan Indonesia-Jepang Tahun 2001-2010

Sumber: World Bank (2011), diolah Puska Daglu, BP2KP 2011

fluktuatif, mengalami kenaikan dari tahun 2004 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2006. Kemudian terjadi penurunan hingga pada tahun 2008 mengalami

defisit perdagangan sebesar USD 1,1 miliar dan kembali mengalami surplus perdagangan pada tahun 2009 yang selanjutnya defisit pada tahun 2010.



Gambar 4. Neraca Perdagangan Migas dan Non-migas Indonesia-Jepang Tahun 2004-2010

Sumber: BPS (2011), diolah Puska Daglu, BPPKP, Kemendag, 2011

Ditinjau dari perkembangan perdagangan produk migas Indonesia dengan Jepang, ekspor Indonesia mendominasi hampir 100% dari total perdagangan migas dengan Jepang. Surplus perdagangan Indonesia untuk migas tertinggi selama periode 2004-2010 terjadi pada tahun 2008 dengan nilai sebesar USD 13,7 miliar.

Meskipun ekspor non-migas Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun selama periode 2004-2010, namun pada tahun 2008 dan 2010 nilainya tidak dapat mengimbangi impor non-migas Indonesia dari Jepang. Impor non-migas Indonesia dari Jepang pada tahun 2008 meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya sedangkan ekspornya hanya mampu tumbuh 5%.

Perkembangan Ekspor Indonesia ke Jepang

Rata-rata pertumbuhan ekspor Indonesia ke Jepang pada tahun 2001-2010 sebesar 7,85% per tahun. Meskipun imbas krisis keuangan global pada pertengahan tahun 2008 menurunkan ekspor secara dramatis di tahun 2009 dengan nilai sebesar USD 9,17 Miliar (33%). Pada tahun 2010 ekspor Indonesia mengalami pemulihan meskipun tidak sebesar nilai ekspor sebelum krisis global terjadi, di mana ekspor Indonesia ke Jepang naik sebesar 38% (USD 7,21 Miliar). Selama periode 2001-2010 pertumbuhan ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 38% yang menunjukkan pemulihan akibat krisis

keuangan global (World Bank, 2011, diolah Puska Daglu, BP2KP, 2011).

Komposisi ekspor produk migas dan non-migas Indonesia ke Jepang memiliki komposisi yang hampir berimbang sepanjang tahun 2004-2010. Rata-rata ekspor Indonesia ke Jepang pada periode 2005-2010, terdiri dari 56% produk non-migas (USD 12,2 miliar) dan 44% produk migas (USD 9,4 miliar). Rata-rata pertumbuhan ekspor non-migas selama tahun 2005-2010 cukup bervariasi, dengan nilai sebesar 13,15% per tahunnya. Sementara, rata-rata pertumbuhan ekspor migas Indonesia ke Jepang periode 2005-2010 sebesar 9,21% per tahun.

Kenaikan ekspor migas Indonesia ke Jepang lebih disebabkan oleh kenaikan harga migas di pasar dunia, di mana volume ekspor Indonesia memiliki tren menurun. Ekspor produk migas Indonesia didominasi oleh ekspor gas terutama (hampir 100% adalah *Liquid Natural Gas* (LNG)) dengan rata-rata pangsa ekspor gas Indonesia ke Jepang mencapai 60 % dari total ekspor produk migas Indonesia ke Jepang.

Berdasarkan sektor, ekspor produk non-migas Indonesia ke Jepang didominasi oleh ekspor produk industri. Pada tahun 2005-2010 rata-rata pangsa ekspor produk industri sebesar 68,38% dari total ekspor non-migas, tetapi secara umum pangsa produk industri cenderung menurun diikuti dengan pertumbuhan ekspor dari sektor tambang.

Adapun produk industri Indonesia yang paling banyak diekspor ke Jepang pada tahun 2010, antara lain Mate Nikel, TSNR 20, produk Tembaga yang sudah dimurnikan, Plywood, produk Alumunium, Printer-copier, Wiring Harness untuk Kendaraan Bermotor, Kertas tanpa Serat, Ban untuk Kendaraan Bermotor, Pelek dan Penutup untuk Otomotif, Produk Perabotan Kayu Lainnya (Furnitur) dan Sak dan Kantong (termasuk cone) dari Polimer Etilena (Barang dari Plastik).

Berdasarkan data BPS (2011), ekspor produk hasil pertanian tertinggi ke Jepang tertinggi pada tahun 2010 berasal dari produk Udang Kecil dan Udang Biasa, yaitu sebesar USD 303 juta. Ekspor tersebut merupakan 68% dari total ekspor hasil pertanian Indonesia. Selain itu, ekspor hasil laut seperti Ikan Tuna, Skip Jack, Sardines, Teripang, Mutiara Alam, Rumput Laut, juga merupakan porsi yang penting dalam menyusun ekspor produk pertanian ke Jepang.

Untuk ekspor produk pertambangan menunjukkan tren peningkatan, akibat dari peningkatan harga komoditas tambang di dunia dan peningkatan volume ekspor. Ekspor hasil tambang Indonesia ke Jepang antara lain Bijih Tembaga dan Konsentratnya (49%), Batubara untuk bahan bakar (24%), Batubara lainnya (23%), Bijih Nikel (1,7%) dan Batubara Antrasit (0.14%). Ekspor produk tambang ke Jepang sangat terkonsentrasi pada Mineral

Tembaga, Nikel dan Batubara, di mana produk-produk tersebut merupakan bahan baku untuk industri Metalurgi di Jepang.

Perkembangan Impor Indonesia dari Jepang

Pada periode 2001-2010 rata-rata impor Indonesia naik sebesar 20,1% per tahun, meskipun pada tahun 2000-2003 impor Indonesia dari Jepang menunjukkan penurunan nilai impor. Pertumbuhan impor Indonesia dalam satu dekade tersebut cenderung fluktuatif. Pada tahun 2008 Indonesia mencatat lonjakan impor dari Jepang, di mana impor Indonesia tumbuh sebesar 131% (USD 8,6 Miliar) dibandingkan dengan tahun 2007 (*World Bank*, 2011 diolah Puska Daglu, BP2KP, 2011).

Lebih dari 99 % impor Indonesia dari Jepang merupakan produk non-migas. Pada tahun 2004-2010 impor non-migas Indonesia dari Jepang tumbuh secara fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 30% per tahunnya. Mayoritas impor migas Indonesia dari Jepang sepanjang periode 2006-2010 adalah hasil minyak bumi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,23%.

Impor non-migas Indonesia dari Jepang hampir 100 % didominasi oleh produk industri dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 30,6% selama periode 2006-2010 dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 128,8%. Peningkatan impor produk industri pada tahun tersebut disumbang

oleh kenaikan impor produk Tali Sepatu Boot, Pipa Bor Belum Jadi (*green pipe*) dengan yield strength < 75.000 Psi dan Ujungnya Belum Dikerjakan, Bagian dari Motor > 1,5 kW tapi tidak lebih dari 75 kW, Bagian Dari Decoder, dan Display Panel Datar (termasuk Luminescence, Plasma, dan Teknologi Lainnya (HS 10 digit).

Pada tahun 2010 sebagian impor produk industri Indonesia dari Jepang merupakan produk Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Terbongkar Tidak Lengkap (*incompletely knocked down*, IKD) dari pos 8704 dengan 5 ton < Massa Total <=24 ton, Damper dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya dengan massa total > 24 ton: Lain-lain, Sekop mekanik, ekskavator dan shovel loader: Mesin yang berputar 360° diatas bangunan, Kendaraan Bermotor Selain Sedan dengan Sistem Gardan Tunggal (4 x 2) IKD, dan Keadaan Terbongkar Tidak Lengkap (*incompletely knocked down*, IKD) dengan Massa Total > 24 ton (HS 10 Digit).

Pola Ekspor dan Impor Indonesia-Jepang Pasca Implementasi Kesepakatan Perdagangan Bebas IJ-EPA

Dari sisi Jepang, penerapan kesepakatan perdagangan bebas IJ-EPA menyebabkan perubahan pola ekspor Jepang ke Indonesia (impor Indonesia dari Jepang). Sebelum dilaksanakannya kesepakatan perdagangan bebas IJ-EPA, ekspor utama Jepang ke Indonesia berupa Bagian dan Aksesoris Kendaraan

Bermotor pos tarif 87.01 hingga 87.05, Bagian yang Cocok untuk Penggunaan Terpisah atau dengan Mesin pos tarif 84.07 atau 84.08, Sirkuit Terpadu Elektronik dan Microassemblies: Digital, dan Mobil dan Kendaraan Bermotor Lainnya terutama Dirancang untuk Pengangkutan Orang (selain yang dimaksud pos 87.02) termasuk Station Wagon dan Mobil Balap dengan Kapasitas Silinder > 1.500 cc. Pasca implementasi IJ-EPA beberapa produk Jepang mengalami peningkatan ekspor ke Indonesia. Adapun produk-produk yang melonjak dalam ekspor Jepang ke Indonesia, yakni Produk-produk yang Tidak Terspesifikasi, Kendaraan Bermotor untuk Pengangkutan Barang di luar pos tarif 8704.10 dengan CI Mesin Piston Pembakaran Internal (Diesel/Semi Diesel) Massa Total > 20 ton, Gear Box dan Bagiannya dari Kendaraan Bermotor dari pos tarif 87.01-87.05, Bagian yang Cocok untuk Digunakan Tersendiri/ Terutama dengan Mesin dari pos tarif 84.26/84.29/84.30 (di luar pos tarif 8431.41-8431.43), dan Sirkuit Terpadu Elektronik Lainnya selain Pengeras Suara/Memori/Prosesor dan Kontroler.

Khusus produk yang tergolong ke dalam kategori industri manufaktur berdasarkan ISIC Revision 3 dengan HS 6 digit, pada tahun 2007 ekspor Jepang ke Indonesia didominasi oleh produk Kendaraan Bermotor untuk Pengangkutan Barang di luar pos tarif 8704.10 dengan CI Mesin Piston Pembakaran Internal (Diesel/Semi

Diesel) Massa Total > 20 ton, Dumpers yang dirancang untuk Penggunaan Jalan Tol, Mesin dengan Suprastruktur Bergulir 360°, Gear Box dan Bagiannya dari Kendaraan Bermotor dari pos tarif 87.01-87.05, dan Bagian dan Aksesoris Kendaraan Bermotor pos tarif 87.01 hingga 87.05. Produk-produk tersebut merupakan kebutuhan industri kendaraan bermotor (otomotif) dan industri mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi dalam negeri.

Setelah IJ-EPA diterapkan, ekspor produk industri manufaktur Jepang ke Indonesia tidak menunjukkan perubahan pola. Produk-produk industri manufaktur yang mendominasi ekspor Jepang ke Indonesia masih tetap sama. Produk-produk yang dihasilkan oleh industri besi dan baja; industri kendaraan bermotor; industri bagian dan aksesoris kendaraan bermotor dan mesinnya; industri untuk mesin pertambangan, penggalian, dan konstruksi; dan industri logam dasar bukan besi adalah mayoritas ekspor Jepang ke Indonesia setelah diterapkannya IJ-EPA.

Berdasarkan komposisi, impor Jepang dari Indonesia (ekspor Indonesia ke Jepang) baik sebelum maupun sesudah diterapkannya IJ-EPA tidak menunjukkan perubahan pola. Impor Jepang dari Indonesia masih tetap didominasi oleh produk Natural Gas, *Liquefied* (HS 2711.11), *Copper Ores & Concentrates* (HS 2603.00), dan *Bituminous Coal, Whether /Not Pulverised* (HS 2701.12).

Komposisi impor produk industri manufaktur Jepang dari Indonesia tidak menunjukkan suatu pola perubahan, di mana hal ini sama halnya yang terjadi pada impor utama Jepang dari Indonesia secara umum. Produk-produk industri manufaktur yang diimpor Jepang dari Indonesia berasal dari industri logam dasar bukan besi; industri pengolahan minyak bumi; industri lembaran veneer, produsen kayu lapis, laminboard, partikel papan dan panel lainnya; dan industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya.

Dari sisi Indonesia, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa ekspor produk industri manufaktur Indonesia ke Jepang tidak menunjukkan perubahan pola ekspor baik sebelum maupun sesudah IJ-EPA diterapkan. Sebagian besar ekspor produk industri manufaktur Indonesia ke Jepang berupa *Mate Nikel*, *Technically Specified Natural Rubber* (TSNR), Tembaga yang sudah dimurnikan, *Plywood*, Aluminium bukan paduan, dan Mesin Cetak *Offset* yang diproduksi oleh industri logam dasar bukan besi; industri pengolahan minyak bumi; industri lembaran veneer, produsen kayu lapis, laminboard, partikel papan dan panel lainnya; dan industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya. Pangsa terbesar impor produk industri manufaktur Indonesia dari Jepang merupakan produk-produk industri kendaraan bermotor dan alat berat. Beberapa produk yang dihasilkan oleh industri komponen kendaraan bermotor

dan industri besi-baja Jepang mengalami peningkatan yang cukup tajam dalam impor Indonesia dari Jepang.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pemanfaatan Surat Keterangan Asal (SKA) Form IJ-EPA sebagai salah satu kelengkapan dokumen mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2008-2010. Produk plastik dan barang plastik, ikan dan udang, dan kayu adalah beberapa produk yang dominan dalam pemanfaatan SKA Form IJ-EPA.

Pemanfaatan SKA Form IJ-EPA di beberapa daerah telah menunjukkan kinerja yang optimal, namun juga ada beberapa daerah lainnya yang kinerjanya tidak optimal. Ketidakefektifan yang terjadi dikarenakan masih adanya penggunaan Form A dalam ekspor ke Jepang. Prosedur dan jangka waktu penerbitan SKA Form IJ-EPA, baik di IPSKA yang telah otomatisasi maupun sedang dalam proses otomatisasi, telah seragam. Namun, tidak demikian halnya dalam biaya penerbitan SKA Form IJ-EPA yang masih beragam di beberapa daerah. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh para eksportir dalam proses penerbitan SKA Form IJ-EPA, antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di berbagai IPSKA, keengganan pencantuman struktur biaya dalam SKA Form IJ-EPA, pemilihan kode HS yang sesuai, dan kurangnya sosialisasi mengenai fasilitas IJ-EPA. Dari segi perdagangan bilateral, kesepakatan

perdagangan bebas IJ-EPA berdampak pada perubahan pola impor Indonesia dari Jepang dimana terdapat beberapa produk yang mengalami lonjakan yang signifikan, sebagai contoh adalah produk Kendaraan Bermotor untuk Pengangkutan Barang di luar pos tarif 8704.10 dengan CI Mesin Piston Pembakaran Internal (Diesel/Semi Diesel) Massa Total > 20 ton. Dari segi ekspor, implementasi IJ-EPA tidak memiliki dampak terhadap perubahan pola ekspor Indonesia ke Jepang.

Sosialisasi, seminar, penyebaran brosur dan pamflet, dan publikasi melalui link tertentu dalam situs website instansi-instansi yang terkait untuk mengedukasi dan menyebarluaskan informasi yang terintegrasi tentang IJ-EPA, prosedur penerbitan SKA Form IJ-EPA dan tarif preferensi IJ-EPA merupakan metode penyebarluasan informasi yang dapat dilaksanakann guna meningkatkan efektivitas pemanfaatan SKA dan tarif preferensi. Di samping itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas fasilitas infrastruktur yang memadai di berbagai instansi penerbit SKA guna mendukung proses penerbitan SKA sangat diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2011). *Data Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Jepang di Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Data Ekspor dan Impor periode 2001-2010*.

- Bank Indonesia. (2008). *Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*. Editor: Arifin, Sjamsul; Djaafara, Rizal A; Budiman, Aida S. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Dermoredjo, SK., Wahida, Hutabarat, dan Budiman. (2007). *Analisis Dampak Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju terhadap Produksi Pertanian Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional "Dinamika Pembangunan Pertanian dan Pedesaan: Mencari Alternatif Arah Pengembangan Ekonomi Rakyat" 2007. Penyunting: Kedi Suradisastra, Yusmichad Yusdja, Budiman Hutabarat. Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian.
- Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. (2010). *Rules of Origin (ROO) dan Certificate of Origin (COO) Dalam Rangka FTA yang Dikuti oleh Indonesia*.
- Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. (2010). *Kebijakan Umum Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)*.
- Haryadi, O., Mangara Tambunan, dan Achسانی, Noer Azam. (2008). *Dampak Penghapusan Hambatan Perdagangan Sektor Pertanian terhadap Kinerja Ekonomi Negara Maju dan Berkembang*. Makalah disampaikan dalam Seminar Sekolah Pascasarjana IPB. Diunduh tanggal 27 April 2011 dari <http://haryadikamal.wordpress.com/2010/07/23/dampak-penghapusan-hambatan-perdagangan-sektor-pertanian-terhadap-kinerja-ekonomi-negara-maju-dan-berkembang/>
- Lindert, PH and Kindleberger, Charles P. (1986). *International Economics*, 8th Edition. Homewood, IL: RD Irwin.
- Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, BPPKP Kementerian Perdagangan. (2011). *Kajian Dampak Kesepakatan Perdagangan Bebas Terhadap Daya Saing Produk Manufaktur Indonesia*.
- Urata, S. dan Kiyota, Kozo. (2005). The Impacts of an East Asia FTA on Foreign Trade in East Asia. *International Trade in East Asia, NBER-East Asia Seminar on Economics* (Conference September 5-7), 2003, Volume 14. Editors: Ito, Takatoshi., and Rose, Andrew K. Chicago: University of Chicago Press. Diunduh tanggal 20 Mei 2011 dari <http://www.nber.org/chapters/c0195>.
- Takahashi, K dan Urata, Shujiro. (2010). On The Use of FTAs by Japanese Firms: *Further Evidence*. *Business and Politics* 12 (1). doi:10.2202/1469--3569.1310. Diunduh tanggal 5 mei 2011 dari <http://www.uq.edu.au/isaasiapacific/content/MarkManger2-3.pdf>.
- World Bank. (2011). *World Integrated Trade System (WITS)*. Diunduh tanggal 6 April 2011 dari <https://wits.worldbank.org/WITS/WITS/>.

ANALISIS FAKTOR DAN PROYEKSI KONSUMSI PANGAN NASIONAL: KASUS PADA KOMODITAS: BERAS, KEDELAI DAN DAGING SAPI

The Analyses of Factors and Projection of National Food Consumption: The Cases of Rice, Soybean, and Beef

Yudha Hadian Nur, Yati Nuryati, Ranni Resnia, A.Sigit Santoso

Peneliti pada Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan,
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta

yudha_hn@yahoo.com, y_nuryati@yahoo.com,
ranni_resnia@yahoo.com, sigit_yoi@yahoo.com.

Naskah diterima : 27 Januari 2012

Disetujui diterbitkan : 15 Juni 2012

Abstrak

Ketahanan pangan merupakan isu yang selalu menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Hal ini terbukti dengan tingginya intensitas kebijakan pada pasar bahan pangan pokok. Studi ini bertujuan: 1) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi beras, kedelai dan daging sapi secara nasional; 2) mengestimasi elastisitas permintaan dan penawaran beras, kedelai, dan daging sapi; 3) mengestimasi konsumsi beras, kedelai, dan daging sapi untuk periode 2011 – 2013; 4) merekomendasikan kebijakan terkait produksi dan konsumsi beras, kedelai dan daging sapi. Analisis ini menggunakan metode OLS untuk mengestimasi elastisitas penawaran dan permintaan, serta LA/AIDS model untuk mengestimasi konsumsi komoditi tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsumsi beras dan kedelai inelastis terhadap harga, sedangkan konsumsi daging sapi elastis terhadap harga daging sapi itu sendiri. Analisis proyeksi konsumsi menunjukkan bahwa konsumsi beras, kedelai dan daging sapi diperkirakan akan meningkat 2,2 %, 0,8%, dan 4% per tahun. Perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan upaya stabilisasi pasokan dan harga untuk menjamin keterjangkauan konsumsi pangan.

Kata kunci : Bahan Pangan, Estimasi Konsumsi, Model Ekonometrika

Abstract

Food security has always been an imperative issue for any ruling Indonesian government. Highly-regulated staple foods market indicates their strategic roles in the Indonesian economy. The objectives of this paper are 1) to identify factors affecting the level of national consumption on rice, soybeans and beef; 2) to estimate supply and demand elasticity of rice, soybeans and beef; 3) to project the consumption of rice, soybeans and beef for 2011-2013; 4) to formulate a policy recommendation to sustain production and consumption of rice, soybeans and beef. This paper uses Ordinary Least Square (OLS) method to estimate supply and demand elasticity and Linear Approximation from Almost Ideal Demand System (LA/AIDS) method to estimate the consumption of respective food commodities. The result shows that consumption of rice and soybeans are inelastic to their own prices while the consumption of beef is elastic to its own price. Consumption projection of the commodities shows that by 2013, consumption of rice, soybeans and beef will increase annually by 2.2%, 0.8% and 4%, respectively. It is necessary to issue the policies to increase production, productivity, and to have the stability of supply and price of respective commodities.

Keywords : Food Product, Estimate Consumption, Econometric Model

JEL Classification : Q18, C01

PENDAHULUAN

Lonjakan harga pangan dunia menjadi isu hangat, baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. FAO menduga akan adanya lonjakan harga pangan dunia yang didasarkan pada fenomena tingginya indeks pangan dunia pada bulan Agustus 2010 yang meningkat sejak November 2009 (*Business News*, September 2010). Faktor yang menjadi pemicu ini utamanya adalah kegagalan panen gandum dan barley di Rusia akibat musim kering dan terus berlanjut dengan meningkatnya harga pangan lain seperti beras dan kedelai.

Beras merupakan komoditas strategis bagi banyak negara, khususnya di kawasan Asia. Produksi beras dunia pada tahun 2011 meningkat sebesar 2,3% dibandingkan dengan tahun 2010 dari 450,4 juta ton pada 2010 menjadi 460,8 juta ton pada 2011. Meski demikian seiring dengan pertumbuhan penduduk dunia serta pesatnya pertumbuhan ekonomi beberapa negara terutama China dan India, tingkat konsumsi beras dunia meningkat sebesar 2,4%, dari 447,4 juta ton pada 2010 menjadi 458,1 juta ton pada 2011, dan meningkat 4,6% dibandingkan dengan tahun 2009.

Estimasi tahun 2012, produksi beras dunia meningkat sebesar 2,54% dari 460,8 juta ton pada 2011 menjadi 472,5 juta ton pada 2012. Hal tersebut juga terjadi pada estimasi angka konsumsi beras dunia tahun 2012 yang juga mengalami kenaikan sebesar 2,53% dari 458,1 juta ton pada 2011 menjadi 469,7

juta ton pada tahun 2012. Peningkatan penduduk dan bertambahnya kelompok masyarakat kelas menengah yang diikuti oleh peningkatan daya beli akan mendorong peningkatan konsumsi pangan. Krisis pangan yang dikhawatirkan akan terjadi tidak hanya karena faktor iklim yang tidak bersahabat, tetapi juga terkait krisis energi, pemanfaatan pangan untuk energi, krisis politik di sejumlah negara, krisis ekonomi dan moneter dunia, laju kerusakan lingkungan yang terus meningkat, serta pertumbuhan ekonomi yang mendorong tambahan penggunaan lahan untuk industri dan pemukiman.

Keadaan tersebut menjadikan ketahanan pangan merupakan salah satu bidang yang selalu menjadi prioritas pembangunan dalam pemerintahan saat ini. Ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan nasional (Suryana, 2001; Simatupang et.al, 2001). Kejadian rawan pangan dan gizi buruk mempunyai makna politis yang negatif bagi penguasa. Bahkan di beberapa negara berkembang krisis pangan dapat menjatuhkan pemerintahan yang sedang berkuasa (Hardinsyah et.al, 1999).

Pengembangan komoditas pertanian memerlukan pemahaman tentang prospek pasar, kemampuan sumberdaya dan potensi teknologi. Ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan akan mempengaruhi harga dan profitabilitas, sehingga memerlukan kebijakan

intervensi dan perencanaan untuk menghadapi keadaan tersebut.

Proyeksi permintaan ataupun penawaran sangat penting bagi perencanaan produksi yang akan berdampak pada berapa besar tingkat pasokan untuk menjaga stabilitas harga. Hasil proyeksi permintaan komoditas pangan berguna sebagai salah satu bahan masukan dalam menentukan target produksi komoditas pangan, berapa besar yang dibutuhkan serta gambaran perkembangan harga kedepan. Sementara itu proyeksi penawaran komoditas pangan berguna sebagai gambaran tingkat produksi komoditas pertanian bersangkutan yang dapat dicapai berdasarkan asumsi-asumsi yang digunakan. Dengan membandingkan hasil proyeksi permintaan dan penawaran dapat diketahui status neraca permintaan dan penawaran komoditas bersangkutan apakah dalam keadaan surplus atau defisit. Dalam jangka pendek dan menengah kondisi ini akan terkait dengan arus distribusi komoditi pangan yang berdampak pada stabilitas harga.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan yang berperan dalam pemberian fasilitas dalam hal produksi dan kelancaran pasokan guna menjaga stabilitas harga pangan di dalam negeri harus cermat dalam menjaga keseimbangan tersebut. Ketidakseimbangan antara produksi dan permintaan mempengaruhi harga dan keuntungan yang diterima petani, hal ini

memerlukan intervensi dan perencanaan yang memadai untuk mengatasi situasi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, proyeksi di sisi permintaan dan penawaran menjadi sangat relevan sebagai bahan masukan untuk membuat kebijakan intervensi. Tren proyeksi penduduk Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia akan menjadi negara yang berpenduduk sangat padat pada beberapa dekade mendatang. Prospek permintaan dan penawaran komoditas pangan menjadi indikator penting dalam mempertimbangan ketahanan pangan masyarakat Indonesia. Proyeksi perlu didasarkan pada pertumbuhan penduduk, pendapatan, perubahan harga, elastisitas, area dan tingkat produktifitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka tulisan ini secara umum bertujuan melakukan proyeksi konsumsi terhadap pangan nasional dalam jangka pendek (2011-2013). Secara rinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi komoditas Beras, Kedelai dan Daging Sapi;
2. Melakukan proyeksi konsumsi terhadap masing-masing komoditas tersebut untuk tahun 2011-2013.
3. Merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan hasil tujuan butir (2) dalam menjaga keberlanjutan pasokan dalam rangka ketahanan pangan dan stabilisasi harga.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai proyeksi permintaan dan penawaran beras di Indonesia telah dilakukan sejak awal 1990an, antara lain oleh Sudaryanto et al (1992), Mulyana (1998), dan Sudaryanto et al (2002). Penelitian Sudaryanto et al (1992) untuk mengestimasi proyeksi permintaan dan penawaran beras menggunakan pendekatan *trend*. Proyeksi tersebut menghasilkan estimasi pertumbuhan sebesar 1.64% per tahun. Produksi beras diestimasi meningkat dari 27,11 juta ton pada tahun 1995 menjadi 29,40 juta ton di tahun 2000 dan 31,89 juta ton pada tahun 2005. Sedangkan konsumsi diproyeksikan meningkat dari 30,19 juta ton pada tahun 1995 menjadi 32,67 juta ton pada tahun 2000 dan 36,25 juta ton pada tahun 2005. Dengan demikian diperkirakan terjadi defisit antara produksi dan konsumsi beras dari tahun ke tahun. Sementara itu, Mulyana (1998) menggunakan metode yang berbeda untuk melakukan proyeksi produksi dan konsumsi. Peneliti menggunakan elastisitas yang telah dihasilkan oleh penelitian sebelumnya berdasarkan model Nerlove. Hasil penelitian ini juga menunjukkan peningkatan produksi dan konsumsi beras. Penawaran beras diproyeksikan meningkat dari 26,92 juta ton di 1998 menjadi 27,83 juta ton di tahun 2000 dan 29,91 juta ton di 2005.

Kemudian, Sudaryanto et al (2002) kembali melakukan proyeksi penawaran dan permintaan beras. Berdasarkan hasil penelitian CASER (*Center for*

Agro and Socio-Economic Research) (2000), hasil panen diestimasi akan meningkat sebesar 0,24% sampai 0,27% per tahun jika ditanam di lahan basah. Dengan kata lain, keseluruhan produksi padi akan meningkat sebesar 0,22% per tahun. Defisit produksi terhadap konsumsi diproyeksikan akan terus berlanjut karena permintaan akan beras juga meningkat sebesar 1,16% per tahunnya dari tahun 1998 sampai 2010. Selanjutnya, konsumsi per kapita diproyeksikan akan turun dari 156 kg per tahun pada 1998 menjadi 155,2 kg pada 2010, atau sekitar -0,04% per tahunnya. Dari hasil penelitian ini, Indonesia diperkirakan akan mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan domestik hingga 5,2 juta ton di tahun 2005 dan 6,3 juta ton di tahun 2010.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Pelaku utama dalam pembangunan pertanian adalah petani yang mengusahakan komoditas pertanian tertentu. Petani memiliki posisi penting sebagai salah satu subjek pelaku ekonomi dalam tatanan lokal, regional bahkan nasional. Hal yang penting diharapkan petani untuk keberlanjutan usaha adalah kepastian harga. Agar usaha pertanian yang dijalankannya mampu memberikan pendapatan yang layak dan berkesinambungan, maka komoditas yang diusahakan selayaknya adalah komoditas yang prospektif di pasar domestik dan di pasar internasional.

Mengacu pada hal tersebut, komoditas dapat dikembangkan secara efisien sesuai dengan sumberdaya alam dan perkembangan teknologi yang dimiliki.

Analisis penawaran dan permintaan dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan trend dan ekonometrik. Dalam penulisan ini akan difokuskan pada pendekatan ekonometrik. Dengan pendekatan ekonometrik, parameter hasil dugaan merupakan dasar untuk melakukan proyeksi.

Sesuai dengan tujuan penulisan yaitu melakukan proyeksi terhadap konsumsi pangan, namun secara tidak langsung aspek penawaran dan permintaan perlu diuraikan terlebih dahulu untuk mengarah pada besarnya tingkat kebutuhan.

Sebelum peubah digunakan dalam model maka dilakukan uji unit root (Stabilitas dan Stasionaritas). Selanjutnya untuk mengetahui apakah peubah-peubah yang digunakan dalam persamaan mempunyai keterkaitan (kointegrasi), maka dilakukan uji kointegrasi antara kedua peubah tersebut. Uji kointegrasi dapat dilakukan antara lain dengan metode Engle-Granger dan Johansen yang mana Engle-Granger (1987), mengajukan prosedur untuk pengujian kointegrasi antar beberapa peubah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa diantara variabel tidak ada kointegrasi.

● Model Permintaan

Permintaan diduga dengan model linear approximation dari AIDS (LA/

AIDS). Deaton dan Muellbauer (1980) menyatakan bahwa model LA/AIDS mempunyai beberapa keunggulan, yaitu : (1) Memberikan aproksimasi orde pertama terhadap sistem permintaan manapun; (2) Memenuhi aksioma pilihan secara tepat; (3) Mengagregasi konsumen secara sempurna; (4) Mempunyai bentuk persamaan yang konsisten dengan data anggaran rumah tangga; (5) Sederhana dalam pendugaan (dalam bentuk aproksimasi liniernya); dan (6) Dapat digunakan untuk menguji kendala homogenitas dan simetri.

$$w_i = \alpha_i^* + \sum_{j=1}^k \gamma_{ij} \ln P_j + \beta_i \ln(X / P^*)$$

dimana: $P^* = \sum w_k \ln P_k$)

Rumus yang digunakan untuk menghitung elastisitas permintaan dari model LA/AIDS dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penggunaan pendugaan LA/AIDS menghasilkan pilihan rasional konsumen yang tidak konsisten (La France, 2004). Sedangkan pendekatan yang digunakan oleh Green dan Alston (1990) relatif rumit dalam pelaksanaannya karena elastisitas permintaan komoditas tertentu diekspresikan sebagai elastisitas sendiri dan elastisitas komoditas lainnya. Elastisitas permintaan tidak terkompensasi dari LA/AIDS (ϵ_{ij}) didefinisikan sebagai berikut :

$$\varepsilon_{ij} = \frac{d \ln q_i}{d \ln p_j} = -\delta_{ij} + \frac{d \ln w_i}{d \ln p} = -\delta_{ij} + \left\{ \gamma_{ij} - \beta_i \frac{d \ln P^*}{d \ln P_j} \right\} / w_i$$

Elastisitas ini menunjukkan alokasi di dalam kelompok komoditas, dimana total pengeluaran kelompok tersebut (x) dan semua harga lain (pk, k ≠ j) dianggap konstan. δ_{ij} adalah delta Kronecker ($\delta_{ij} = 1$ untuk i = j; $\delta_{ij} = 0$ untuk i ≠ j). Untuk memperoleh rumus yang benar untuk LA/AIDS, perlu dilakukan pendiferensiasian indeks harga Stone terhadap harga komoditas ke-j, yang memperoleh :

$$\frac{d \ln P^*}{d \ln P_j} = w_j + \sum w_k \ln p_k \frac{d \ln w_k}{d \ln P_j}$$

Chalfant (1987) mengasumsikan bahwa pangsa pengeluaran adalah konstan sehingga:

$$\frac{d \ln P^*}{d \ln P_j} = w_j$$

Elastisitas harga menjadi :

$$\varepsilon_{ij} = -\delta_{ij} + (\gamma_{ij} - \beta_i w_j) / w_i$$

Dengan demikian elastisitas harga sendiri (i = j) menjadi :

$$\varepsilon_{ij} = (\gamma_{ij} - \beta_i w_j) / w_i - 1$$

Elastisitas harga silang (i ≠ j) menjadi :

$$\varepsilon_{ij} = (\gamma_{ij} - \beta_i w_j) / w_i$$

Elastisitas pendapatan menjadi:

$$\varepsilon_{ij} = 1 + \beta_i / w_i$$

Model LA/AIDS tersebut diformulasikan sebagai berikut :

$$\ln w_i = \alpha_0 + \sum_j \gamma_{ij} \ln P_j + \beta_i \ln(\gamma^F / P^*) + \delta_i \ln Z$$

dimana:

i, j = 1, 2, 3,, n kelompok komoditas

w_i = Pangsa pengeluaran komoditas ke i

P^* = Indeks harga stone, dimana $\ln P^* = \sum w_i \ln P_i$

γ^F = Total Pengeluaran untuk pangan

Z = Ukuran rumah tangga

P_j = Harga komoditi ke j

$\alpha, \beta, \gamma, \delta$ = Parameter regresi

- **Proyeksi Permintaan Langsung** langsung ini dipergunakan persamaan (9) sebagai berikut:
 Untuk melakukan proyeksi permintaan (9) sebagai berikut:
 produk pangan yang dikonsumsi secara

$$q_{dit} = q_{di0} * [1 + (E_{iy0} \cdot (1 + g_{Eiy})^t \cdot dY)]$$

dimana :

- q_d = Konsumsi per kapita
- E_{iy0} = Elastisitas pendapatan pada tahun dasar
- g_{Eiy} = Pertumbuhan elastisitas pendapatan
- dY = Pertumbuhan tingkat pendapatan riil per kapita per tahun
- i = Komoditas yang dianalisis
- t = Tahun proyeksi
- t_0 = Tahun dasar.

$$Q_{it} = q_{dit} \cdot N_t$$

dimana :

- Q_{it} = Jumlah permintaan total pada tahun t
- N_t = Jumlah penduduk pada tahun t

Model tersebut pada hakekatnya adalah model proyeksi dengan menggunakan konsumsi per kapita pada tahun dasar. Perkembangan konsumsi per kapita ditentukan oleh pertumbuhan tingkat konsumsi karena meningkatnya pendapatan per kapita. Beberapa parameter lain yang diperlukan dalam model proyeksi adalah: (1) Konsumsi per kapita pada tahun dasar; (2) Elastisitas pendapatan pada tahun dasar, E_{iy0} ; (3) Pertumbuhan elastisitas pendapatan, g_{Eiy} ; (4) Pertumbuhan pendapatan per kapita, dY_t ; dan (4) Pertumbuhan jumlah penduduk nasional. Parameter-parameter tersebut dapat ditentukan di luar model, yaitu dari data sekunder atau diperlakukan sebagai peubah instrumen dalam simulasi model.

Untuk memenuhi informasi-informasi tersebut dilakukan langkah atau diambil asumsi sebagai berikut. Pertama, tahun dasar yang akan dijadikan titik tolak proyeksi adalah tahun 2007. Penggunaan tahun 2007 sebagai tahun dasar didasarkan atas pertimbangan bahwa survei paling mutakhir oleh BPS tentang pengeluaran konsumsi penduduk Indonesia dilakukan pada tahun 2007. Implikasinya, untuk melakukan proyeksi permintaan sudah selayaknya apabila didasarkan pada parameter-parameter permintaan paling mutakhir dimana cara untuk memperolehnya adalah lewat pemanfaatan data survei paling mutakhir juga. Kedua, data jumlah penduduk Indonesia yang digunakan adalah data jumlah penduduk Indonesia pertengahan

tahun yang dipublikasikan setiap tahun oleh BPS. Ketiga, laju pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia dihitung berdasarkan pertumbuhan penduduk selama periode 1996-2009. Keempat, untuk data konsumsi per kapita pada tahun dasar digunakan data Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2007 dan pendekatan kebutuhan. Kelima, nilai elastisitas pendapatan diduga lewat nilai elastisitas pengeluaran. Untuk memperoleh nilai elastisitas pengeluaran terlebih dahulu dilakukan pendugaan parameter sistem permintaan pangan model LA/AIDS dengan menggunakan data SUSENAS-BPS tahun 2005 dan 2007. Keenam, laju pertumbuhan pendapatan diproksi dari laju pertumbuhan pengeluaran berdasarkan data SUSENAS 2005 dan 2007.

Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data sekunder berupa data agregat time series selama periode tahun 2000-2010. Data ini akan digunakan untuk menduga fungsi permintaan dan penawaran sejumlah komoditas pertanian utama. Pendugaan fungsi permintaan dan penawaran sejumlah komoditas pertanian utama tersebut akan dilakukan dengan pendekatan ekonometrika. Hasil dari analisis ekonometrik ini akan digunakan untuk melakukan proyeksi. Data primer berupa data di tingkat propinsi yang mencakup informasi-informasi yang telah

disebutkan diatas. Data ini digunakan untuk menjustifikasi hasil analisis data sekunder dan upaya pemerintah daerah dalam peningkatan produksi guna memenuhi kebutuhan yang ada. Dengan diperolehnya informasi tentang prospek pengembangan komoditas pangan utama akan dapat diketahui faktor-faktor pendorong maupun penghambat terealisasinya hasil proyeksi dan besarnya peluang hasil proyeksi tersebut akan terealisasi.

Sumber utama data sekunder antara lain adalah (1) Badan Pusat Statistik (BPS); (2) Direktorat Jenderal Lingkup Kementerian Pertanian, khususnya Badan Ketahanan Pangan; (3) Kementerian Perdagangan; (4) Lembaga-lembaga internasional (Bank Dunia, FAO, IMF); dan (5) Asosiasi komoditas terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Proyeksi Konsumsi: Pendugaan Model Permintaan Parsial

Komoditas pangan pokok yang dianalisis meliputi beras, kedelai, dan daging sapi, mengingat kebutuhan konsumsi komoditas ini relatif besar. Dugaan elastisitas permintaan keempat komoditas beras, kedelai, dan daging sapi pada tahun 2005, 2007 dan 2008 dari hasil data Susenas terhadap harganya disajikan pada Tabel 1.

Hasil analisis empiris menunjukkan bahwa elastisitas permintaan beras, kedelai, dan daging sapi terhadap harganya bernilai negatif. Secara teoritis hasil ini sesuai dengan harapan.

Diantara empat komoditas tersebut, beras masih tergolong komoditas yang lebih inelastis terhadap perubahan harga sendiri. Meskipun beras, dan kedelai mempunyai nilai elastisitas <1 , namun kedelai lebih sensitif terhadap adanya perubahan harga. Sementara daging sapi lebih elastis terhadap perubahan harga yang ditunjukkan dengan nilai >1 . Hal ini dapat dilihat bahwa selama ini daging sapi masih dianggap sebagai makanan yang spesial/mewah. Menurut hasil penelitian Kustiari (2011) hampir semua produk peternakan mempunyai nilai elastisitas permintaan lebih dari satu. Hal ini dapat dikatakan bahwa produk peternakan merupakan produk pangan yang masih dikonsumsi oleh masyarakat berpendapatan menengah

ke atas sehingga dikatakan golongan makanan mewah. Elastisitas harga sendiri yang cenderung elastis sudah barang tentu sesuai dengan status komoditas peternakan yang bukan bahan pangan kebutuhan pokok subsisten.

Berbeda halnya dengan elastisitas harga sendiri, elastisitas pendapatan untuk beras dan kedelai cenderung inelastis (yang diindikasikan oleh elastisitas pengeluaran lebih kecil daripada satu). Besarnya elastisitas pendapatan yang berada dalam selang antara nol dan satu menunjukkan bahwa beras, dan kedelai masih tergolong barang normal. Artinya, tingkat konsumsinya masih akan meningkat apabila pendapatan masyarakat meningkat.

Tabel 1. Elastisitas Harga Sendiri dan Pendapatan

Komoditas	Elastisitas harga sendiri			Elastisitas pendapatan		
	2005	2007	2008	2005	2007	2008
Beras	-1,062	-0.894	-0.484	-0.037	0.047	0.695
Kedelai	-0.554	-1,117	-0.975	0.768	0.711	0.637
Daging Sapi	-1,109	-1,430	-1.569	1,785	1,642	0.649

Sumber: Nilai elastisitas Tahun 2008 merupakan hasil penelitian dari Data Susenas, 2008. Sedangkan nilai elastisitas tahun 2005 dan 2007 adalah hasil penelitian sebelumnya

Dari Tabel 1, hal menarik yang bisa dicermati adalah adanya perubahan respon masyarakat terhadap konsumsi baik beras, kedelai maupun daging sapi. Khususnya daging sapi yang mengalami penurunan elastisitas menunjukkan fenomena ini memperlihatkan bahwa masyarakat semakin menyadari akan

pentingnya asupan protein hewani.

Angka elastisitas pengeluaran (proksi dari pendapatan) untuk beras dan kedelai yang diperoleh dalam analisis ini tidak berbeda jauh dengan yang diperoleh dalam penelitian sebelumnya oleh Syafaat et. al (2005), dan Sudaryanto et. al (1995). Secara umum elastisitas pengeluaran

untuk daging sapi cenderung elastis dan tampak menurun. Angka elastisitas pengeluaran yang cenderung elastis ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat Indonesia secara umum komoditas peternakan boleh dikatakan masih merupakan barang mewah. Komoditas peternakan yang tergolong barang mewah bagi masyarakat Indonesia secara umum terutama adalah daging sapi, selain daging ayam ras dan susu.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Beras, Kedelai, Daging Sapi

• Beras

Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi beras dilakukan dengan metode regresi linier berganda dan menggunakan data *time series*

mulai tahun 2000-2010. Masing-masing variabel yang digunakan diubah menjadi bentuk logaritma, untuk mempermudah analisis sehingga nilai koefisien regresi langsung mencerminkan elastisitasnya. Variabel penentu konsumsi beras adalah konsumsi beras periode sebelumnya. Variabel-variabel penjelasnya yaitu populasi penduduk, pendapatan (dengan menggunakan proxy PDB per kapita), harga beras, produksi beras, konsumsi beras periode sebelumnya dan harga tepung yang digunakan sebagai substitusi dari beras.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa konsumsi beras secara bersamaan serempak dipengaruhi oleh peubah-peubah populasi penduduk, tingkat pendapatan, harga beras, harga terigu yang diasumsikan sebagai harga substitusi, produksi beras dan konsumsi

Tabel 2. Hasil Estimasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Beras (Tingkat Kebutuhan)

	Koefisien	Std.deviasi	t-statistik	Probabilitas
Intersep	0,3657	0,2836	1,2897	0,1995
Lpop Penduduk	0,3208	0,1627	1,9713	0,0509
Lpendapatan	0,0015	0,0166	0,0931	0,9260
Lharga Beras	-0,0032	0,0121	-0,2585	0,7964
Lharga Tep.terigu	0,0013	0,0131	0,1024	0,9186
Lproduksi	0,0560	0,0389	1,4373	0,1531
LKonsumsi (-1)	0,9066	0,0371	24,4825	0,0000
R2	0,9841		Dw	1,9268

Keterangan: perhitungan konsumsi = produksi + impor - ekspor

beras periode sebelumnya, dengan koefisien determinasi (R²)= 0,98. Artinya hampir 98% tingkat konsumsi beras dipengaruhi oleh peubah-peubah tersebut dan sekitar 2% dipengaruhi

oleh faktor lain diluar peubah-peubah tersebut. Misalnya budaya masyarakat Indonesia yang tidak tercover di dalam model.

Nilai elastisitas harga sesuai dengan harapan, yaitu negatif dengan nilainya kurang dari 1 artinya beras masih merupakan kebutuhan pangan pokok masyarakat sehingga berapapun perubahan harga yang terjadi masyarakat tetap mengkonsumsi beras. Setiap kenaikan harga beras sebesar 1% hanya akan menurunkan konsumsi beras sebesar 0,003%. Ternyata konsumsi beras lebih dipengaruhi oleh konsumsi pada periode sebelumnya, yang ditunjukkan dengan nilai elastisitas mendekati 1. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap beras masih relatif tinggi, sehingga upaya diversifikasi pangan perlu dilakukan langkah-langkah sosialisasi yang tanpa henti. Sementara peubah jumlah penduduk, pendapatan dan produksi lebih inelastis karena angka elastisitas < 1 artinya konsumsi beras akan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan dan produksi.

- **Kedelai**

Untuk komoditas kedelai, hasil estimasi menunjukkan bahwa dengan menggunakan data time series dari tahun 2000-2010, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi kedelai

adalah harga kedelai, jumlah penduduk, pendapatan, produksi kedelai dan harga jagung. Semua perubah-peubah tersebut secara bersamaan mempengaruhi konsumsi kedelai sebesar 0,95 ($R^2=0,95$). Semua koefisien estimasi yang sekaligus merupakan elastisitas menunjukkan tanda yang sesuai dengan harapan dalam teori ekonomi. Konsumsi kedelai elastis terhadap harga sendiri dan pendapatan, sementara konsumsi kedelai kurang elastis terhadap populasi penduduk, harga jagung dan produksi kedelai (Tabel 3). Konsumsi kedelai elastis terhadap perubahan harga kedelai artinya setiap ada kenaikan harga kedelai 10% akan menurunkan konsumsi kedelai sebesar 9,7%. Nilai elastisitas pendapatan kedelai yang kurang dari 1 menunjukkan bahwa kedelai masih tergolong barang normal. Artinya, tingkat konsumsinya masih akan meningkat apabila pendapatan masyarakat meningkat. Nilai elastisitas harga jagung yang relatif kecil (<1) menunjukkan bahwa harga jagung yang diasumsikan sebagai harga substitusi kedelai ternyata hanya sedikit saja masyarakat beralih konsumsi ke komoditi kedelai ketika terjadi kenaikan harga jagung.

Tabel 3. Hasil Estimasi Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Kedelai

	Koefisien	Std.deviasi	t-statistik	Probabilitas
Intersep	0,0730	0,1397	0,8968	0,3716
Lharga kedelai	-0,9750	0,5713	-0,8635	0,3786
LPop Penduduk	0,0820	0,0483	0,6120	0,5417
LPendapatan	0,6370	0,0325	0,2637	0,5240
Lharga jagung	0,0410	0,0496	0,4478	0,1550
Lproduksi kedelai	0,0270	0,0342	1,7202	0,0010
R2	0,9547		DW	1,9956

• **Daging sapi**

Analisis ini dilakukan dengan metode regresi linier berganda. Masing-masing variable yang digunakan diubah menjadi bentuk logaritma untuk mempermudah analisis. Variabel penentu adalah konsumsi daging sapi. Variable-variable penjelasnya yaitu populasi penduduk, pendapatan (dengan menggunakan proxy PDB per kapita), harga daging sapi, produksi daging sapi, konsumsi daging sapi periode sebelumnya dan harga daging ayam yang diasumsikan merupakan substitusi dari daging sapi.

Tabel 4 menunjukkan bahwa faktor yang secara signifikan dan meyakinkan mempengaruhi konsumsi daging sapi adalah konsumsi periode sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk kelompok masyarakat yang sering

atau jarang mengkonsumsi daging sapi akan mengikuti pola konsumsi tersebut di periode berikutnya. Koefisien yang bernilai 0,7645 menunjukkan bahwa peningkatan (penurunan) konsumsi daging sapi sebesar 1 kg pada periode sebelumnya akan meningkatkan (menurunkan) konsumsi daging sapi sebesar 0,7645%. Faktor selanjutnya yang berpengaruh secara positif dan signifikan adalah populasi penduduk dan tingkat pendapatan. Kenaikan konsumsi daging sapi merupakan konsekuensi logis ketika jumlah penduduk meningkat. Pertambahan jumlah penduduk 1% akan meningkatkan konsumsinya dengan besaran yang hampir sama yaitu 1,08%. Sedangkan kenaikan pendapatan 1% hanya akan meningkatkan konsumsi daging sapi sebesar 0,089%.

Tabel 4. Hasil Estimasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Daging Sapi

Variabel Penjelas	Koefisien	t-statistik	Probabilitas
Konstanta	-16,5005	-2,6496	0,0091
L-Populasi penduduk	1,0801	2,9547	0,0037
L-Pendapatan	0,0891	2,9276	0,0041
L-Harga daging sapi	-0,0915	-2,2428	0,0267
L-Produksi daging sapi	-0,1058	-3,6865	0,0003
L-Konsumsi periode sebelumnya	0,7645	19,8946	0,0000
L-Harga daging ayam	0,0108	0,6310	0,5292

Selanjutnya, variabel yang memiliki korelasi negatif dengan konsumsi daging sapi adalah harga dan produksi. Dengan tingkat signifikansi yang relatif lebih rendah, kenaikan harga 10% akan menurunkan konsumsi sebesar 0,9%. Hal yang menarik adalah bahwa kenaikan produksi justru diestimasikan akan menyebabkan penurunan konsumsi. Hal ini dapat dijelaskan dengan pola konsumsi daging sapi masyarakat yang masih menganggap daging sapi adalah barang “mewah”. Untuk masyarakat yang tidak mengkonsumsi daging sapi secara rutin dalam makanan sehari-hari, cenderung tidak mengubah pola konsumsi dengan adanya penurunan atau peningkatan produksi. Masyarakat dengan pendapatan rendah hanya mengkonsumsi daging sapi pada acara-acara tertentu seperti hajatan, perayaan hari besar dan sebagainya. Kemudian, asumsi bahwa daging ayam merupakan substitusi dari daging sapi tidak dapat dibuktikan. Kenaikan (penurunan) harga

daging ayam tidak berpengaruh terhadap konsumsi daging sapi.

Proyeksi Konsumsi Beras, Kedelai, dan Daging Sapi

Proyeksi permintaan yang disajikan pada Tabel 5 didasarkan pada hasil estimasi persamaan regresi linear dari konsumsi beras, kedelai dan daging sapi. Dengan membuat beberapa asumsi perubahan terhadap variabel dari setiap persamaan, kemudian berdampak pada besarnya perubahan yang terjadi maka akan diperoleh proyeksi konsumsi untuk tahun ke-t+1. Berdasarkan hasil simulasi proyeksi terhadap ke-3 komoditas yang menjadi fokus penelitian menunjukkan bahwa permintaan beras, kedelai, dan daging sapi dalam periode tahun 2011-2013 akan terus meningkat. Laju peningkatan total konsumsi tertinggi adalah pada komoditas daging sapi (4%/tahun), diikuti berturut-turut oleh Beras (2,2%/tahun), kedelai (0,8%/tahun).

Tabel 5. Proyeksi Konsumsi Beras, Kedelai dan Daging Sapi

Tahun	Permintaan (ton)		
	Beras	Kedele	Daging Sapi
2009	32,214,000	2,197,009	468,900
2010	33,825,000	2,229,081	494,600
2011*	34,246,690	2,238,213	519,109
2012*	34,771,059	2,247,099	532,679
2013*	35,341,598	2,274,100	549,209
Trend(%/th)	2.2	0.8	4.0

Ket: * merupakan angka proyeksi

Angka-angka proyeksi ini didasarkan pada peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah sehingga tingkat konsumsi pun akan meningkat seiring dengan naiknya tingkat pendapatan masyarakat, perubahan harga komoditi serta tingkat produksi. Nilai proyeksi ini merupakan bahan referensi dalam perumusan kebijakan khususnya untuk kebijakan peningkatan produksi, swasembada pangan, swasembada produk peternakan dan kebijakan perdagangan. Persentase capaian hasil proyeksi secara aktual sangat ditentukan oleh variabel diluar model yang mana kondisinya relatif tidak dapat dikendalikan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap permintaan komoditi beras, kedelai, dan daging sapi, faktor-faktor yang mempengaruhi untuk masing-masing komoditi adalah: konsumsi komoditas beras dipengaruhi oleh konsumsi tahun sebelumnya dan harga beras. Beras merupakan komoditas pangan pokok

sehingga laju konsumsi akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk serta pola konsumsi masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi kedelai adalah produksi kedelai. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi daging sapi adalah populasi, pendapatan, harga, konsumsi daging sapi tahun sebelumnya serta harga daging ayam.

Berdasarkan model permintaan, konsumsi komoditas beras, dan kedelai inelastis terhadap harga sedangkan konsumsi daging sapi justru elastis terhadap harga itu sendiri. Perubahan elastisitas dalam setiap titik waktu analisis baik terhadap harga maupun pendapatan menjadi lebih inelastis menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat akan produk tersebut menjadi semakin penting. Dengan mengasumsikan perkembangan harga, pertumbuhan jumlah penduduk, pendapatan, harga substitusi dan produksi, komoditi beras, kedelai, dan daging sapi mulai tahun 2009-2013 mengalami peningkatan konsumsi dengan laju peningkatan masing-masing sebesar 2,2%; 0,8%; dan 4% per tahun.

Kesimpulan di atas menunjukkan bahwa berbagai kebijakan sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut (1) untuk meningkatnya konsumsi komoditas beras, kedelai dan daging sapi selama tahun 2011-2013 maka diperlukan upaya kebijakan terkait dengan peningkatan produksi dan produktivitas; (2) untuk memenuhi konsumsi komoditas beras, kedelai dan daging sapi dapat dilakukan melalui peningkatan produksi, oleh karena itu diperlukan analisis lebih lanjut dari sisi penawaran dan membuat angka proyeksi dari sisi penawaran sehingga diperoleh angka selisih antara konsumsi dan produksi.

Dari komoditi yang dianalisis, harga merupakan faktor yang mempengaruhi terhadap konsumsi, terutama daging sapi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya stabilisasi harga harus terus dilakukan untuk memudahkan keterjangkauan terhadap konsumsi pangan. Dengan demikian perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan produksi disertai dengan ketersediaan pasokan disetiap komoditi seperti peningkatan kesejahteraan petani dan pengendalian harga komoditi.

DAFTAR PUSTAKA

Business News. (2010). *Lonjakan Harga Pangan*. Edisi 4 September 2010

Center for Agro and Socio-Economic Research. (2000). *Proyeksi Penawaran dan Permintaan Komoditas Pertanian*. Kerjasama

BAPPENAS dengan Puslit Sosial Ekonomi Pertanian.

- Engle, R.F. and C.W.J. Granger. (1987). Co-integration and Deviasi-Correction: *Representation, Estimation and Testing*. *Econometrica*, 55(2), pp. 251-276.
- Green R. dan J. M. Alston. (1990). Elasticities in AIDS Models. *American Journal of Agricultural Economics*, 69, pp. 442-445.
- Hardinsyah, Hartoyo, D. Briawan, C.M. Daviriani dan B. Setiawan. (1999). *Membangun Sistem Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Tangguh dalam Thaha, R et. al. (eds) Pembangunan Gizi dan Pangan dalam Perspektif Kemandirian Lokal*. Bogor: PERGIZI PANGAN Indonesia dan Center for Regional Resource Development dan Community Empowerment.
- LaFrance, J. T. (2004). *Integrability of the Linear Approximation Almost Ideal Demand System*. *Economics Letters* 84, pp. 297-303.
- Simatupang, P. (1988). *Metoda Analisa Ekonomi Produksi, Konsumsi, Pendapatan dan Alokasi Tenaga Kerja Keluarga Tani dalam Prosiding Patanas: Perubahan Ekonomi Pedesaan Menuju Struktur Ekonomi Berimbang*. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Sudaryanto, et. al.,. (1998). *Analisis Permintaan dan Penawaran Komoditas Pertanian Utama Dalam Pelita VII*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

- Suryana, A dan Ketut Kariyasa. (2008). *Ekonomi Padi di Asia: Suatu Tinjauan Berbasis Kajian Komparatif*. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 26 No. 1, Juli 2008.
- Suryana, A. (2001). *Tantangan dan Kebijakan Ketahanan Pangan*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat untuk Mencapai Ketahanan Pangan dan Pemulihan Ekonomi. Departemen Pertanian, Jakarta, 29 Maret.
- Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). (2008).
- Syafa'at, N., P.U. Hadi., A. Purwoto., D.K. Sadra., F.B.M. Debukke., J. Situmorang dan E.M. Lokollo. (2005). *Proyeksi Permintaan dan Penawaran Komoditas Utama Pertanian*. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Syafa'at, N. (2005). *Analisis Permintaan dan Penawaran Komoditas Pertanian Utama*. Laporan Hasil Penelitian. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

DAMPAK KEBIJAKAN BEA KELUAR TERHADAP EKSPOR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAKAO

Impact Customs Exit on Export and Cocoa Processing Industry

Makmun Syadullah

Peneliti Utama pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan,
Gd. R.M. Notohamiprodjo, Lt. 6, Jl. DR. Wahidin No. 1, Jakarta 10710, syadullah@yahoo.com

Naskah diterima: 10 Februari 2012

Disetujui diterbitkan: 14 Juni 2012

Abstrak

Analisis ekspor kakao dan perkembangan industri kakao sebelum dan sesudah diterapkannya pajak ekspor dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam analisis adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Dalam rangka mendorong perkembangan industri pengolahan kakao, pada tahun 2010 pemerintah memberlakukan kebijakan pajak ekspor biji kakao. Kebijakan ini bertujuan untuk menghambat ekspor biji kakao dan untuk meningkatkan pasokan biji kakao industri dalam negeri. Data menunjukkan bahwa setelah pemberlakuan bea keluar, ekspor biji kakao mengalami penurunan dan jumlah perusahaan pengolahan kakao mengalami peningkatan. Namun demikian, industri pengolahan kakao belum beroperasi dalam kapasitas penuh. Rendahnya kualitas biji kakao yang diproduksi di Indonesia merupakan faktor utamanya. Untuk itu direkomendasikan agar pendapatan pemerintah dari bea keluar ekspor biji kakao dimanfaatkan kembali untuk pembinaan petani dalam meningkatkan kualitas biji kakao.

Kata Kunci: Bea Keluar, Efektif, Kualitas, Biji Kakao

Abstract

The study uses a descriptive analysis in comparing cocoa exports and development of the cocoa industry before and after the imposition of export duty. The analysis is based on the secondary data taken from the Central Agency of Statistics. To foster the development of the cocoa processing industry, in 2010 the government has issued a policy to impose export duties on the export of cocoa beans. This policy is aimed to hamper cocoa beans export and to boost cocoa beans supply to domestic industry. The available information shows that after its imposition there has been a decline in cocoa export and an increase the number of cocoa processing companies. However, the cocoa processing industry has not yet operated in its full capacity. This is caused by the low quality of cocoa beans produced in Indonesia. It is then recommended that the government's revenue from cocoa beans export should be returned back to farmers in improving the quality of cocoa beans. By doing so, the farmer will be compensated by the government in the form of improved and adequate infrastructure in the production center of cocoa beans, as well as provision of higher quality seeds and better counseling.

Key words: Export Duties, Effective, Quality, and Cocoa Beans

JEL Classification: H25

PENDAHULUAN

Kakao merupakan salah satu komoditi unggulan perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Peran tersebut terwujud dalam bentuk penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa negara. Pada saat ini sebagian besar produksi kakao Indonesia diekspor dan hanya sebagian kecil yang dikonsumsi di dalam negeri. Produk yang diekspor sebagian besar dalam bentuk biji kering.

Indonesia tercatat sebagai negara produsen biji kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading (Ivory Coast) dan Ghana. Berdasarkan data Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics¹ volume ekspor biji kakao Indonesia memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat. Pada tahun 2008 volume ekspor biji kakao mencapai 515.538,7 ton, naik dibanding volume ekspor tahun 2007 yang mencapai 503.523,1 ton. Pada tahun 2009 volume ekspor biji kakao kembali meningkat menjadi 535.191,1 ton dari total produksi biji kakao nasional pada tahun 2009 sebesar 577.000 ton. Dengan demikian, pada tahun 2009 hampir 93% dari total produksi biji kakao Indonesia diekspor ke mancanegara.

Meskipun ekspor biji kakao terus meningkat, ekspor tersebut sebagian besar masih dalam bentuk mentah.

Kurang lebih 90% dari total ekspor biji kakao Indonesia masih dalam bentuk biji kakao yang belum difermentasi. Akibatnya harga ekspor biji kakao Indonesia selalu didiskon karena harga biji kakao yang tercantum di terminal New York adalah harga untuk biji kakao yang telah difermentasi.

Sementara itu, volume ekspor produk kakao olahan masih relatif sangat kecil jika dibandingkan dengan volume ekspor biji kakao. Data BPS menunjukkan volume ekspor kakao olahan Indonesia pada tahun 2009 hanya mencapai 115.170 ton yang terdiri dari produk antara (*cocoa liquor, cocoa cake, cocoa butter, cocoa powder*) sebanyak 83.642 ton dan produk akhir sebanyak 31.528 ton²

Indonesia selama ini hanya berperan sebagai penyedia bahan baku bagi industri hilir kakao (coklat) di luar negeri. Industri hilir coklat justru berkembang di negara-negara yang relatif tidak memiliki sumber bahan baku biji kakao, seperti negara-negara Eropa, Amerika Serikat, China, Malaysia dan Singapura. Negara tujuan ekspor biji kakao Indonesia selama ini meliputi 20 negara, akan tetapi hanya enam negara, yaitu Malaysia, Amerika Serikat, Singapura, Brazil, Prancis dan China yang menjadi pengimpor terbesar. Keenam negara tersebut pada tahun 2009 mengimpor 444.798,97 ton biji

1 International Cocoa Organization. (2009). Cocoa year 2008/09. Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XXXV (4), pp.1

2 Media Industri. (2010). Penerapan Bea Keluar: Dorong Industri Hilir Kakao Domestik. Nomor 2, 2010.

kakao Indonesia atau menguasai sekitar 83,11% dari total ekspor biji kakao Indonesia yang mencapai 535.191,12 ton³.

Berdasarkan data produksi kakao di atas, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan industri hilir pengolahan kakao. Untuk itu pemerintah c.q. Kementerian Perindustrian dewasa ini dengan menggalakkan pengembangan industri hilir kakao nasional. Diharapkan melalui pengembangan ini Indonesia akan mampu meningkatkan perolehan nilai tambah di dalam negeri yang pada gilirannya akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan mendorong perolehan devisa dari kegiatan ekspor produk olahan biji kakao.

Selama ini ada beberapa kebijakan yang kurang mendukung upaya pengembangan industri hilir kakao dalam negeri sehingga industri hilir kakao nasional kurang berkembang, diantaranya adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang PPN atas komoditi primer. Pengenaan PPN sebesar 10 % mengakibatkan beralihnya biji kakao yang semula diolah di dalam negeri menjadi diekspor dalam bentuk biji. Sebagai akibatnya, pasokan bahan baku untuk perusahaan pengolahan biji kakao dalam negeri berkurang.

Dalam rangka mengembangkan industri pengolahan kakao, pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan kebijakan Pajak Ekspor, atau lebih dikenal dengan kebijakan Bea Keluar (BK). Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan BK dan Tarif BK. Peraturan tersebut diterapkan secara progresif. Besaran tarif BK dan harga patokan ekspor biji kakao ditentukan berdasarkan harga referensi biji kakao. Harga referensi dimaksud adalah harga rata-rata internasional yang berpedoman pada harga rata-rata CIF terminal New York. Besaran harga referensi berikut harga patokan ekspor (HPE) ditetapkan setiap bulan oleh Menteri Perdagangan. Seberapa jauh kebijakan tersebut efektif?

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan evaluasi bagaimana dampak kebijakan BK terhadap ekspor biji kakao dan perkembangan industri pengolahan kakao. Dengan evaluasi tersebut diharapkan akan diperoleh:

1. Gambaran produksi, ekspor, dan daya saing biji kakao Indonesia.
2. Pemahaman tentang dampak penerapan BK biji kakao terhadap ekspor biji kakao.
3. Pemahaman tentang dampak penerapan BK biji kakao terhadap industri pengolahan kakao Indonesia.

3 Badan Pusat Statistik. (2011). Statistik Indonesia 2011. Jakarta: BPS.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Bea Keluar Kakao

Upaya pengembangan industri pengolahan kakao sebetulnya sudah dilakukan pemerintah sejak awal dekade tahun 2000-an. Namun baru pada akhir tahun 2010-an terbit kebijakan-kebijakan pro industri pengolahan kakao, seperti dihapuskannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di tahun 2007 untuk perdagangan biji kakao dalam negeri, dan diterapkannya kebijakan Pajak Ekspor yang kemudian disebut dengan kebijakan BK pada tahun 2010.

Penghapusan PPN yang besarnya 10% dimaksudkan untuk memperlancar pasokan biji kakao kepada industri pengolahan kakao dalam negeri, sedangkan kebijakan BK ditujukan untuk menghambat ekspor biji kakao dan mendorong pasokan biji kakao untuk industri domestik. Kebijakan penghapusan PPN 10% pada tahun 2007 tampaknya belum mampu menciptakan iklim usaha industri pengolahan kakao yang kondusif. Dari 40 industri pengolahan kakao yang ada sebelumnya, hanya 15 perusahaan yang mampu bertahan pasca penghapusan PPN. Dari 15 perusahaan itu, ternyata

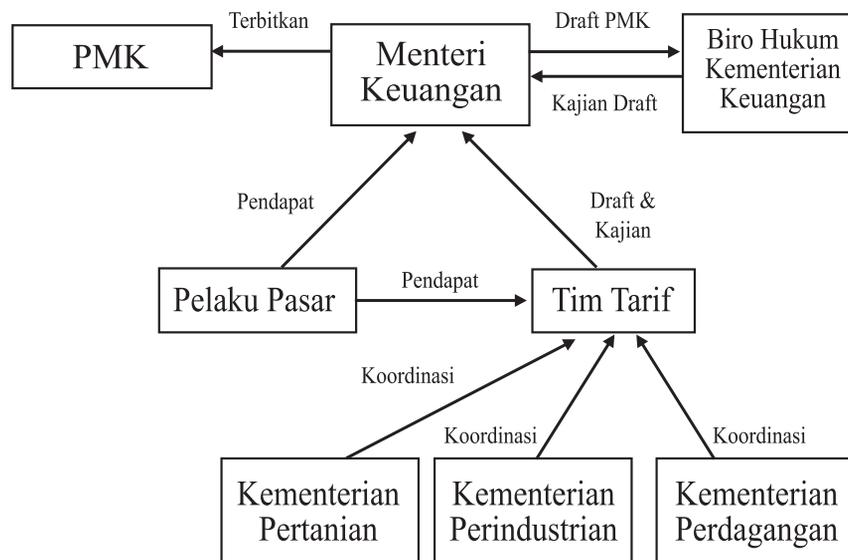
tidak semuanya dapat beroperasi dengan baik. Hanya lima perusahaan saja yang dapat beroperasi dengan baik, sisanya 10 perusahaan berhenti operasi⁴.

Selanjutnya pada 1 April 2010 pemerintah secara resmi menerapkan kebijakan BK secara progresif terhadap ekspor biji kakao melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan BK dan Tarif BK. Apabila ekspor biji kakao dibebani pajak, maka diharapkan petani dan eksportir berusaha untuk mengolah kakao terlebih dahulu sebelum mengekspornya. Dengan demikian, nilai tambah dan geliat industri pengolahan biji kakao di Indonesia dapat meningkat.

Secara umum, pengambilan keputusan penetapan tarif BK dilakukan melalui koordinasi antar instansi terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. Dalam hal ini, PMK ditetapkan oleh tim penentuan tarif atas dasar masukan beberapa pelaku pasar dan tim ahli dari instansi terkait. Proses penetapan PMK⁵ dapat dijelaskan sebagaimana Gambar 1.

4 Media Industri. (2010). Penerapan Bea Keluar: Dorong Industri Hilir Kakao Domestik. Nomor 2, 2010.

5 Rimawan, Praditya., Widodo, Tri., Amirullah, dan Hadi, Setya. (2011) Evaluasi Kebijakan Bea Keluar Biji Kakao di Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gajah Mada.



Gambar 1. Proses Pengambilan Putusan Menteri Keuangan

Sumber: Praditya, Widodo, Amirullah, dan Hadi (2011)

Selama ini memang terdapat pendapat pro dan kontra didalam tim tarif, tetapi hasil koordinasi dan kajian kemudian menyimpulkan bahwa BK untuk komoditas kakao memang diperlukan. Menurut Rimawan Pradiptyo, dkk (2010), asumsi-asumsi yang digunakan dalam penetapan tarif BK tersebut antara lain:

1. Indonesia merupakan negara terbesar ketiga penghasil biji utama kakao dunia. Oleh karena itu, seharusnya Indonesia dapat mempengaruhi harga kakao dunia.
2. Selama ini, hanya sebagian kecil dari total produksi biji kakao yang dihasilkan Indonesia dimanfaatkan oleh industri domestik. Pada tahun 2009 misalnya sebanyak 521.000 ton dari 758.000 ton atau 68,73% total produksi biji kakao Indonesia diekspor ke luar negeri.

3. Penetapan BK diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri kakao Indonesia.
4. Secara implisit diasumsikan bahwa beban BK ditanggung oleh non-petani. Pajak ekspor sebenarnya dapat menghasilkan pendapatan untuk pemerintah, namun dalam hal ini tambahan pendapatan dari BK bukan merupakan tujuan utama.

Selanjutnya di dalam PMK itu ditetapkan bahwa untuk harga referensi biji kakao sampai dengan US\$ 2,000 per ton, maka tarif BK yang berlaku adalah sebesar 0%. Untuk harga referensi di atas US\$ 2,000 sampai dengan US\$ 2,750 per ton, maka tarif BK yang berlaku adalah sebesar 5%. Untuk harga referensi di atas US\$ 2,750 sampai dengan US\$ 3,500 per ton, maka tarif BK yang berlaku adalah sebesar 10%. Sedangkan untuk harga referensi di atas

US\$ 3,500 per ton, maka tarif BK yang berlaku adalah sebesar 15%.

Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang dampak penerapan kebijakan eskalasi tarif terhadap perkembangan kakao di Indonesia dilakukan oleh Nurasa dan Muslim (2005). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan eskalasi tarif kakao Indonesia di pasaran dunia ikut menghambat tumbuhnya industri pengolahan kakao di Indonesia. Akibat tidak diberlakukannya PPN sebesar 10% terhadap bahan baku biji kakao yang langsung diekspor, investor kurang tertarik untuk menanamkan investasi dibidang pengolahan kakao dalam negeri.

Terkait dengan pungutan pajak ekspor, hasil penelitian Munadi (2007) menunjukkan bahwa penurunan pajak ekspor diikuti oleh diekspor minyak sawit. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pula bahwa penurunan pajak ekspor sebesar 10% akan meningkatkan harga minyak sawit dalam negeri sebesar 14.83%. Hasil kajian ini tentunya bermanfaat bagi para pengambil kebijakan di sektor kelapa sawit tentang dampak dari perubahan kebijakan perdagangan di sektor industri. Pemahaman tersebut merupakan hal penting untuk melahirkan kebijakan yang dapat melindungi kepentingan ekspor atau kepentingan dalam negeri.

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM (2010) menunjukkan bahwa kebijakan BK sangat menguntungkan eksportir, pedagang, dan perusahaan pengolah biji kakao di Indonesia. Mereka mengenyam tambahan keuntungan akibat kebijakan tersebut. Pemerintah juga diuntungkan oleh kebijakan ini karena mendapat tambahan penerimaan dari BK biji kakao.

Beberapa temuan penelitian di atas jelas sangat relevan untuk penelitian ini. Temuan-temuan tersebut menjadi penting tidak saja dalam pencapaian tujuan penelitian, tetapi juga dalam memahami proses transformasi keunggulan komparatif produksi biji kakao menjadi keunggulan yang kompetitif.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, kajian ini menerapkan pendekatan analisis deskriptif dengan melakukan perbandingan antara perkembangan industri kakao sebelum dikenakan BK dan setelah dikenakan BK. Perbandingan kedua kondisi ini menggambarkan efektivitas pengenaan BK atas ekspor kakao. Pendekatan ini digunakan karena keterbatasan data⁶ yang dibutuhkan dalam penelitian.

6 Terutama seri data yang cukup panjang untuk dilakukan analisis deret berkala (time-series analysis) yang lebih tepat.

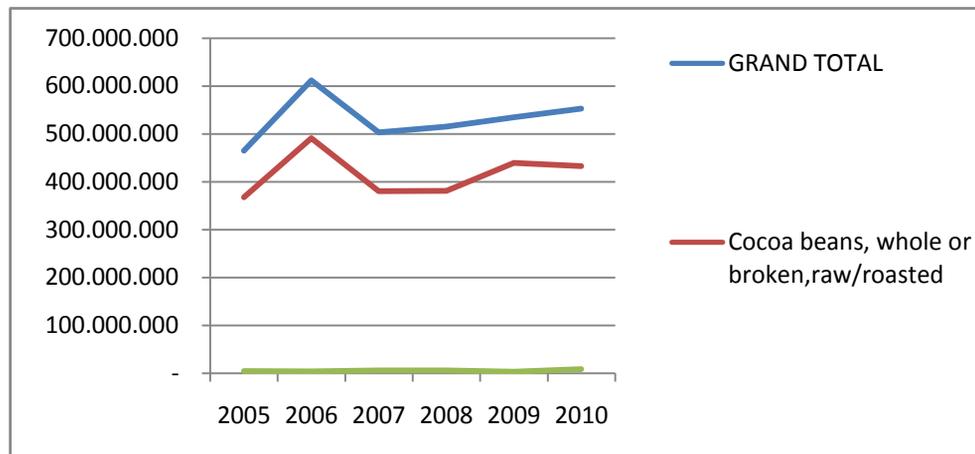
Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder Badan Pusat Statistik (BPS) yang meliputi: (i) perkembangan produksi kakao, (ii) perkembangan ekspor kakao, dan (iii) daftar industri pengolahan kakao dan kapasitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produksi dan Ekspor Kakao Indonesia

Produksi kakao tertinggi pernah dicapai pada tahun 2006 yang mencapai 612.123,53 metric ton, namun pada tahun 2007 produk tersebut mengalami penurunan drastis. Mulai tahun 2008 secara perlahan produksi kakao kembali mengalami peningkatan.



Gambar 2: Perkembangan Produksi Kakao di Indonesia, 2005-2010

Sumber: BPS (2011), diolah

Realisasi produksi kakao olahan Indonesia, baik produk olahan kakao antara maupun produk akhir masih jauh di bawah kapasitas produksi industri kakao olahan nasional. Akibatnya tingkat utilisasi industri kakao olahan nasional hanya mencapai rata-rata sekitar 54%, dimana tingkat utilisasi industri kakao antara sebesar 37,70% dan tingkat utilisasi industri produk kakao akhir sebesar 76,58%.

Sebagai negara penghasil biji kakao, industri kakao olahan Indonesia jauh ketinggalan dibandingkan dengan Negara-negara di kawasan Asia seperti, Malaysia, Singapura, dan Thailand⁷. Padahal negara-negara ini selama ini dikenal sebagai penghasil produk akhir coklat terbesar di dunia, meskipun tidak memiliki sumber bahan baku biji kakao. Hanya Malaysia yang masih memiliki pasokan bahan baku biji kakao dari dalam

⁷ Media Industri. (2010). Penerapan Bea Keluar: Dorong Industri Hilir Kakao Domestik. Nomor 2, 2010.

negerinya, namun volume produksinya relatif sangat kecil, yaitu hanya 30.000 ton per tahun.

Malaysia memiliki industri hilir kakao yang lebih maju. Pada tahun 2009 Malaysia yang memiliki 10 industri *cocoa processing* dengan total kapasitas produksi terpasang sebesar 400.000 ton per tahun, diperkirakan berhasil mencapai tingkat realisasi produksi sebesar 294.000 ton atau dengan tingkat utilisasi industri sebesar 74%.

Singapura dan Thailand yang sama-sama tidak memiliki sumber bahan baku biji kakao, memiliki industri *cocoa processing* dengan tingkat utilisasi industri yang jauh lebih baik dari Indonesia, yaitu masing-masing 84% dan 75%. Singapura dengan dua perusahaan *cocoa processing* memiliki kapasitas produksi terpasang sebesar 95.000 ton per tahun dan realisasi produksi pada tahun 2009 diperkirakan sebesar 80.000 ton. Sementara Thailand yang hanya memiliki satu perusahaan *cocoa processing* dengan kapasitas produksi terpasang sebesar 20.000 ton per tahun, pada tahun 2009 berhasil mencapai realisasi produksi sebesar 15.000 ton.

Menyadari kondisi ini, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2010 memberlakukan BK kakao sebesar 5-15% mulai 1 April

2010. Kebijakan ini diharapkan akan mendorong utilisasi produksi, industri pengolahan kakao dan mendorong petani untuk melakukan fermentasi biji kakao. Pemberlakuan BK kakao diharapkan untuk meningkatkan nilai tambah sebanyak mungkin di dalam negeri.

Dari total produksi kakao sebanyak 70 % masih diekspor dan sebagian besar dalam bentuk mentah bahkan belum melalui proses fermentasi. Permasalahan fermentasi biji kakao bukanlah masalah yang dengan mudah bisa diatasi. Dari sisi petani, fermentasi akan menguntungkan apabila volume biji kakao memenuhi tingkat *economic of scale* tertentu. Permasalahannya, umumnya petani hanya memiliki lahan yang tidak luas sekitar 1-2 Ha bahkan banyak yang hanya memiliki kurang dari 1 Ha⁸.

Sementara itu pedagang membutuhkan biji terfermentasi dalam jumlah yang cukup (memenuhi *economic of scale*) yang mampu memberikan keuntungan yang memadai bagi pedagang. Pedagang kesulitan memperoleh biji kakao fermentasi dengan jumlah yang memenuhi *economic of scale* karena petani tidak banyak melakukan fermentasi. Implikasinya biji kakao terfermentasi akan lebih lama tersimpan

8 Tingkat *economic of scale* kegiatan fermentasi dapat dicapai dengan cara melakukan fermentasi bersama-sama. Namun untuk menciptakan kebersamaan ini tidak mudah, karena kebanyakan petani mengalami ketergantungan yang tinggi terhadap pedagang biji kakao. Untuk menutup keperluan hidup ketika bukan musim panen, petani seringkali berhutang kepada pedagang biji kakao. Ketika panen tiba, petani ingin segera melunasi hutang-hutang mereka, dan seringkali hal ini dilakukan petani dengan menjual biji kakanya secepat mungkin tanpa perlu difermentasi.

digudang pedagang jika pedagang menginginkan menjual khusus biji kakao fermentasi. Di sisi lain, semakin lama biji kakao fermentasi tersimpan di gudang pedagang, para pedagang tentunya akan mengalami tekanan finansial karena mereka harus mengejar omzet penjualan. Jika hal ini terjadi, pedagang tidak ragu-ragu mencampur biji fermentasi dengan non fermentasi agar segera bisa dijual ke kota dan uang hasil penjualan bisa diinvestasikan untuk pembelian biji kakao kembali. Implikasi dari strategi ini adalah penurunan harga biji kakao fermentasi di pasaran.

Kondisi kakao beserta permasalahannya mengakibatkan kakao Indonesia terkena *automatic detention* di AS sebesar US\$ 100-300 per ton. Sementara itu, industri kakao dalam negeri tidak mampu tumbuh karena kekurangan bahan baku. Untuk menutupi kekurangan para pelaku dalam industri kakao, terpaksa harus mengimpor kakao dari luar negeri. Pada tahun 2009, Indonesia mengimpor biji kakao (*fermented kakao bean*) sebanyak 27.230 ton, impor produk olahan kakao antara sebanyak 12.426 ton dan produk akhir kakao olahan (coklat) sebanyak 8.593 ton.

Daya Saing Kakao Indonesia

Indonesia memiliki peluang yang besar sebagai pemasok kebutuhan kakao dunia. Sebagaimana diketahui bahwa tingkat konsumsi kakao dunia menunjukkan trend yang terus

meningkat dari tahun ke tahun. Tentunya ini merupakan peluang yang cukup bagus bagi Indonesia kedepan. Untuk dapat memanfaatkan peluang tersebut, produsen kakao Indonesia harus mampu bersaing dengan produsen kakao dari negara-negara. Dalam hal ini diperlukan daya saing yang tinggi, tidak hanya dalam kemampuan produksinya, tetapi juga dalam mutu dari produk kakao yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Daryanto (2007), dengan menggunakan metode analisis *Revealed Comparative Advantage* (RCA), dalam tahun 2000 sampai 2003 Pantai Gading merupakan negara yang memiliki keunggulan daya saing yang paling tinggi. Posisi tersebut, pada tahun 2004 dan 2005 digeser oleh Ghana. Posisi daya saing Indonesia berdasarkan nilai RCA masih rendah, dibawah Pantai Gading, Ghana, dan Nigeria. Namun dibandingkan dengan Brazil, posisi daya saing kakao Indonesia masih lebih baik.

Terdapat enam faktor yang menentukan keunggulan daya saing kakao Indonesia di pasar internasional. Keenam faktor tersebut adalah, pertama, ketersediaan dan kemudahan akses terhadap sumber permodalan. Kedua tingkat konsumsi dalam negeri. Ketiga lemahnya industri pendukung, khususnya industri benih/pembibitan kakao. Keempat intensitas persaingan antara produsen kakao dalam negeri. Kelima standarisasi mutu. Terakhir berkaitan

dengan kesempatan atau peluang, yakni trend konsumsi kakao dunia yang terus meningkat.

Dampak Pengenaan Bea Keluar Terhadap Ekspor Kakao

Perkembangan ekspor kakao Indonesia dalam periode 2005-2010 secara umum cenderung meningkat. Pada tahun 2005 total ekspor kakao mencapai 465.161.972 kg atau senilai USD 667,99 juta. Pada tahun 2010 total ekspor kakao meningkat menjadi 552.842.200 kg atau senilai USD 1.643,65 juta. Dengan diberlakukannya BK pada 2010, ekspor kakao mengalami penurunan yang cukup signifikan. Setidaknya hal ini dapat dilihat dari perbandingan ekspor kakao periode Januari-Februari pada tahun 2010 dengan 2011. Ekspor kakao pada periode tersebut untuk tahun 2010 mencapai 82.488.652 kg atau senilai USD 203,6 juta dan untuk tahun 2011 ekspor tersebut turun menjadi 70.659.715 kg atau senilai USD 219,05 juta.

Gambar 3 dan 4 menunjukkan perkembangan ekspor periode Mei 2010 sampai dengan Januari 2011. Dari gambar tersebut nampak bahwa sejak diberlakukannya BK pada April 2010,

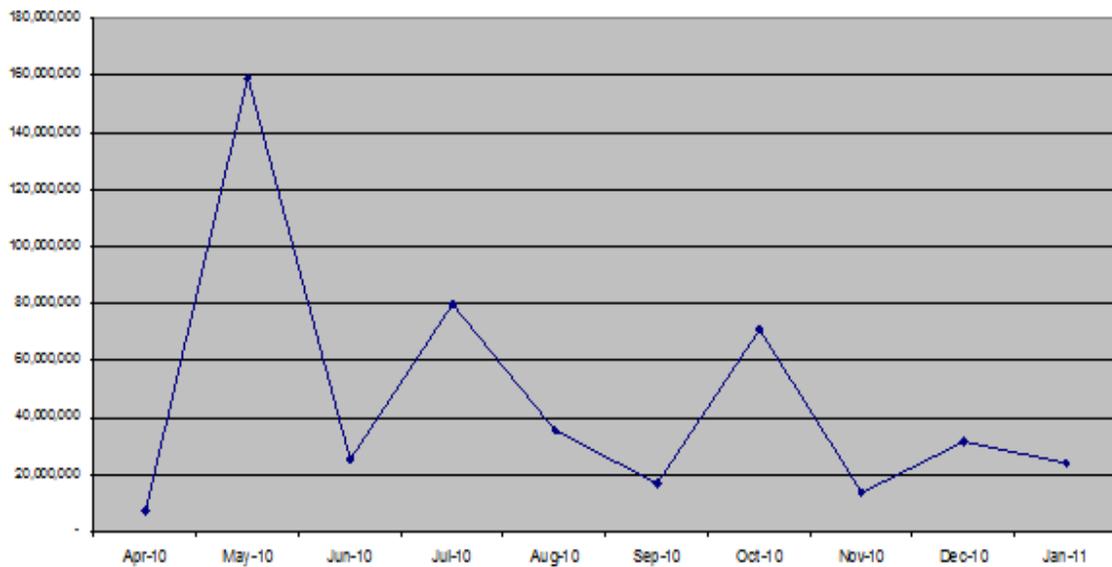
ekspor kakao mengalami penurunan yang cukup drastis. Pada bulan Mei 2010 ekspor kakao masih mencapai 160 juta ton dan pasca pengenaan BK turun drastis, bahkan pada Januari 2011 ekspor kakao hanya mencapai kurang lebih 21 juta ton.

Penurunan ekspor kakao Indonesia pasca diberlakukannya BK tidaklah disebabkan oleh menurunnya permintaan dunia, karena ekspor negara-negara utama penghasil kakao, pada umumnya masih mengalami peningkatan. Misalnya, ekspor kakao Uganda⁹ dalam periode Oktober 2010 sampai dengan September 2011 meningkat 6,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Ekspor kakao Ghana¹⁰ dalam periode 2009-2010 meningkat 62,10% atau naik dari 617.030 metrik ton menjadi 1.000.180 metrik ton. Sementara itu ekspor kakao Pantai Gading yang menunjukkan adanya penurunan, bahkan negara tersebut berhenti mengekspor kakao, krisis politik yang melanda negara tersebut.¹¹ Tetap tingginya ekspor kakao tersebut berarti bahwa permintaan pasar dunia terhadap produk kakao tetap tinggi.

9 Copal Cocoa Info. (2011). Issue No. 424 24th – 28th January 2011.

10 Cocoa Report Annual. (2012). Global Agricultural Network, 15 Maret 2012.

11 Redruello, Francisco. (2011). Cocoa Commodity Futures Shaken by Unrest in Côte d'Ivoire. Diunduh pada Februari 2012 dari <http://blog.euromonitor.com/2011/02/cocoa-commodity-futures-shaken-by-unrest-in-c%C3%B4te-divoire.html>.

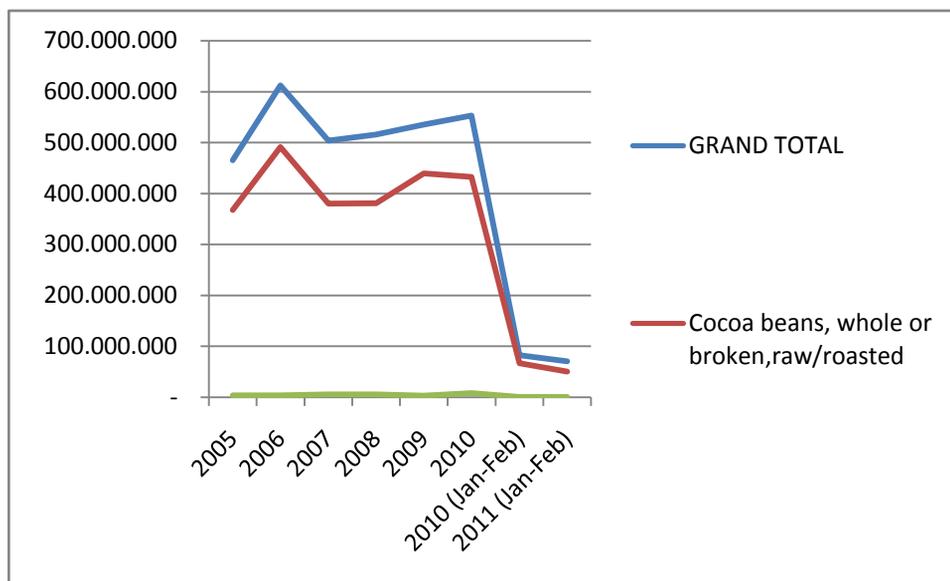


Gambar 3: Trend Ekspor Kakao Pasca Bea Keluar

Sumber: BPS (2011), diolah

Dengan demikian, sebagaimana telah disebutkan diatas, dari gambaran ekspor kakao Indonesia dan negara-negara utama penghasil kakao, dapat disimpulkan bahwa BK cukup efektif menghambat ekspor kakao Indonesia.

Kemungkinan turunnya ekspor kakao Indonesia pasca BK akibat dari turunnya permintaan dunia sangat kecil mengingat pada saat yang sama ekspor kakao dunia justru mengalami kenaikan.



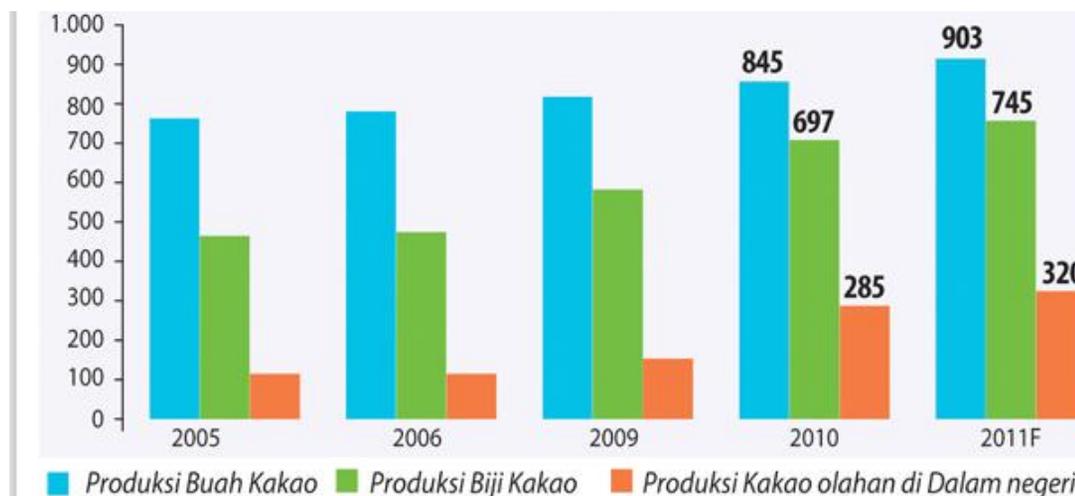
Gambar 4: Perkembangan Ekspor Kakao

Sumber: BPS (2011), diolah

Dampak Pengenaan Bea Keluar Terhadap Industri Pengolahan Kakao

Sejak pemberlakuan BK untuk ekspor biji kakao pada April 2010, industri pengolahan kakao di dalam negeri menunjukkan pertumbuhan. Produksi pengolahan kakao di Indonesia tumbuh rata-rata per tahun (*compounded annual growth rate/CAGR*) sebesar 20 % sepanjang periode 2005-2010, dengan produksi pada 2005 sebesar 115 ribu ton dan mencapai 285 ribu ton pada 2010.

Setelah diberlakukan BK pada April 2010, terjadi perubahan struktur dalam produksi kakao Indonesia dimana peranan produksi kakao olahan di Indonesia menaik mencapai 41% dari produksi biji kakao secara keseluruhan. Angka ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ketika produksi kakao olahan di Indonesia hanya mencakup 25–26% dari total produksi biji kakao, sementara sekitar 75% biji kakao diekspor.



Gambar 5: Profil Industri Kakao di Indonesia (Ribu ton)

Sumber: Asosiasi Industri Kakao Indonesia, Dirjen Perkebunan, ICCO.org (2011)

Permintaan kakao olahan, seperti kakao bubuk, kakao lemak, hingga konsentrat datang dari industri pengolahan makanan, minuman, hingga obat-obatan. Meningkatnya produksi industri makanan, minuman, serta industri farmasi Indonesia dan dunia, ikut mendorong permintaan kakao olahan.

Beberapa produsen kakao olahan juga melakukan ekspor hasil kakao olahan ke berbagai negara.

Pasca penerapan kebijakan BK biji kakao, jumlah perusahaan industri kakao processing terus mengalami peningkatan¹². Jumlah perusahaan yang beroperasi telah bertambah 7

12 Media Industri. (2010). Penerapan Bea Keluar: Dorong Industri Hilir Kakao Domestik. Nomor 2, 2010.

perusahaan. Ketujuh perusahaan industry kakao adalah PT Davomas Abadi, PT Bumitangerang Mesindotama, PT Kakao Mas Gemilang, PT Mas Ganda (keempatnya ada di Provinsi Banten), PT General Food Industry (di Jawa Barat), PT Teja Sekawan Kakao Industries (di Jawa Timur), dan PT Effem Indonesia (di Sulawesi Selatan).

Sementara itu, PT Kakao Wangi Murni, PT Budidaya Kakao Lestari, PT Kakao Ventures Indonesia, PT Foleko Group (keempatnya di Provinsi Banten), PT Inti Kakao Abadi (di Jawa Barat), PT Unicom Makassar, PT Maju Bersama Kakao dan PT Kopi Jaya Kakao (di Sulawesi Selatan) berhenti operasi¹³. Selain ke-15 perusahaan tersebut masih ada satu perusahaan lagi yang baru berdiri, yaitu PT Inti Kakao Utama di Sulawesi Tenggara. Perusahaan terakhir ini akan segera beroperasi dalam waktu dekat. Dengan demikian sampai saat ini terdapat 16 perusahaan *cocoa processing* di Indonesia

Fenomena beroperasinya kembali perusahaan *cocoa processing* menunjukkan bahwa penerapan kebijakan BK biji kakao berdampak positif terhadap upaya pengembangan industri hilir pengolahan kakao di dalam negeri. Selain mendorong beroperasinya kembali industri pengolahan kakao di dalam negeri, penerapan BK biji kakao juga telah mendorong sejumlah investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Meningkatnya kapasitas terpasang industri pengolahan kakao dari 345 ribu ton menjadi 469 ribu ton merupakan bukti semakin bergairahnya industri pengolahan kakao dalam negeri. Namun sayangnya dari 16 perusahaan pada tahun 2011 baru empat perusahaan yang telah beroperasi penuh, tiga perusahaan yang kapasitas produksinya berkisar 80-90%, enam perusahaan yang kapasitas produksinya berkisar 60-79%, dan tiga perusahaan yang kapasitas produksinya di bawah 60% (Tabel 1).

13 Tidak diketahui penyebab berhentinya kedelapan perusahaan yang bergerak dalam industri kakao ini. Pada saat ketersediaan bahan baku biji kakao semakin melimpah, logikanya tidak ada perusahaan yang justru berhenti memproduksi.

Tabel 1. Industri Pengolahan Kakao Menurut Penggunaan Kapasitas

Penggunaan Kapasitas	2009	2010	2011
Penuh	3 perusahaan	3 perusahaan	4 perusahaan
80 - 90%	3 Perusahaan	3 perusahaan	3 perusahaan
60 – 79%	6 Perusahaan	2 perusahaan	6 perusahaan
< 60%	3 Perusahaan	4 perusahaan	3 perusahaan
Total Kapasitas terpasang	345.000 ton	345.000 ton	469.000 ton

Sumber: Strategi Pengembangan Agribisnis Perkakaoan Nasional, disampaikan dalam Focus Group Discussion pada Badan Kebijakan Fiskal, 5 Mei 2011 oleh Dewan kakao Indonesia (Dekaindo).

Tabel 1 di atas disamping menggambarkan perkembangan kapasitas terpakai pada 2011, juga menunjukkan perkembangan kapasitas terpasang dalam kurun waktu 2009-2011. Dalam periode 2010-2011 terdapat tiga perusahaan yang menambah kapasitas terpasangnya. Secara total, kapasitas terpasang meningkat dari 345.000 ton menjadi 469.000 ton. Diduga keras, meningkatnya kapasitas terpasang industri pengolahan kakao tersebut berkaitan erat dengan semakin meningkatnya persediaan bahan baku biji kakao dalam negeri.

Berkembangnya industri pengolahan kakao Indonesia mendorong meningkatnya impor biji kakao Indonesia. Impor pasta kakao pada tahun 2007 hanya sekitar 529 ton, namun pada tahun 2010 telah mencapai sekitar 2.254 ton. Namun demikian, sejak diberlakukannya bea keluar biji kakao, impor biji kakao mengalami penurunan. Impor biji kakao pada tahun 2011 mencapai 16.033 ton

senilai US\$ 53,06 juta. Sedangkan pada tahun 2010, impor mencapai 22.426 ton senilai US\$ 82,3 juta. Dengan demikian dalam periode Januari-Oktober 2011, impor biji kakao mengalami penurunan sebesar 35% dibanding periode yang sama tahun 2010.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan, pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan kausalitas yang cukup jelas antara diterapkannya kebijakan BK dengan meningkatnya industri pengolahan kakao dalam negeri. Dapat dikatakan, sejak diberlakukannya BK, ekspor kakao mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari perbandingan ekspor kakao periode Januari-Februari pada tahun 2010 dengan 2011. Ekspor kakao pada periode tersebut untuk tahun 2010 mencapai 82.488.652 kg atau senilai USD 203,6 juta dan untuk tahun 2011 turun menjadi

70.659.715 kg atau senilai USD 219,05 juta.

Selain itu, jumlah perusahaan industri *cocoa processing* juga bertambah dari semula 5 perusahaan menjadi 16 perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan kebijakan BK biji kakao berdampak positif terhadap upaya pengembangan industri hilir pengolahan kakao di dalam negeri.

Meskipun jumlah industri pengolahan kakao mengalami peningkatan, pene-
naan BK ekspor kakao belum mampu meningkatkan kapasitas pengolahan. Berdasarkan kapasitas terpasang, dari 16 perusahaan pada tahun 2011 baru 4 perusahaan yang telah beroperasi penuh, 3 perusahaan yang kapasitas produksinya berkisar 80-90%, 6 perusahaan yang kapasitas produksinya berkisar 60-79%, dan 3 perusahaan yang kapasitas produksinya di bawah 60%¹⁴.

Meskipun dampak pene-
naan BK terhadap ekspor kakao cukup efektif, kebijakan ini ternyata belum mampu mendorong industri pengolahan kakao untuk beroperasi secara penuh. Diduga penyebabnya adalah rendahnya kualitas biji kakao yang dihasilkan Indonesia. Untuk itu kebijakan pene-
naan BK atas biji kakao agar lebih efektif dalam mengembangkan industri pengolahan kakao dalam negeri, maka pemerintah

perlu melakukan upaya peningkatan kualitas biji kakao.

Oleh karena itu, direkomendasikan pada pemerintah untuk dapat memanfaatkan pendapatan dari BK untuk perbaikan dan peningkatan di sentra penghasil biji kakao, penyediaan bibit yang lebih berkualitas, dan penyuluhan kepada petani kakao.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. (2005). *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Statistik Indonesia 2011*. Jakarta: BPS.
- Copal Cocoa Info. (2011). *Issue No. 424*. 24th – 28th January 2011.
- Cocoa Report Annual. (2012). *Global Agricultural Network*. 15 Maret 2012.
- Daryanto. (2007). *The Analysis of the Competitiveness of Indonesia Cocoa in the International Market*. These MBIPB, tidak diterbitkan.
- Dewan kakao Indonesia. (2011). *Strategi Pengembangan Agribisnis Perkakaoan Nasional*, disampaikan dalam Focus Group Discussion pada Badan Kebijakan Fiskal, 5 Mei 2011.
- Fuady, Munir. (2004). *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

14 Kontan. (2011). Petani Mulai Fermentasi Kakao, Impor Kakao Turun. 14 Desember 2011.

- Hamdani, Hady. (1999). *Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- International Cocoa Organization. (2009). *Cocoa year 2008/09*. Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XXXV (4), pp. 1
- Kartadjoemena, H.S. (1996). *GATT, WTO: Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*. Jakarta: IU-Press.
- Kartadjoemena, H.S. (1997). *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*. Jakarta: UI- Press.
- Kontan. (2011). *Petani Mulai Fermentasi Kakao, Impor Kakao Turun*. 14 Desember 2011
- Media Industri. (2010). *Penerapan Bea Keluar: Dorong Industri Kakao Domestik*. Nomor 02, 2010.
- Munadi, E. (2007). *Penurunan Pajak Ekspor dan Dampaknya Terhadap Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia Ke India (Pendekatan Error Correction Model)*, Informatika Pertanian, Vol.16 (2), pp. 1019-1036
- Nielsen, J. U., E. S. Madsen, dan K. Pedersen. (1995). *International Economics: Wealth of Open nations*. London, U.K.: McGraw-Hill International.
- Nurasa, Tjetjep., dan Muslim, Chairul. (2004). *Perkembangan Kakao Indonesia Dan Dampak Penerapan Kebijakan Eskalasi Tarif Dipasaran Dunia: Kasus Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Selatan*. Bogor: Pusat Analisis Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian, Badan Litbang Pertanian.
- Redruello, Francisco. (2011). *Cocoa Commodity Futures Shaken by Unrest in Côte d'Ivoire*. Diunduh pada Februari 2012 dari <http://blog.euromonitor.com/2011/02/cocoa-commodity-futures-shaken-by-unrest-in-c%C3%B4te-divoire.html>
- Rimawan, Praditya., Widodo, Tri., Amirullah, dan Hadi, Setya. (2011) *Evaluasi Kebijakan Bea Keluar Biji Kakao di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gajah Mada.
- Riyanto, Sigit. (1998). *Implementation of the GATT Tariff System: A Vehicle for International Trade or Trick?*. *Mimbar Hukum*, Vol. VII (29).
- Sanusi, F. (2011). *Peran Askrindo Dalam Penguatan Perkakaoan Nasional dan Berbagai Tantangan*, disampaikan dalam Focus Group Discussion pada Badan Kebijakan Fiskal, 5 Mei 2011.
- Sugiyarto,dkk. (2007). *Ekonomi Mikro: Sebuah kajian Konprehentif*. Jakarta: PT Gramedia.

KINERJA DAYA SAING PRODUK PERIKANAN INDONESIA DI PASAR GLOBAL

The Competitiveness of Indonesia's Fishery Products in the Global Market

Deasi Natalia¹, Nurozy²

¹ Pegawai pada Pusat Data dan Informasi Perdagangan, deasi_natalia@yahoo.com

² Kepala Bidang pada Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, nurozy@kemendag.go.id
Kementerian Perdagangan, Jl. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta

Naskah diterima : 21 Juli 2011

Disetujui diterbitkan : 12 Juni 2012

Abstrak

Di pasar perikanan dunia, Indonesia merupakan salah satu negara eksportir utama. Selama tahun 2005-2009, volume ekspor ikan dan udang dari Indonesia menurun masing-masing sebesar 1,9% dan 3,7% per tahun. Kajian ini bertujuan untuk melihat apakah penurunan tersebut disebabkan oleh daya saing yang rendah atau faktor lain. Penelitian ini menggunakan metode *Revealed Comparative Advantage* (RCA), yang merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur keunggulan komparatif komoditas di pasar tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama 2007-2009 ada 46 komoditas perikanan dalam HS 6-digit yang memiliki indeks RCA lebih besar dari satu, yang menunjukkan daya saing kuat di pasar internasional. Beberapa diantaranya bahkan mengalami peningkatan daya saing. Sementara itu, beberapa komoditas memiliki daya saing yang cenderung menurun dan berfluktuasi. Sisanya sekitar 71 komoditas memiliki daya saing lemah (RCA indeks lebih kecil dari satu). Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing yang ada, perlu beberapa usaha seperti promosi di pasar domestik maupun pasar internasional; meningkatkan kualitas; mendorong dunia perbankan untuk meningkatkan akses ke modal kerja; memperbaiki infrastruktur; menciptakan nilai tambah dalam pengembangan produk; serta mengurangi tarif bahan baku untuk industri pengolahan ikan dalam negeri.

Kata Kunci: Perdagangan Internasional, Ikan, Daya Saing, RCA

Abstract

In the global fisheries market, Indonesia is one of the main exporters. During 2005-2009, the export volumes of fish and shrimp of Indonesia declined by 1.9% and 3.7% per year respectively. It is necessary to investigate if the unexpected performance was caused by low and decreasing competitiveness or by other factors. This study uses the RCA Method, which is one of the methods that can be used to measure the comparative advantage of a commodity in a particular market. The results indicate that during 2007-2009 there are 46 commodities in the 6-digit HS of fisheries having the RCA index larger than one, showing their strong competitiveness in the international market. Some of them even have an increasing level of competitiveness, while some have a declining competitiveness and other commodities experienced fluctuating RCAs. The remaining 71 commodities experienced weak competitiveness (RCA index smaller than one) during 2007-2009. To improve the existing competitiveness, it is required to increase promotional campaigns, not only in domestic market but also in foreign market, improve the quality, encourage banks to increase access to working capital, improve infrastructure, encourage value-added products development, and reduce tariffs of raw material for the domestic fish processing industry.

Keywords: International Trade, Fish, Competitiveness, Revealed Comparative Advantage

JEL Classification: F10, F14

PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan luas daratan dan lautan serta pantai yang cukup panjang, komoditas perikanan merupakan komoditas yang cukup penting bagi Indonesia. Kondisi alam Indonesia memungkinkan masyarakat untuk menangkap dan membudidayakan ikan di seluruh wilayah tanah air. Karena itu tidaklah mengherankan apabila Indonesia merupakan salah satu negara produsen perikanan utama dunia. Ditinjau dari aspek ekonomi, perikanan memberikan kontribusi terhadap PDB berdasarkan harga berlaku selama periode 2004-2008 berkisar 2,15%-2,77% (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2008). Sektor perikanan juga menjadi penyedia lapangan pekerjaan dan sumber devisa dan investasi.

Dalam pasar internasional saat ini, Indonesia merupakan salah satu eksportir produk perikanan utama dengan menempati posisi peringkat 12. Selama periode 2005-2009 volume ekspor ikan dan udang Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun yaitu masing-masing sebesar 1,92% dan 3,68% per tahun. Saat ini terdapat gambaran bahwa walaupun Indonesia merupakan salah satu negara produsen ikan dunia dengan potensi produksi yang cukup besar, akan tetapi belum dapat memanfaatkan potensi pasar internasional yang ada, bahkan berada dibawah Thailand dan Vietnam, yang masing-masing menempati peringkat 3 dan 5. Hal ini disebabkan karena produk

perikanan Indonesia memiliki daya saing yang lebih rendah dibandingkan dengan produk dari kedua negara tersebut, khususnya produk-produk perikanan olahan. Sedangkan untuk bahan baku Indonesia memiliki daya saing yang cukup kuat. Bahan baku perikanan yang berkualitas tinggi disatu sisi dan produk perikanan yang berdaya saing rendah disisi lain jelas merupakan permasalahan penting, dan relevan untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, tujuan kajian ini adalah untuk mengestimasi daya saing komoditas perikanan.

TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa penelitian sebelumnya menggunakan RCA untuk mengestimasi daya saing komoditas, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Rakhmawan (2009), yang melakukan penelitian mengenai daya saing komoditas udang Indonesia dalam pasar internasional. Dengan analisis RCA, Rakhmawan menjelaskan tingkat daya saing keunggulan komparatif, sedangkan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing komoditas udang Indonesia (komoditas yang diteliti adalah udang beku dan tak beku pada jenis udang windu dan vanname) digunakan metode regresi linear berganda dengan tehnik perkiraan *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa komoditas udang Indonesia berdaya saing kuat atau Indonesia mempunyai keunggulan komparatif atas komoditas udang karena terlihat dari nilai RCA yang

jauh lebih besar dari satu. Sedangkan dari hasil regresi, terlihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing komoditas udang Indonesia adalah harga ekspor udang, harga domestik udang windu di tingkat produsen dan nilai ekspor ikan tuna sebagai komoditas substitusi udang. Selain itu, terdapat pula kondisi faktor seperti sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya modal, penguasaan IPTEK, sumberdaya infrastruktur, permintaan domestik dan ekspor, persaingan, struktur dan strategi industri, industri pendukung dan terkait, peran pemerintah dan faktor kesempatan

Hamidah dan Suprihanti (2008) juga menggunakan analisis keunggulan komparatif atau RCA dan analisis Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) atau Koefisien Spesialisasi Ekspor (KSE) untuk mengukur keunggulan kompetitif daya saing biji kakao Indonesia di pasar internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biji kakao Indonesia pada periode 1998-2004 sudah memiliki keunggulan komparatif yang kuat, dengan besarnya nilai RCA lebih besar dari satu (di atas rata-rata dunia), yaitu sebesar 1,94. Selain itu, kakao biji Indonesia memiliki keunggulan kompetitif pada periode 1998-2002, hal ini sesuai dengan nilai ISP yang menunjukkan bahwa biji kakao Indonesia berada pada tahap IV (tahap pematangan). Tetapi pada periode 2003-2004, biji kakao Indonesia tidak mempunyai keunggulan kompetitif lagi, karena angka ISP menunjukkan bahwa

biji kakao Indonesia berada pada tahap V (tahap penurunan).

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Pengukuran daya saing dengan menggunakan metode *Revealed Comparative Advantage* (RCA) merupakan pengukuran yang paling populer digunakan. Karena itu, penelitian tentang daya saing produk perikanan Indonesia ini akan dilakukan pula dengan menggunakan metode RCA. Penghitungan RCA ini dapat mengidentifikasi apakah suatu komoditas ekspor sebuah negara memiliki keuntungan komparatif atau tidak. Kelemahan analisis ini adalah bersifat statis dan adanya asumsi bahwa setiap negara mengekspor semua komoditas atau kelompok komoditas yang diteliti.

Cara penghitungan RCA adalah sebagai berikut :

$$RCA = \frac{X_{ik} / X_{it}}{W_{kt} / W_t}$$

dimana:

X_{ik} = Nilai ekspor komoditas k dari negara i

X_{it} = Nilai ekspor total (produk k dan lainnya) dari negara i

W_{kt} = Nilai ekspor komoditas k di dunia

W_t = Nilai ekspor total dunia

Jika nilai indeks RCA suatu negara untuk komoditas tertentu adalah lebih besar dari satu (1), maka negara bersangkutan memiliki keunggulan

komparatif di atas rata-rata dunia untuk komoditas tersebut. Demikian sebaliknya, bila lebih kecil dari satu (1), keunggulan komparatif suatu negara untuk komoditas tersebut tergolong rendah. Semakin besar nilai indeks RCA suatu komoditas, semakin tinggi pula tingkat keunggulan komparatifnya.

Data

Data yang digunakan dalam analisis ini bersumber dari data Comtrade selama periode 2007-2009 dengan menggunakan 117 kelompok komoditas perikanan berdasarkan kode HS 6 digit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produksi Komoditas Ikan Dunia

Ikan merupakan salah satu komoditas perdagangan yang mengalami perkembangan perdagangan cukup pesat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dunia. Mengapa pertumbuhan penduduk sangat berpengaruh terhadap perkembangan perdagangan ikan? Hal ini disebabkan pertama, jumlah konsumsi ikan dunia, baik ikan segar maupun ikan olahan, sangat besar. Kedua, ikan tidak hanya dikonsumsi oleh manusia, tetapi juga digunakan untuk bahan baku pakan ternak. Perkembangan perdagangan ikan yang cukup pesat ini juga didorong oleh semakin meluasnya penggunaan lemari pendingin dan pengembangan alat transportasi yang mampu menjaga kualitas ikan segar.

Sebagai komoditas yang diperdagangkan, ikan memiliki potensi pasar

yang cukup besar dimana sepertiga dari produksi ikan dunia diperdagangkan secara internasional (FAO, 2010). Ada beberapa jenis produk perikanan yang diperdagangkan yaitu antara lain *Mackerel, Salmon, Shark, Swordfish, Tuna (yellowfin, bigeye, bluefin, albacore and skipjack), dan Shrimp*. Produk perikanan tersebut diperdagangkan baik dalam bentuk segar, beku maupun olahan.

Berdasarkan data FAO (2010), produksi perikanan dunia selama beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada 2000 total produksi ikan dunia mencapai 131,1 juta ton yang meliputi ikan tangkap 95,6 juta ton dan ikan budidaya 35,5 juta ton, jumlah ini meningkat menjadi 140,5 juta ton pada 2004, yang meliputi ikan tangkap 95,0 juta ton dan ikan budidaya 45,5 juta ton. Pada 2008, produksi perikanan dunia mencapai 142 juta ton dimana untuk hasil tangkapan mencapai 90 juta ton dan produksi hasil budidaya mencapai 52,5 juta ton dan nilai produksi pada tahun tersebut diperkirakan mencapai US\$ 98,4 milyar.

Pada 2010 produksi diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 3,9% dibanding pada 2004 sehingga menjadi 146,0 juta ton yang terdiri dari ikan tangkap 93,0 juta ton dan ikan budidaya 53,0 juta ton. Selanjutnya FAO memperkirakan bahwa pada 2015 total produksi ikan dunia akan meningkat sebesar 22,6% dibanding pada 2010 sehingga menjadi 179,0 juta ton dengan perincian 105,0 juta ton merupakan

produksi ikan tangkap dan 74,0 juta ton perikanan dunia selama periode 2000-2004 dan angka perkiraan produksi pada 2010 dan 2015. produksi ikan budidaya. Tabel 1 di bawah ini memberikan gambaran produksi

**Tabel 1. Produksi Perikanan Dunia, 2000-2015
(Juta Ton)**

URAIAN	2000	2004	2010	2015
Total Tangkapan	95.6	95.0	92.0	105.0
- Perairan Laut	86.8	85.8	86.0	na
- Perairan Darat	8.8	9.2	6.0	na
Aquaculture	35.5	45.5	53.0	74.0
Total Produksi	131.1	140.5	146.0	179.0

Sumber : FAO (2010)

Berdasarkan data FAO diperoleh gambaran bahwa, sekitar 80% produksi ikan laut berasal dari negara-negara berkembang, dan China menjadi produsen perikanan utama di dunia (Tabel 2). Untuk perikanan tangkap, pada 2008 tiga negara berkembang yaitu China, Peru dan Indonesia merupakan

**Tabel 2. Produksi Perikanan Tangkap Dunia, 2004-2008
(Juta Ton)**

Negara	2004	2005	2006	2007	2008	Pertumbuhan/tahun (%) 2004 s.d 2008
China	14,46	14,59	14,63	14,66	14,79	0,50
Peru	9,60	9,39	7,02	7,21	7,36	-7,65
Indonesia	4,65	4,71	4,81	5,05	4,96	1,98
USA	4,96	4,89	4,85	4,77	4,35	-2,84
Jepang	4,32	4,29	4,31	4,30	4,25	-0,30
India	3,39	3,69	3,84	3,86	4,10	4,36
Chile	4,93	4,33	4,16	3,82	3,55	-7,48
Russia Fed	2,94	3,20	3,28	3,45	3,38	3,64
Filipina	2,21	2,27	2,32	2,50	2,56	3,98
Myamar	1,59	1,73	2,01	2,24	2,49	12,29
Thailand	2,84	2,81	2,70	2,30	2,46	-4,77
Norway	2,52	2,39	2,26	2,38	2,43	-0,81
Vietnam	1,88	1,93	1,97	2,02	2,09	2,59
Korea Rep	1,58	1,65	1,76	1,87	1,94	5,56
Mexico	1,26	1,32	1,36	1,48	1,59	6,00
Sub total	63,14	63,19	61,28	61,91	62,32	-0,47
Lainnya	29,23	92,37	92,37	92,37	92,37	25,87
Total Dunia	92,37	92,06	89,71	89,90	89,74	-0,81

Sumber : FAO (2010)

negara produsen utama dunia dengan produksi masing-masing sebesar 14,8 juta ton, 7,4 juta ton dan 5,0 juta ton (Tabel 2). Negara produsen selanjutnya adalah dua negara industri (maju) yaitu Amerika Serikat dan Jepang dengan total produksi masing-masing sebesar 4,3 juta ton dan 4,2 juta ton. Posisi selanjutnya diduduki oleh India, Chili, Federasi Rusia, Filipina dan Myanmar. Sebagai negara produsen produk perikanan, pada 2007 Indonesia berhasil menggeser posisi Amerika Serikat pada peringkat ke-3. Sedangkan posisi China dan Peru belum tergeser sebagai produsen utama ke-1 dan ke-2 sejak 1999.

Dari beberapa negara produsen perikanan tangkap, selama periode 2004-2008 hanya Myanmar yang mengalami pertumbuhan di atas 10% per tahun, sedangkan produksi China, Indonesia, India, Rusia, Filipina, Vietnam, Korea dan Meksiko mengalami peningkatan dibawah 10%. Sementara itu, produksi perikanan Peru, Amerika Serikat, Jepang, Chili, dan Thailand mengalami penurunan. Turunnya pertumbuhan produksi di beberapa negara produsen utama tersebut menyebabkan produksi perikanan tangkap dunia mengalami penurunan sebesar sekitar 0,8% per tahun selama periode yang sama.

Tabel 3 memperlihatkan bahwa produksi dunia perikanan budidaya selama periode 2004-2008 tumbuh sekitar 5,9% per tahun dengan total produksi pada 2008 sebesar 52,5 juta ton. Negara produsen perikanan budidaya

yang terbesar adalah China dengan total produksi pada tahun yang sama sebesar 32,7 juta ton dan produksinya selama periode 2004-2008 tumbuh sebesar 5,4% per tahun. Selanjutnya adalah India dan Vietnam dengan produksi pada 2008 masing-masing sebesar 3,5 juta ton dan 2,5 juta ton. Diantara kedua negara tersebut, Vietnam yang memiliki pertumbuhan tinggi yaitu sekitar 19,9% per tahun. Indonesia ternyata merupakan produsen terbesar ke empat dengan jumlah produksi pada 2008 sebesar 1,7 juta ton dan tingkat pertumbuhan per tahun dalam periode 2004-2008 mencapai hampir 11,8%.

Diantara beberapa negara produsen utama perikanan dunia, terlihat bahwa pada periode 2004-2008, Jepang dan Amerika Serikat yang mengalami penurunan produksi yaitu masing-masing sebesar 0,8% dan 3,6% per tahun. Sedangkan, ada empat negara dengan pertumbuhan produksi cukup tinggi, yaitu Vietnam, Indonesia, Philipina dan Myanmar. Produksi keempat negara anggota ASEAN tersebut pada 2008 adalah sebesar 5,6 juta ton atau memberikan kontribusi sebesar 10,6% terhadap total produksi dunia pada tahun tersebut. Perkembangan produksi perikanan budidaya dunia selama periode 2004-2008 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 3.

Dalam rangka memenuhi permintaan pasar baik di dalam maupun luar negeri, pada 2015 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menargetkan Indonesia

Tabel 3. Produksi Perikanan Budidaya Dunia, 2004-2008
(Juta Ton)

Negara	2004	2005	2006	2007	2008	Pertumbuhan/tahun (%) 2004 s.d 2008
Dunia	41,90	44,31	47,35	49,90	52,55	5,88
China	26,57	28,12	29,86	31,42	32,74	5,43
India	2,80	2,97	3,18	3,11	3,48	4,95
Vietnam	1,20	1,44	1,66	2,09	2,46	19,86
Indonesia	1,05	1,20	1,29	1,39	1,69	11,77
Thailand	1,26	1,30	1,41	1,35	1,37	2,11
Bangladesh	0,91	0,88	0,89	0,95	1,01	2,62
Norway	0,64	0,66	0,71	0,84	0,84	8,36
Chile	0,68	0,72	0,79	0,78	0,84	5,3
Philipines	0,51	0,56	0,62	0,71	0,74	10,3
Jepang	0,78	0,75	0,73	0,77	0,73	-0,82
Mesir	0,47	0,54	0,60	0,64	0,69	9,81
Myanmar	0,40	0,49	0,57	0,60	0,67	13,47
Amerika Serikat	0,61	0,51	0,52	0,53	0,50	-3,56
Sub total	37,86	40,14	42,84	45,18	47,78	6,01
Lainnya	4,04	4,17	4,51	4,73	4,77	4,69

Sumber : FAO (2010)

menjadi produsen perikanan nomor 1 di dunia. Disamping itu juga Indonesia ditargetkan menjadi produsen terbesar di dunia untuk 5 komoditas perikanan yaitu rumput laut, lele, patin, bandeng dan kerapu. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan dana kurang lebih sebesar Rp. 56,7 triliun selama lima tahun kedepan.

Akan tetapi, informasi yang ada menunjukkan bahwa investasi di sektor perikanan sampai Oktober 2010 baru mencapai Rp 400 miliar, yang berarti masih dibawah target investasi tahun 2010, yaitu sebesar Rp 1,5 triliun. Investasi tersebut meliputi sektor pengolahan, penangkapan dan juga budidaya. Sedangkan lokasi yang sudah terealisasi untuk investasi tersebut diantaranya adalah Baubau, Bitung, dan Banyuwangi. Berdasarkan target investasi

yang telah dicanangkan pemerintah tersebut, maka jumlah produksi yang hendak dicapai pada 2014 adalah sebesar 22,36 juta ton, dengan produksi ikan budidaya adalah sebesar 16,8 juta ton.

Konsumsi dan Perdagangan Ikan Dunia

Ikan dikonsumsi oleh manusia karena memiliki kandungan protein dan nutrisi yang cukup baik. Dibanyak negara konsumsi ikan dipergunakan sebagai sumber pasokan bagi orang-orang yang melakukan diet. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, sebagian besar produksi ikan dunia dikonsumsi langsung oleh manusia dan selebihnya untuk keperluan lainnya termasuk untuk bahan baku pakan ternak. Dalam laporan FAO (2010)

disebutkan bahwa sekitar 81% dari total produksi perikanan dunia (115,1 juta ton) digunakan sebagai bahan konsumsi langsung manusia sedangkan sisanya (19% atau 27,2 juta ton) digunakan sebagai produk non pangan, utamanya untuk *fishmeal* dan *fish oil*.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat, beberapa negara melakukan impor ikan dari pasar internasional. Dalam periode 2006-2008 nilai impor ikan dunia mengalami peningkatan sebesar 18,9% dari US\$ 90,1 milyar pada 2006 menjadi US\$ 107,1 milyar pada 2008. Importir terbesar perikanan dunia berdasarkan kawasan negara adalah Eropa dengan nilai impor pada 2008 mencapai US\$ 50,5 milyar, diikuti oleh Asia US\$ 32,9 milyar, Amerika US\$ 19,4 milyar, Afrika

2,9 milyar dan Oceania US\$ 1,3 milyar (FAO, 2010).

Sementara itu apabila dilihat secara individu, Jepang merupakan importir terbesar dengan nilai impor pada 2008 mencapai US\$ 14,9 milyar dengan peranan terhadap total impor dunia mencapai 14,0%, diikuti oleh Amerika Serikat US\$ 14,1 milyar (13,2%), Spanyol US\$ 7,1 milyar (6,6%), Perancis US\$ 5,8 milyar (5,4%), Italia US\$ 5,5 milyar (5,1%), serta China US\$ 5,1 milyar (4,8%). Perkembangan impor perikanan dunia berdasarkan negara pengimpor adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4 memperlihatkan bahwa pada 2008 impor 15 negara utama pengimpor dunia memiliki peranan hampir 75% dari total impor perikanan dunia, dan

**Tabel 4. Perkembangan Impor Perikanan Dunia, 2006-2008
(Ribuan US\$)**

Negara Tujuan	2006	2007	2008	Perubahan (%) 2007/2006	Perubahan (%) 2008/2007	Pangsa 2008
Japan	13,97	13,18	14,95	-5,63	13,37	13,95
USA	13,27	13,63	14,14	2,71	3,70	13,19
Spain	6,36	6,98	7,10	9,77	1,73	6,63
France	5,07	5,37	5,84	5,86	8,75	5,45
Italy	4,72	5,14	5,45	9,05	6,02	5,09
China	4,13	4,51	5,14	9,35	14,01	4,80
Germany	3,74	4,28	4,50	14,43	5,22	4,20
UK	3,71	4,14	4,22	11,49	1,93	3,94
Denmark	2,84	2,89	3,11	1,72	7,74	2,90
Korea Rep.	2,75	3,09	2,93	12,26	-5,24	2,73
Netherland	2,28	2,61	2,92	14,49	11,67	2,73
Sweden	2,03	2,53	2,76	24,82	9,25	2,58
Russian Fed.	1,44	2,02	2,42	40,22	20,05	2,26
Hongkong	2,04	2,22	2,41	9,27	8,51	2,25
Thailand	1,54	1,71	2,40	11,47	39,98	2,24
Sub Total	69,88	74,32	80,30	6,35	8,05	74,95
Lainnya	20,17	23,72	26,83	17,61	13,10	25,05
Total Dunia	90,05	98,04	107,13	8,87	9,27	100,00

Sumber: FAO (2010), diolah

impor ke 15 negara tersebut mengalami peningkatan sebesar 8,0% pada 2008 dibandingkan pada 2007. Selama kurun waktu yang sama (2007-2008), 14 negara mengalami peningkatan impor kecuali Korea Selatan yang impornya menurun 5,2%. Penurunan impor tersebut antara lain karena negara ini telah berhasil meningkatkan produksi ikan tangkapnya sebesar 4,0% yaitu dari 1,87 juta ton pada 2007 menjadi 1,94 juta ton pada 2008 (lihat Tabel 2).

Dari sisi ekspor dalam kurun waktu 2007-2008 terjadi peningkatan ekspor perikanan dunia yang cukup signifikan yaitu 105,2% sehingga pada 2008 nilainya mencapai US\$ 191,9 milyar. Enam belas negara pemasok perikanan ke pasar dunia sebagian besar mengalami peningkatan ekspor kecuali 2 negara yang mengalami penurunan yaitu Kanada dan Inggris dengan penurunan masing-masing sebesar sekitar 0,2% dan 3,7%. Penurunan ekspor kedua negara tersebut terkait dengan adanya penurunan produksi ikan hasil tangkapan di masing-masing negara sebesar 6,8% dan 3,8%. Negara yang mengalami peningkatan ekspor cukup tinggi adalah Peru dengan peningkatan 23,5%, Vietnam 20,3%, Indonesia 17,7%, Thailand 14,4%, dan Denmark 11,5%.

Dilihat dari peranan masing-masing negara pemasok terhadap total ekspor perikanan dunia, ternyata China merupakan pemasok utama. Namun

demikian peranannya terhadap total ekspor perikanan dunia terlihat menurun, dari sebesar 9,9% pada 2007 menjadi 5,3% pada 2008 (Tabel 5). Penurunan pangsa pasar dalam kurun waktu yang sama (2007-2008) juga dialami oleh beberapa negara pemasok utama lainnya seperti Norwegia, Thailand, Denmark, Vietnam, Amerika Serikat dan lain sebagainya. Indonesia juga mengalami penurunan pangsa pasar dari 2,2% pada 2007 menjadi 1,3% pada 2008.

Konsumsi ikan dunia diperkirakan akan terus mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya konsumsi ikan laut per kapita. Data FAO (2001) memperlihatkan bahwa pada 1970 konsumsi ikan laut perkapita adalah 11,5 kg dan meningkat menjadi 12,5 kg pada 1980, dan 14,4 kg pada 1990. Kenaikan ini terus terjadi, sehingga menjadi 16,4 kg pada 2005 dan 17,1 kg pada kurun waktu 2007-2008. Peningkatan konsumsi tersebut tentu saja memberi peluang bagi setiap negara produsen perikanan untuk dapat meningkatkan pangsa pasar mereka di masa yang akan datang. Bagi Indonesia, hal ini tidak saja menjadi peluang tapi sekaligus tantangan mengingat pesaing tidak saja datang dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Norwegia, Kanada dan negara-negara Uni Eropa tetapi juga dari negara-negara sedang berkembang seperti China, Thailand, Vietnam, dan Peru.

**Tabel 5. Perkembangan Ekspor Perikanan Dunia, 2006-2008
(Ribuan US\$)**

Negara Tujuan	2006	2007	2008	Perubahan (%)		Pangsa	
				2007/2006	2008/2007	2007	2008
Cina	8,97	9,25	10,11	3,15	9,34	9,89	5,27
Norway	5,50	6,23	6,94	13,17	11,38	6,66	3,61
Thailand	5,27	5,71	6,53	8,39	14,43	6,10	3,40
Denmark	3,99	4,13	4,60	3,56	11,45	4,41	2,40
Vietnam	3,37	3,78	4,55	12,21	20,26	4,04	2,37
USA	4,14	4,44	4,46	7,09	0,59	4,74	2,32
Chile	3,56	3,68	3,93	3,39	6,91	3,93	2,05
Canada	3,66	3,71	3,71	1,42	-0,15	3,97	1,93
Spain	2,85	3,23	3,47	13,41	7,27	3,45	1,81
Netherland	2,81	3,28	3,39	16,68	3,46	3,51	1,77
Rusia Fed	2,12	2,36	2,62	11,46	10,78	2,53	1,36
Indonesia	1,96	2,10	2,47	7,35	17,73	2,25	1,29
Germany	1,82	2,28	2,47	24,88	8,63	2,43	1,29
Peru	1,77	1,96	2,42	10,85	23,47	2,10	1,26
UK	1,94	2,20	2,12	13,48	-3,72	2,35	1,10
Iceland	1,81	2,03	2,09	11,96	3,01	2,17	1,09
Sub Total	55,54	60,37	65,89	8,70	9,15	64,51	34,32
Lainnya	30,55	33,21	126,09	8,70	279,74	35,49	65,68
Total Dunia	86,09	93,57	191,98	8,70	105,17	100,00	100,00

Sumber : FAO (2010), diolah

Kinerja Ekspor Perikanan Indonesia

Sebagai salah satu negara produsen perikanan terbesar dunia, baik perikanan tangkap maupun budidaya, Indonesia juga merupakan salah satu pemain dalam perdagangan komoditas perikanan internasional. Sebagai eksportir, posisi Indonesia tahun 2008 berada pada urutan ke 12, dengan kontribusi terhadap total ekspor komoditas perikanan dunia sebesar sekitar 2,4%. Data FAO (2010) memberikan gambaran bahwa meskipun produksi perikanan tangkap dan budidaya Thailand berada dibawah posisi Indonesia sebagaimana terlihat pada Tabel 2 dan 3, akan tetapi negara tersebut mampu menempatkan dirinya sebagai eksportir terbesar ketiga dunia setelah China dan Norwegia yang kontribusi mereka terhadap total ekspor dunia pada tahun 2008 masing-masing sebesar 9,9%

dan 6,8%. Begitupun dengan Vietnam, negara ini mampu menduduki posisi kelima dengan kontribusi pada tahun yang sama sebesar 4,5%.

Apabila melihat kondisi Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan pantai yang cukup panjang dibandingkan dengan kedua negara anggota Asean tersebut, seyogyanya Indonesia mampu meningkatkan perannya baik dalam produksi maupun ekspor komoditas perikanan. Namun demikian, masih banyak kendala yang dihadapi Indonesia dalam pembangunan sektor perikananannya, antara lain terjadinya *over fishing*, masih lemahnya armada tangkap nasional, serta masih maraknya aksi *illegal fishing*. Terkait dengan kinerja produksi perikanan tangkap, Satria (2010) menjelaskan bahwa dari 9 wilayah pengelolaan perikanan, saat ini sebagian

besar sudah over fishing seperti di Selat Malaka dan Laut Jawa. Digambarkan pula bahwa kalau pada beberapa waktu yang lalu, dengan menebarkan 1000 pancing terdapat 8 ekor tuna yang tertangkap, saat sekarang hanya 4 ekor tuna saja yang tertangkap.

Sementara itu di sub sektor perikanan budidaya, Indonesia memiliki potensi yang cukup besar, karena selain didukung oleh ketersediaan lahan yang luas, juga karena banyaknya jenis ikan, ketersediaan sumber daya manusia, dan adanya peluang pasar yang besar baik di dalam maupun luar negeri. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dirasakan dalam pengembangan sub sektor perikanan budidaya, antara lain masalah permodalan. Kendala tersebut menyebabkan potensi yang ada belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terlihat hanya sekitar 1% yang telah dimanfaatkan dari potensi perikanan budidaya di Indonesia yang melimpah.

Data BPS (2011) menunjukkan bahwa selama periode 2005-2009 nilai ekspor ikan dan produk perikanan mengalami peningkatan 12,9% per tahun dan pada

periode 2009-2010 telah meningkat 23,8%. Selama periode tersebut nilai ekspor ikan dan produk perikanan mencapai US\$ 864,8 juta atau memiliki peran sebesar 0,8% terhadap total ekspor non migas. Di sisi lain, volume ekspornya mengalami penurunan 1,9% per tahun selama periode 2005-2009, sedangkan pada periode 2009-2010 terjadi peningkatan volume ekspor sebesar 41,0% sehingga menjadi 556,6 ribu ton pada 2010 dari 394,7 ribu ton pada 2009.

Dalam pada itu, nilai ekspor komoditas udang yang merupakan salah satu komoditas utama ekspor nasional selama periode 2005-2009 juga mengalami penurunan hampir 2,0% per tahun. Akan tetapi, selama periode 2009-2010 terjadi peningkatan sebesar 11,2% sehingga menjadi US\$ 762,0 juta pada 2010. Selama periode 2005-2009 volume ekspor udang mengalami penurunan 3,7% per tahun dan selama periode 2009-2010 juga menurun sebesar 1,2% sehingga menjadi 123,3 ribu ton pada 2010.

Tabel 6. Perkembangan Ekspor Perikanan Nasional, 2005-2010

Uraian	Satuan	2005	2009	2010	Perub (%) 2010/2009	Tren (%) 2005-2009
Ikan dan Produk Perikanan						
Nilai	Ribu US\$	587,188.3	864,315.8	1,075,744.0	24.46	12.93
Volume	Ton	520,967.3	492,329.2	675,678.5	37.24	-1.92
Udang						
Nilai	Ribu US\$	935,331.0	845,222.7	939,851.7	11.20	-1.98
Volume	Ton	146,389.6	124,836.9	123,283.6	-1.24	-3.68

Sumber : BPS (2011), diolah

Dari gambaran pada Tabel 6, terlihat bahwa pertumbuhan nilai ekspor ikan dan produk perikanan selama periode 2005-2009 disebabkan oleh kenaikan harga di pasar internasional, karena volume ekspor ikan dan produk perikanan pada periode tersebut ternyata mengalami penurunan. Akan tetapi selama periode 2009 - 2010 kenaikan ekspor ikan dan produk perikanan lebih disebabkan oleh peningkatan volume ekspor. Untuk udang, selama periode 2005-2009 penurunan ekspor disebabkan oleh penurunan volume, dan selama periode 2009-2010 peningkatan ekspor lebih disebabkan oleh peningkatan harga di pasar internasional.

Data Bank Dunia menunjukkan bahwa harga udang di pasar internasional (Meksiko) mengalami peningkatan selama beberapa bulan terakhir tahun 2010. Pada periode Januari-September harga rata-rata mencapai US 874 c/ kg. Meningkatnya harga udang di pasar internasional ini didorong oleh meningkatnya permintaan sebagai dampak recovery perekonomian global dan penurunan pasokan udang dari beberapa negara produsen udang. Laporan Globefish Highlight (FAO, 2010) menyebutkan bahwa Vietnam, China, Bangladesh dan Indonesia mengalami penurunan produksi udang, antara lain akibat faktor cuaca. Sebagai akibat penurunan tersebut maka pasokan ke pasar global menjadi terbatas.

Berdasarkan data BPS (2011), ekspor ikan dan produk perikanan

Indonesia ditujukan terutama ke Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Hongkong, Thailand, China, Malaysia, dan Korea Selatan. Selama periode 2009-2010 ekspor ikan dan produk perikanan ke Jepang naik sebesar 11,3% dan selama periode lima tahun (2005-2009) juga meningkat sebesar 7,9%. Selanjutnya negara tujuan ekspor kedua adalah Amerika Serikat dengan kinerja ekspor Indonesia yang bagus, naik sebesar 13,1% dalam periode 2009-2010. Ekspor perikanan Indonesia pada periode yang sama juga mengalami kenaikan, secara berurutan ke Singapura sebesar 40,3%, Thailand 13,6%, China 47,4%, dan Malaysia 9,2%. Perkembangan ekspor ikan dan produk perikanan ke beberapa negara tujuan utama ekspor adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 7.

Selain ikan dan produk perikanan, komoditas lain dalam kelompok perikanan adalah udang, dimana sampai saat ini komoditas tersebut masih menjadi komoditas andalan ekspor penghasil devisa selain rumput laut dan ikan tuna. Ekspor udang Indonesia ditujukan terutama ke Amerika Serikat, Jepang, Belgia, Hongkong, Perancis, dan Puerto Rico. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada tahun 2010 nilai ekspor udang ke pasar internasional lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ekspor tersebut disebabkan oleh meningkatnya ekspor ke Amerika Serikat sebesar 18,1%, Jepang 9,0%, Belgia 10,6%,

**Tabel 7. Perkembangan Ekspor Ikan dan Produk Perikanan Indonesia
2005-2010**

Negara Tujuan	NILAI : JUTA US\$						Perubahan (%) '10/'09	Pertumbuhan/tahun (%) 2005-2009
	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
Jepang	164,8	161,3	188,1	205,7	213,7	237,8	11,30	7,92
Amerika Serikat	99,7	97,9	139,4	167,7	169,7	192,0	13,12	17,38
Singapura	64,8	56,1	58,2	64,7	61,2	85,8	40,27	0,28
Hongkong	35,7	40,2	56,8	57,3	57,0	49,5	-13,22	13,76
Thailand	9,4	39,6	49,5	90,9	52,7	59,8	13,62	53,29
China	39,4	25,9	16,9	36,4	45,7	67,4	47,38	6,56
Malaysia	26,4	22,7	35,9	45,7	43,6	47,6	9,21	18,55
Korea Selatan	20,9	18,8	40,9	44,2	38,9	27,4	-29,54	23,33
Taiwan	28,6	21,5	21,6	30,3	33,2	39,5	19,09	6,59
Vietnam	4,6	7,8	24,8	33,0	32,9	77,7	136,24	70,91
Italia	11,8	9,7	13,8	19,0	15,8	39,2	148,68	13,30
Australia	6,4	7,0	10,7	10,7	10,1	3,2	-67,73	14,09
Belgia	8,0	8,3	7,4	9,6	8,5	15,4	81,18	2,67
Sri Lanka	3,1	3,5	5,5	6,0	7,7	13,9	80,55	26,18
Belanda	12,1	9,0	3,4	4,7	6,7	8,4	24,81	-16,64
Sub Total	535,9	529,4	672,8	825,8	797,3	964,7	21,00	13,19
Lainnya	51,3	45,7	57,3	69,5	67,1	111,1	65,66	10,03
Total Ekspor	587,2	575,1	730,2	895,4	864,3	1.075,7	24,46	12,93

Sumber : BPS (2011), diolah

Hongkong 14,0%, Perancis 77,3%, dan Puerto Rico 21,3%.

Sementara itu, pada periode 2009-2010, nilai ekspor ke Inggris yang merupakan negara tujuan ekspor udang Indonesia ke-3, menurun sebesar 59,1%, begitupun dengan ekspor ke Belanda dan Singapura, masing-masing menurun secara berturut-turut hampir sebesar 18,0% dan 7,3%. Penurunan ekspor ke beberapa negara tersebut disebabkan oleh penurunan volume ekspor. Turunnya volume ekspor ke Belanda dan Belgia disebabkan oleh ketatnya persyaratan yang diterapkan di Uni Eropa, khususnya yang terkait dengan standard keamanan

dan kesehatan yang tinggi, terutama yang berhubungan dengan kandungan antibiotik pada komoditas udang.

Apabila kinerja ekspor perikanan Indonesia ke Belgia terus menurun sejak tahun 2007 sedangkan impor perikanan negara tersebut cenderung meningkat, maka hal tersebut menunjukkan terjadi penurunan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar tersebut. Belgia merupakan pasar perikanan yang cukup penting dimana posisinya sebagai pengimpor ke 16 besar dunia dengan total impor pada 2008 mencapai US\$ 2,3 milyar.

Tabel 8. Perkembangan Ekspor Udang Indonesia, 2005-2010

Negara Tujuan	NILAI : JUTA US\$						Perubahan (%) '10/'09	Pertumbuhan/tahun (%) 2005-2009
	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
Amerika Serikat	335,2	393,0	413,5	500,3	349,2	412,4	18,08	3,29
Jepang	367,8	417,3	331,1	322,9	305,2	332,7	9,03	-6,10
Inggris	43,2	57,5	48,8	48,2	34,1	13,9	-59,13	-6,27
Belgia	54,3	69,1	66,3	53,8	25,2	40,5	60,93	-16,37
Hongkong	23,3	26,8	31,1	22,1	19,5	22,2	14,01	-5,33
Perancis	11,5	5,0	3,8	4,7	14,3	25,3	77,26	3,56
Belanda	8,3	6,9	8,3	9,1	11,5	9,4	-17,97	9,77
Singapura	9,8	10,4	9,9	9,9	11,5	10,6	-7,30	2,63
Puerto Rico	0,7	3,0	5,6	7,5	11,4	13,8	21,30	93,99
Rep.Rakyat Cina	16,5	14,5	6,7	25,6	8,7	5,0	-41,96	-6,87
Vietnam	3,5	4,0	5,4	6,7	6,5	2,6	-59,80	19,13
Italia	8,1	7,6	5,4	7,3	6,3	7,3	15,32	-5,27
Malaysia	5,8	7,2	9,6	6,4	5,5	5,5	0,99	-2,36
Taiwan	4,2	3,7	5,0	6,8	4,8	5,5	16,13	9,11
Australia	7,3	8,6	4,8	3,8	4,5	2,2	-51,30	-16,33
Jerman	6,4	9,6	8,9	9,8	4,0	5,6	39,84	-8,73
Korea Selatan	4,2	4,5	3,9	4,7	3,6	4,0	10,55	-2,35
Mesir	-	0,4	3,8	4,0	3,5	4,7	34,23	-
Sub total	910,0	1.049,1	971,8	1.053,8	829,2	923,4	11,36	-1,80
Lainnya	25,3	18,6	21,0	17,1	16,1	16,5	2,54	-9,48
Total Ekspor	935,3	1.067,8	992,9	1.070,9	845,2	939,9	11,20	-1,98

Sumber : FAO (2010), diolah

Menurunnya kinerja ekspor udang selama periode 2005-2009, sebagaimana terlihat pada penurunan nilai ekspor sebesar 1,8% per tahun, tidak berarti menurunnya produksi udang Indonesia. Produksi udang nasional selama periode 2004-2008 mengalami peningkatan, yakni sebesar hampir 9,2% per tahun (Tabel 9). Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya produksi udang hasil budidaya yang cukup tinggi. Di

sisi lain, walaupun produksi udang hasil tangkapan relatif kecil akan tetapi pada periode 2004-2008, produksi tersebut tetap menunjukkan kenaikan. Sebagaimana terlihat pada Tabel 9, produk tersebut meningkat sekitar 1.9% per tahun. Kenyataan ini menunjukkan bahwa ada faktor selain faktor produksi yang mengakibatkan penurunan kinerja ekspor udang Indonesia selama periode 2005-2009.

Tabel 9. Perkembangan Produksi Udang Indonesia, 2004-2008
(Ton)

Uraian	2004	2005	2006	2007	2008	Tren pertahun 04-08 (%)
Total Produksi	446.332	457.662	527.915	585.617	611.798	9,17
Udang budidaya	238.857	280.629	327.610	360.096	409.594	14,20
Udang Hasil Tangkapan	207.475	177.033	200.305	225.521	202.204	1,92
- Udang Putih	68.699	61.950	59.838	81.193	73.870	4,24
- Udang Krosok	2.763	6.456	4.342	6.819	5.922	17,11
- Udang Ratu/Raja	134	126	328	661	1.011	76,81
- Udang Windu	34.533	30.380	37.460	42.036	26.492	-2,03
- Udang Barong	5.439	6.648	5.254	4.705	9.896	8,89
- Udang Lainnya	95.907	71.473	93.083	90.107	85.013	-0,09

Sumber : Statistik Kelautan dan Perikanan (2008)

Pada tahun 2009 produksi udang diperkirakan mencapai 348 ribu ton terdiri dari udang windu 103 ribu ton dan vaname 245 ribu ton. Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan produksi udang nasional sebesar 699 ribu ton pada 2014 atau meningkat sebesar 74,8% selama periode 2010-2014. Untuk mencapai target produksi tersebut dibutuhkan benih udang sebanyak 43,22 juta ekor dan induk sebanyak 2,97 juta ekor. Pengembangan produksi udang dihadapkan pada kendala kualitas induk dan benih serta harga induk yang relatif tinggi. Harga induk udang vaname impor saat ini US\$ 35 per ekor. Dibandingkan dengan negara pesaing, produksi udang Indonesia masih di bawah China, Thailand dan Vietnam, yang pada 2010 masing-masing memproduksi kurang lebih sebanyak 1,3 juta ton, 560 ribu ton dan 370 ribu ton.

Sementara itu ekspor ke Jepang yang sempat mengalami penurunan, kembali meningkat pada periode Januari-

Oktober 2010. Hal ini antara lain didorong oleh adanya penurunan fasilitas bea masuk sebagai dampak IJ-EPA. Seperti diketahui bahwa sebelum dilaksanakan IJ-EPA, ekspor udang Indonesia ke Jepang dikenakan bea masuk sebesar 4,8% untuk udang segar dan 7,3% untuk produk olahan.

Ditinjau dari jenis produk yang diekspor ke mancanegara berdasarkan HS 10 dijit, terdapat beberapa komoditas yang memiliki nilai ekspor tinggi. *Shrimps and prawns, frozen* merupakan komoditas ekspor utama perikanan dengan nilai selama periode Januari-Oktober 2010 mencapai US\$ 638,8 juta atau meningkat 11,4% dibanding periode yang sama tahun 2009. Komoditas ekspor utama berikutnya adalah tunas, skipjack & bonito (sarda spp), *prepared/preserved in airtight container* sebesar US \$ 137,6 juta pada Januari-Oktober 2010, walaupun mengalami penurunan sebesar 6,4% dari keadaan Januari-Oktober 2009, diikuti oleh *other fish fillets*,

Tabel 10. Perkembangan Ekspor Beberapa Komoditas Perikanan, 2005-2010 (Januari-Oktober)

NO.	HS	URAIAN	NILAI : US\$						Perubahan (%)	Pertumbuhan/tahun (%)	
			2005	2006	2007	2008	2009	Jan-Okt'09	Jan-Okt'10	Jan-Okt'10/09	2005-2009
1	0306130000	Shrimps and prawns, frozen	804.022,7	939.711,4	792.386,0	822.922,2	693.881,9	573.270,0	638.762,8	11,42	-4,18
2	1604141000	Tunas, skipjack & bonito, prepared/preserved	121.869,2	121.297,1	134.605,1	156.956,4	174.752,3	146.914,4	137.571,7	-6,36	10,28
3	0304290000	Other fish fillets, frozen	16.762,2	20.021,6	104.247,7	181.990,8	155.245,3	124.874,5	158.029,8	26,55	94,62
4	1605209900	Oth aquatic invertebrata, prepared or preserved	112.614,2	90.459,2	102.413,1	221.360,4	143.504,2	117.080,9	119.514,0	2,08	14,79
5	1605201100	Shrimps paste in airtight containers prepared or preserved	-	52.262,2	32.134,0	-	90.810,9	72.165,9	70.677,6	-2,06	-
6	0303791090	Other marine fish, excl.fillets, livers and roes, frozen	64.967,5	75.569,8	41.188,0	63.188,7	53.176,0	37.936,5	85.948,9	126,56	-5,63
7	0302390000	Oth tunas, excl.fillets, livers & roes, fresh or chilled	66.321,3	37.510,9	30.771,3	62.091,8	50.367,8	40.040,3	48.442,3	20,98	-0,46
8	0303390000	Oth flat fish, excl.fillets, livers & roes, frozen	22.054,6	5.655,2	22.050,1	53.114,4	40.027,1	31.329,8	34.276,4	9,41	40,94
9	1605109000	Crabs in airtight containers prepared or preserved	-	-	26.926,3	-	34.690,4	27.670,6	37.144,1	34,24	-
10	0307491000	Cuttle fish and squid, frozen	14.170,3	18.320,8	29.593,3	32.837,9	34.399,6	26.240,3	37.502,7	42,92	26,58
11	0306140000	Crabs, frozen	20.824,9	18.750,2	38.778,2	42.094,2	34.213,2	28.713,7	40.416,9	40,76	19,74
12	1605101000	Crabs in airtight containers prepared or preserved	25.231,3	34.337,9	41.151,3	81.085,3	33.807,9	28.752,8	27.698,7	-3,67	15,54
13	0306239900	Oth shrimps and prawns, not frozen	-	571,1	144,8	-	31.444,6	29.775,0	5.488,7	-81,57	-
14	0302320000	Yellowfin tunas,excl.fillets, livers & roes, fresh or chilled	27.311,0	29.918,3	36.186,0	34.725,2	30.925,0	26.806,9	29.602,4	10,43	4,06
15	0302290000	Oth flat fish, excl.fillet,liver & roes fresh or chilled	4.777,8	1.302,2	22.376,4	25.875,5	30.904,7	26.633,3	21.825,1	-18,05	95,87
16	0304990000	Other fish meat (whether or not minced) frozen	-	-	20.900,8	-	29.141,0	22.999,0	31.348,4	36,30	-
17	0307591000	Octopus, frozen	12.240,8	16.756,4	29.670,8	35.679,3	28.744,8	24.437,4	27.381,7	12,05	27,93
18	0306249900	Other crabs, not frozen not in airtight containers	-	17.381,5	22.251,5	-	28.348,0	21.225,7	38.701,0	82,33	-
19	0302691090	Other marine fish excl.fillets, livers & roes, fresh or chilled	34.208,5	32.039,8	20.772,7	41.304,1	25.947,8	20.937,6	24.170,9	15,44	-2,94
20	0305599000	Other dried fish, salted/unsalted but not smoked	20.473,0	19.544,2	21.131,6	19.054,5	23.312,5	18.910,9	14.926,8	-21,07	2,37
21	0305490000	Other smoked fish, including fillets	12.278,8	8.235,7	15.164,2	24.282,5	22.976,6	18.529,9	17.987,3	-2,93	26,29
22	0303791010	Kerapu (cromilepte altivelis,epinephelus,frozen)	-	-	4.037,7	-	22.630,3	17.276,1	36.930,2	113,77	-
23	1604131100	Sardines, prepared/preserved in airtight container	274,6	345,7	7.711,2	15.754,9	21.861,7	16.936,2	20.241,5	19,52	251,61
24	0303430000	Skipjack or stripe, excl.fillets, livers and roes, frozen	4.251,4	6.452,1	18.235,1	29.398,0	20.892,7	16.179,2	25.075,8	54,99	60,01
25	0303290000	Other salmonidae, excl.fillets, livers and roes, frozen	12.250,2	13.978,2	26.397,0	39.689,2	20.547,3	16.963,9	14.695,6	-13,37	23,10

Sumber : BPS (2011), diolah

frozen sebesar US\$ 158,0 juta pada Januari-Oktober 2010 yang meningkat sebesar 26,5% dari keadaan Januari-Oktober 2009.

Beberapa diantara komoditas perikanan yang memiliki nilai ekspor tinggi tersebut juga memiliki kecenderungan kenaikan ekspor selama periode 2005-2009. Komoditas tersebut antara lain fillet ikan beku lainnya dengan peningkatan sebesar 94,6% per tahun; other fish, excl. fillets, hati & telur, beku dengan kenaikan sebesar 40,9%; ikan sotong dan cumi-cumi, beku yang mengalami kenaikan sebesar 26,6%; dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan dengan kenaikan sebesar 14,8%.

Sementara itu, dalam periode yang sama juga terdapat beberapa komoditas dengan kecenderungan penurunan ekspor. Komoditas tersebut antara lain udang beku dengan penurunan sebesar 4,2%; ikan laut lainnya, di luar fillets, hati dan telur, beku dengan penurunan sebesar 5,6%; dan ikan laut lainnya, fillet, hati dan telur, segar atau dingin yang mengalami penurunan sebesar 2,9%. Apabila informasi di atas dibandingkan dengan kinerja ekspor udang beku dunia yang cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir, maka terindikasi bahwa produk udang Indonesia mengalami penurunan daya saing di pasar internasional. Hal ini

juga sejalan dengan menurunnya pangsa pasar Indonesia di pasar dunia pada beberapa jenis komoditas perikanan antara lain:

- *Tunas, skipjack & bonito (HS 030239)*

Pangsa pasar Indonesia pada 2008 sebesar 1,4% menurun menjadi 1,2% pada 2009. Beberapa negara pesaing Indonesia seperti Italia, Portugal, Perancis, Sri Lanka, Thailand serta Equador mengalami peningkatan pangsa pasar selama periode tersebut.

- *Shrimps & prawns, whether/not in shell (030613)*

Indonesia mengalami penurunan pangsa pasar dari 10,6% menjadi 9,4% sedangkan negara pesaing dengan peningkatan pangsa pasar adalah Thailand, Vietnam, India, China, Bangladesh serta Meksiko.

- *Tunas, skipjack & bonito (Sarda spp) (HS160414)*

Pangsa pasar Indonesia mengalami sedikit penurunan dari 3,3% menjadi 3,2%, disisi lain beberapa negara pesaing mengalami peningkatan pangsa pasar yaitu Equador, Seychelles, Pantai Gading, serta Ghana.

- *Crab, prepared/preserve (HS 160510)*

Indonesia merupakan pemasok kedua setelah China namun pangsa pasarnya mengalami penurunan dari 17,6% menjadi 16,3%, sedangkan Vietnam, Korea Selatan, Venezuela,

India dan Meksiko mengalami peningkatan pangsa pasar.

- *Sardines (HS 030261)*

Penurunan pangsa pasar juga terjadi pada komoditas ini dimana pada tahun 2008 pangsa pasar Indonesia mencapai hampir 0,2% akan tetapi pada tahun 2009 menurun menjadi mendekati 0%. Akan tetapi, pada periode yang sama beberapa negara mengalami kenaikan pangsa pasar terutama negara-negara Eropa seperti Spanyol, Portugal, Swedia, Italia, Kroasi, Finlandia dan Yunani.

Daya Saing Komoditas Perikanan Indonesia di Pasar Internasional

Berdasarkan data dari WITS Comtrade diperoleh gambaran bahwa selama periode 2007-2009 terdapat 46 kelompok komoditas perikanan dalam HS 6 digit yang memiliki daya saing kuat di pasar internasional dengan nilai indeks RCA >1. Beberapa komoditas memiliki daya saing yang terus menguat, menurun dan fluktuatif. Tabel 11 menyajikan beberapa kelompok komoditas perikanan dengan RCA >1 berdasarkan pola perubahan.

Persaingan pasar yang semakin ketat dewasa ini sebagai dampak globalisasi perdagangan dunia mendorong setiap negara untuk mengambil langkah-langkah yang efektif guna meningkatkan daya saing produknya. Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) dan tenaga kerja yang melimpah dengan upah yang kompetitif, yang merupakan faktor pendukung daya saing, namun demikian

Tabel 11. Beberapa komoditas perikanan menurut pola perubahan RCA, 2007 - 2009

Pola perubahan RCA	RCA > 1	RCA < 1
Cenderung Meningkat	Eels, excluding fillets, livers and roes (hs 030266); tunas, nesoi, excluding fillets, livers and roes (hs 030239); salmonidae nesoi, excluding fillets, livers and roes, frozen (hs 030329); Toothfish, frozen fillets (HS 030422); Flatfish, nesoi, excluding fillets, livers and roes fresh or chilled (HS 30229); dan Sardines, sardinella prepared or preserved (HS 160413)	Crustaceans, Nesoi, Live, Fresh, Chilled, Dried, Salted Or In Brine, Or Cooked By Steaming Or Boiling In Water, Not Frozen (hs 030629); Dogfish And Other Sharks, Excluding Fillets, Livers And Roes, Fresh Or Chilled (hs 030365); Albacore Or Longfinned Tunas (Thunnus Alalunga) Except Fillets, Livers And Roes, Fresh Or Chilled (HS 030231);
Cenderung Menurun	yellowfin tunas excluding fillets, livers and roes, fresh or chilled (030232); Crab, prepared or preserved, including products containing fish meat (160510); Tunas nesoi, excluding fillets, livers and roes, frozen (HS 030349)	Lobsters (Homarus Spp.), Live, Fresh, Chilled, Dried, Salted Or In Brine, Or Cooked By Steaming Or Boiling In Water, Not Frozen (030622); Swordfish (Xiphias Gladius), Fresh/Chilled (Excl. Fillets/Other Fish Meat Of 03.04/Livers & Roes) (030267); Swordfish (Xiphias Gladius), Frozen (Excl. Fillets/Other Fish Meat Of 03.04/Livers & Roes) (HS 030361); Dogfish And Other Sharks, Excluding Fillets, Livers And Roes, Frozen (030375)
Fluktuasi	Swordfish frozen fillets (hs 030421); flatfish, nesoi, excluding fillets, livers and roes, fresh or chilled (hs 030229) ; crab, prepared or preserved, including products containing fish meat (hs 030624)	Molluscs And Other Aquatic Invertebrates (Clams, Abalone, Scallops, Squid, Etc.), Prepared Or Preserved, Including Products Containing Fish Meat (hs 160590); Oysters, In The Shell Or Not, Live, Fresh, Chilled, Frozen, Dried, Salted Or In Brine (HS 030710) ; Mackerel (Scomber Scombrus, Scomber Australasicus, Scomber Japonicus), Excluding Fillets, Livers And Roes, Fresh Or Chilled (hs 030264)

Sumber: UN Comtrade (2011), diolah

kedua hal tersebut ternyata tidak cukup untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Thailand dan Vietnam merupakan contoh negara yang sumber daya ikan relatif terbatas dibanding Indonesia, akan tetapi pada lingkup global, daya saing komoditas perikanan kedua negara tersebut lebih tinggi dari daya saing komoditas perikanan Indonesia.

Menurut Porter (1990) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keunggulan kompetitif disamping SDA, yaitu ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya pengetahuan (ilmu pengetahuan dan teknologi), sumber daya modal dan sumber daya

infrastruktur, keadaan permintaan dan tuntutan mutu, eksistensi industri terkait dan pendukung yang kompetitif secara internasional, hubungan dan koordinasi dengan pemasok terutama dalam menjaga dan memelihara *value chain*, strategi perusahaan, dan struktur serta sistem persaingan antar perusahaan. (seperti yang ditulis oleh Naftali, 2006).

Lemahnya daya saing beberapa produk perikanan sebagaimana telah ditunjukkan di atas tidak terlepas dari berbagai kendala yang masih dihadapi oleh industri perikanan di dalam negeri dan masalah kebijakan di negara tujuan ekspor. Berbagai kendala di dalam negeri

diantaranya seperti para pelaku industri perikanan seperti petani dan pengusaha yang masih kesulitan untuk mendapatkan permodalan dari bank karena dianggap sektor perikanan merupakan usaha yang kurang menjanjikan. Kurang memadainya pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan dan kurang memadainya infrastruktur terutama jalan, listrik dan air juga menjadi kendala yang masih terus terjadi. Selain itu, sampai saat ini dalam sektor perikanan, promosi dan partisipasi stakeholders masih rendah. Dalam sisi kebijakan perdagangan, yang menjadi hambatan atau kendala diantaranya adalah masih tingginya tarif bea masuk bahan penolong industri perikanan di dalam negeri, antara lain kaleng; dan adanya hambatan tarif dan non tarif di negara tujuan ekspor, baik di negara maju maupun di negara sedang berkembang.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Selama periode 2007-2009 terdapat 46 kelompok komoditas perikanan dalam HS 6 digit yang memiliki daya saing kuat di pasar internasional dengan nilai indeks > 1. Dari 46 kelompok komoditas tersebut, beberapa diantaranya bahkan memiliki daya saing yang sangat kuat dan cenderung meningkat. Di sisi lain beberapa komoditas perikanan memiliki daya saing kuat, namun mengalami penurunan dan sebagian lagi mengalami fluktuasi.

Untuk meningkatkan daya saing maka perlu dilakukan berbagai upaya seperti meningkatkan promosi komoditas perikanan baik di pasar dalam maupun luar negeri, meningkatkan kualitas, mendorong perbankan untuk mempermudah akses permodalan, meningkatkan pembangunan infrastruktur, mendorong pengembangan produk bernilai tambah, serta menurunkan tarif bea masuk bahan penolong bagi industri pengolahan ikan di dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2011). Statistik Ekspor dan Impor. Jakarta: BPS.
- Bank Indonesia. (2010). Survei Kegiatan Dunia Usaha. Jakarta: BI.
- Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan. (2007). Masalah dan Kebijakan Peningkatan Produk Perikanan untuk Pemenuhan Gizi Masyarakat. Jakarta: DKP.
- Food and Agriculture Organization. (2010). Yearbook. Fishery and Aquaculture Statistics 2008.
- Food and Agriculture Organization. (2010). Globefish Highlights.
- Hamidah dan Suprihanti. (2006). Daya Saing Kakao Biji Indonesia Di Pasar Internasional. Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi (JDSE). Diunduh pada tanggal 11 Januari 2012 dari http://agriculture.upnyk.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=82:4-vol-7-no-1-juni-2006-titut-1&catid=52:2006&Itemid=88

- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2008). Statistik Kelautan dan Perikanan. Jakarta: KKP.
- Porter, M.E. (1994). Keunggulan Bersaing. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Naftali. (2006). Peningkatan Daya Saing Indonesia di Dalam Perdagangan Internasional. Diunduh tanggal 15 September 2011 dari <http://yohanli.wordpress.com/2008/07/30/peningkatan-daya-saing-indonesia-di-dalam-perdagangan-internasional/>.
- Pusat Data dan Informasi Perdagangan, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan. (2010). Statistik Ekspor. Jakarta: Pusdatin Perdagangan.
- Rakhmawan. (2009). Analisis Daya Saing Komoditi Udang Indonesia Di Pasar Internasional. Skripsi S1. Ekonomi dan Manajemen IPB. Bogor.
- Satria, A. (2010). "Indonesia Harus Ke Perikanan Budidaya". Diunduh Juni 2011 dari <http://saribincang.wordpress.com/2010/06/26/arif-satria-indonesia-harus-ke-perikanan-budidaya/>.
- Satria, A., Anggraini, E., dan Solihin, A. (2010). Globalisasi Perikanan: Reposisi Indonesia. Bogor: IPB Press.
- Solihin, A. (2004). Masalah Klasik Perikanan. Suara Karya, Desember 2004.

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN TARIF IMPOR SERAT KAPAS TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI SERAT KAPAS DI INDONESIA

An Analysis Impact of Cotton Import Tariff Policy on Cotton Farmer Welfare in Indonesia

Iwan Hermawan

Calon Peneliti pada Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data Informasi, Setjen DPR RI,
Gedung Nusantara I Lantai 2, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, iwan.hermawan@dpr.go.id

Naskah diterima: 28 Maret 2012
Disetujui diterbitkan: 12 Juni 2012

Abstrak

Serat kapas sebagai bahan baku utama turut mendorong perkembangan industri TPT, namun hampir seluruhnya justru diimpor. Di sisi lain Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan tanaman serat kapas. Berdasarkan fenomena tersebut, serat kapas merupakan bagian dari sistem industri nasional dan intervensi Pemerintah diharapkan dapat mengamankan penerimaan negara dan meningkatkan kemandirian terhadap serat kapas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan tarif impor terhadap kesejahteraan petani kapas di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data runtut waktu dan pendekatan persamaan simultan yang dikonstruksikan dalam model ekonomi. Hasil analisis menunjukkan (1) kebijakan menaikkan tarif impor serat kapas belum mampu meningkatkan dan mencapai target produksi yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian meskipun kebijakan ini mampu meningkatkan kesejahteraan petani serat kapas di dalam negeri, (2) kombinasi kebijakan tarif impor dengan ekstensifikasi luas lahan tanaman kapas berdampak positif terhadap peningkatan produksi serat kapas di dalam negeri, meskipun memiliki dampak positif yang relatif kecil terhadap kesejahteraan petani dibanding kebijakan lainnya pada masa mendatang. Kombinasi kebijakan ini memiliki arti penting untuk mendorong produksi serat kapas di dalam negeri, dan (3) tanpa adanya kebijakan tarif impor serat kapas, kenaikan harga dunia serat kapas mampu memberikan dampak positif yang terbesar terhadap kesejahteraan petani serat kapas di dalam negeri.

Kata Kunci: Serat Kapas, Tarif Impor, Kesejahteraan Petani, Persamaan Simultan.

Abstract

Cotton is a raw material behind the rapidly expanding textile and product textile industry, which most of cotton is imported. On the other side Indonesia's area is potential for cotton cultivation. Due to that phenomenon, cotton is part of the national industrial system and government intervention is expected to ensure budget revenues and self sufficiency. This research is to analyze the impact of impor tariff policies on cotton farmer welfare. This research uses time series data, with simultaneous model. Based on the results showed that (1) policy of raising import tariff will not increase cotton production yet that set by the Ministry of Agriculture in 2014, although it can still improve cotton farmers welfare, (2) import tariffs policy combination with an area extension of cotton give positive impact on production, despite having positive impact on farmers welfare relatively small compared to other policy in the future. Combination of this policy has significant meaning in order to encourage cotton production in the country, and (3) without any policy of import tariff which followed by increasing of world price cotton is able to give the highest positive impacts to welfare of cotton farmers.

Keywords: Cotton, Import Tax, Farmer Welfare, Simultaneous Equations.

JEL Classification: F13, I31, Q17

PENDAHULUAN

Kapas (*Gossypium hirsutum* L.) merupakan salah satu bahan baku penting untuk mendukung perkembangan industri tekstil dan produk tekstil (TPT), termasuk industri kreatif. Kapas memiliki kemampuan mudah menyerap keringat atau bersifat higroskopis, dimana kelebihan ini belum dapat digantikan sepenuhnya oleh bahan baku non-serat kapas. Pemerintah juga menetapkan kapas sebagai salah satu komoditas prioritas bagi penerimaan devisa, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dalam negeri, dan substitusi impor.¹

Kebutuhan serat kapas untuk pasar di dalam negeri cenderung meningkat. Pada tahun 2011 kebutuhan serat kapas dalam negeri mencapai 700 ribu ton hingga 800 ribu ton.² Hal ini didorong oleh pertumbuhan industri pemintalan serat kapas sekitar 2% per tahun selama 15 tahun. Secara umum pertumbuhan kebutuhan bahan baku industri TPT meningkat dari 365 ribu ton menjadi 500 ribu ton atau meningkat

sekitar 3% per tahun.³ Di sisi lain dukungan produksi serat kapas di dalam negeri juga meningkat, dimana pada tahun 2005 produksinya hanya 2.2 ribu ton dan tahun 2011 meningkat menjadi 4.4 ribu ton.⁴

Peluang pengembangan tanaman kapas masih tinggi karena kesesuaian agroklimat. Bahkan hasil penelitian Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat merekomendasikan potensi lahan pengembangan tanaman kapas seluas 1.30 juta hektar yang tersebar di daerah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.⁵

Peningkatan harga serat kapas dunia menstimulasi pengusaha tekstil nasional beralih ke serat kapas dalam negeri.⁶ Namun meskipun harga tersebut meningkat ternyata tidak menurunkan impor serat kapas oleh Indonesia. Menurut Ade Sudrajat, Ketua Asosiasi Tekstil Indonesia, impor kapas Indonesia mencapai 99% dan hanya 1% dipenuhi dari kapas domestik. Pada tahun 2010

1 Kementerian Pertanian. (2010). Rencana strategis Kementerian Pertanian tahun 2010-2014. Jakarta: Kementerian Pertanian.

2 Falanta, Evilin. (2011). Walau Harga Naik, Industri Tekstil Tetap Genjot Impor Kapas. Diunduh pada tanggal 6 Maret 2012 dari <http://industri.kontan.co.id/news/walau-harga-naik-industri-tekstil-tetap-genjot-impor-kapas-1/2011/03>.

3 Direktorat Jenderal Perkebunan. (2009). Diskusi Perkapasan Nasional Dengan Tema: Strategi dan Kebijakan Pengembangan Budidaya Kapas Nasional. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.

4 Direktorat Jenderal Perkebunan. (2010). Luas areal dan produksi perkebunan seluruh Indonesia menurut pengusaha. Diunduh pada tanggal 19 Maret 2010 dari <http://ditjenbun.deptan.go.id/cigraph/index.php/viewstat/komodititutama/12-Kapas>.

5 W. I, et al. (2007). Bisnis Kapas Mulai Bernapas. Diunduh pada tanggal 19 Maret 2010 dari http://www.agrina-online.com/show_article.php?rid=7&aid=1039.

6 Basuki, Teger., Sahid, M., dan Wanita, Y. P. (2006). Pengembangan Kapas di Indonesia dan Permasalahannya. Diduh pada tanggal 4 Maret 2010 dari <http://balittas.litbang.deptan.go.id/ind/images/kapasrami/pengembangan%20kapas%20di%20indonesia.pdf>.

nilai impor kapas sebesar US\$ 1.70 miliar dan tahun 2011 mencapai di atas US\$ 2 miliar. Indonesia mengimpor kapas dari Amerika Serikat, Brazil, dan Australia.⁷

Tingginya impor serat kapas juga memberikan indikasi positif jika industri TPT dalam negeri bergairah, namun dalam jangka panjang ketergantungan pada bahan baku serat kapas impor harus diatasi.⁸ Jika kebutuhan industri TPT tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan penyediaan bahan baku dari dalam negeri, maka dapat mempengaruhi perkembangan pasar serat kapas dan industri TPT domestik.⁹ Oleh sebab itu intervensi Pemerintah dalam bentuk kebijakan diperlukan untuk meningkatkan produksi dan bahkan ekspor serat kapas Indonesia di masa mendatang. Kebijakan-kebijakan yang selama ini dilakukan belum menunjukkan hasil nyata bagi petani serat kapas. Salah satu kebijakan proteksi berupa pengenaan tarif impor serat kapas diharapkan menjadi alternatif dan berimplikasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan petani serat kapas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak kebijakan tarif impor serat kapas terhadap kesejahteraan petani serat kapas

di Indonesia. Penelitian ini berskala nasional dan Indonesia diasumsikan sebagai *small open economic country*. Pasar serat kapas dikonstruksikan sebagai model ekonomi yang diwakili oleh permintaan, penawaran, dan harga serat kapas Indonesia. Permintaan serat kapas Indonesia dianggap sebagai final demand, sedangkan penawaran serat kapas Indonesia tidak dielaborasi karena penawaran serat kapas diwakili dari akumulasi perilaku peubah jumlah produksi, impor, dan ekspor serat kapas Indonesia. Harga serat kapas Indonesia merupakan proksi dari harga serat kapas ekspor Indonesia. Jenis serat kapas tidak spesifik ditentukan jenis Kanesia, hibrida, atau lainnya dan dianggap komoditas homogen. Kesejahteraan petani serat kapas dihitung berdasarkan konsep surplus produsen.

TINJAUAN PUSTAKA

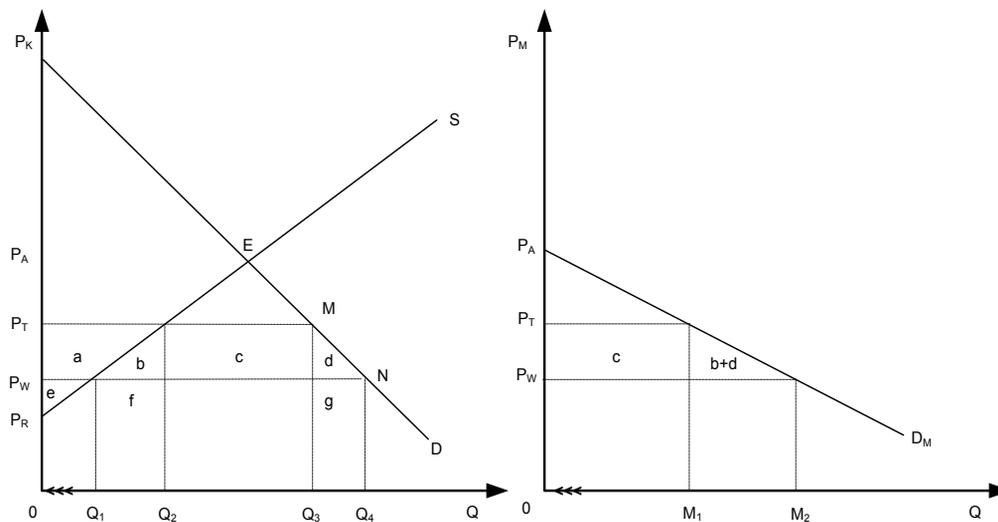
Teori Tarif Impor dan Konsep Surplus Produsen dan Konsumen

Salah satu kebijakan perdagangan yang sering digunakan adalah tarif impor. Gambar 1 menunjukkan jika terjadi perdagangan dan pengenaan tarif impor, khususnya untuk negara terbuka kecil seperti Indonesia.

7 Evilin Falanta, Op. Cit.

8 Ina & Dwi. (2008). Kapas Impor Sulitkan Industri TPT Nasional. Diunduh pada tanggal 18 Maret 2012 dari http://www.infogoe.com/viewstory/2008/07/25/kapas_impор_sulitkan_industri_tpt_nasional/?url=http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=14045.

9 W. I, et al, Op. Cit.



Gambar 1. Kebijakan Tarif Impor dalam Perdagangan Internasional

Sumber: Dunn and Mutti.¹⁰

Permintaan impor tidak ada ketika harga serat kapas lebih besar dari harga autarki (P_A). Ketika harga lebih rendah dari P_R dimana kurva penawaran domestik memotong sumbu vertikal dan kuantitas yang ditawarkan sama dengan nol, maka kurva permintaan impor adalah sama dengan kurva permintaan pasar (D_M). Pada harga antara P_A dan P_R jumlah impor merupakan perbedaan antara jumlah yang diminta dengan jumlah yang ditawarkan di dalam negeri. Pada harga dunia (P_W), maka jumlah impor adalah 0-Q₄ atau 0-M₂ pada panel di sebelah kanan. Jika diasumsikan Indonesia membebaskan tarif (T), misalnya \$ 0.50 per kg pada impor serat kapas, maka harga serat kapas di Indonesia akan naik sebesar (P_T). Meskipun Indonesia

membebankan tarif, harga dunia serat kapas tidak akan berubah karena Indonesia adalah negara kecil yang tindakannya tidak akan mempengaruhi pasar dunia.

Peningkatan harga setelah tarif impor ini memiliki sejumlah efek, yaitu (1) konsumsi menurun dari 0-Q₄ menjadi 0-Q₃ atau 0-M₁, (2) output domestik naik dari 0-Q₁ menjadi 0-Q₂. Produsen dalam negeri tidak membayar tarif impor, dimana pada harga domestik yang lebih tinggi akan memberikan insentif meningkatkan produksi yang ditunjukkan pergerakan sepanjang kurva penawaran, dan (3) impor menurun dari (Q₄-Q₁) menjadi (Q₃-Q₂).

Keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari tarif impor dapat dievaluasi

¹⁰ Dunn, Robert M., and Mutti, J. H. (2004). International economics. Sixth Edition. London: Routledge Tailor and Francis Group.

dengan konsep surplus produsen dan konsumen. Efek bersih surplus produsen dan konsumen dihitung dengan mempertimbangkan kondisi sebelum dan sesudah pengenaan tarif impor. Produsen mempunyai kelebihan karena adanya perbedaan antara harga yang bersedia diterima dengan harga yang sesungguhnya diterima di pasar. Pada perusahaan, harga yang bersedia diterima diberikan oleh kurva penawaran, daerah e merupakan nilai awal surplus produsen. Ketika harga naik di PT, maka segitiga surplus produsen menjadi $a + e$, dan perubahan surplus produsen diwakili oleh daerah trapesium. Tidak hanya produsen domestik yang mendapatkan surplus, tetapi Pemerintah juga mendapatkan pendapatan tarif sebesar daerah c. Pendapatan tarif sama dengan tarif (T) dikalikan dengan jumlah impor (Q2-Q3) dan hal ini adalah transfer dari konsumen kepada Pemerintah. Dari sudut pandang nasional, maka daerah a dan c bukan merupakan kerugian karena merupakan transfer dari konsumen kepada produsen dan Pemerintah. Daerah b dan d yang hilang dari konsumen dan tidak diperoleh dengan sektor lain disebut kerugian bobot mati. Daerah b dapat dianggap sebagai kerugian akibat inefisiensi produksi, sebagai sumber daya yang diambil ke dalam produksi serat kapas dan membayar lebih dari yang dibutuhkan untuk membeli serat kapas diimpor melalui perdagangan bebas. Daerah d adalah kerugian dari pilihan konsumsi yang kurang menguntungkan. Konsumen

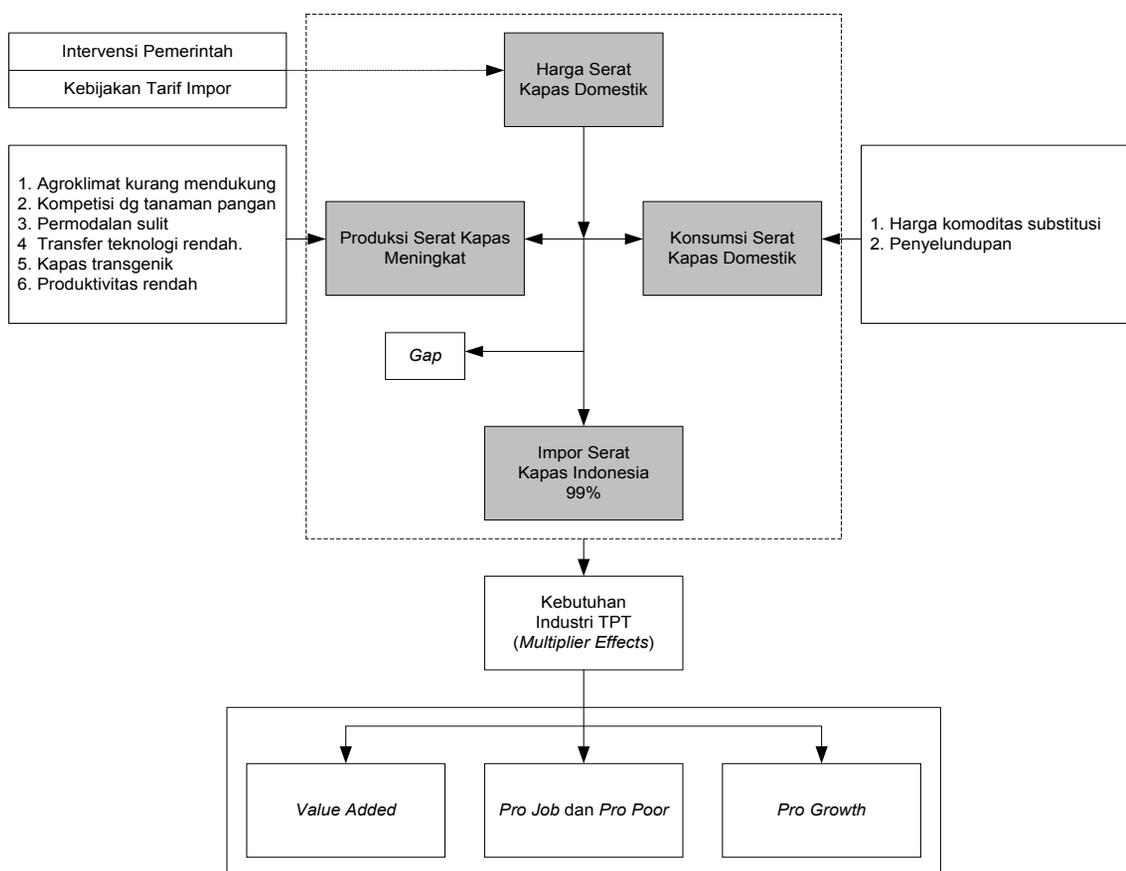
bersedia membayar daerah $d + g$ untuk Q3-Q4 dari serat kapas, tetapi ketika ada tarif impor menyebabkan mereka membeli produk lain dengan kepuasan yang setara dengan g dan kehilangan daerah d.

Efek bersih setelah dikurangi dengan tarif pada kurva permintaan impor ditunjukkan pada daerah $c + b + d$. Kerugian bobot mati, daerah $b + d$, muncul sebagai bentuk kuantitas impor yang menurun. Pada segitiga bobot mati maka kehilangan di pasar impor harus sama dengan dua segitiga kerugian bobot mati di pasar dalam negeri. Perhitungan kerugian bobot mati dari tarif menjadi sangat kecil ketika dinyatakan sebagai bagian dari PDB, yang menyebabkan beberapa kritikus mengatakan tidak ada alasan untuk khawatir tentang kehilangan efisiensi dari tarif. Perdebatan politik biasanya lebih cenderung memperhatikan pada biaya yang dibebankan pada konsumen atau keuntungan bagi produsen.

METODE PENELITIAN

Intervensi Pemerintah dalam bentuk kebijakan proteksi menjadi tindakan yang penting untuk segera diterapkan. Hal ini karena program-program pengembangan serat kapas selama ini belum menunjukkan hasil yang maksimal, apalagi tanaman serat kapas harus bersaing sumber daya dengan tanaman pangan dan perkebunan yang lebih strategis. Selain itu program-program pengembangan serat kapas

tersebut cenderung hanya diberikan kegiatan konsumsi dan perdagangan untuk mendorong kegiatan produksi saja seratnya kapas. dan tidak secara holistik terkait dengan



Gambar 2. Alur Pemikiran Penelitian

Kebijakan tarif impor seratnya kapas diharapkan memberikan peluang yang lebih luas untuk pengembangan seratnya kapas di dalam negeri. Industri TPT khususnya, sangat tergantung pada seratnya kapas sebagai bahan baku utamanya. Impor seratnya kapas yang tinggi menjadikan industri-industri yang menggunakannya rentan terhadap fluktuasi harga seratnya kapas dunia. Oleh sebab itu ketika kebijakan proteksi diberlakukan, maka perlu dibarengi dengan upaya-upaya

jangka panjang untuk mengembangkan tanaman kapas di dalam negeri sehingga mampu memberikan *multiplier effect* bagi pembangunan yang *pro growth*, *pro job*, dan *pro poor* (Gambar 2).

Metode Analisis

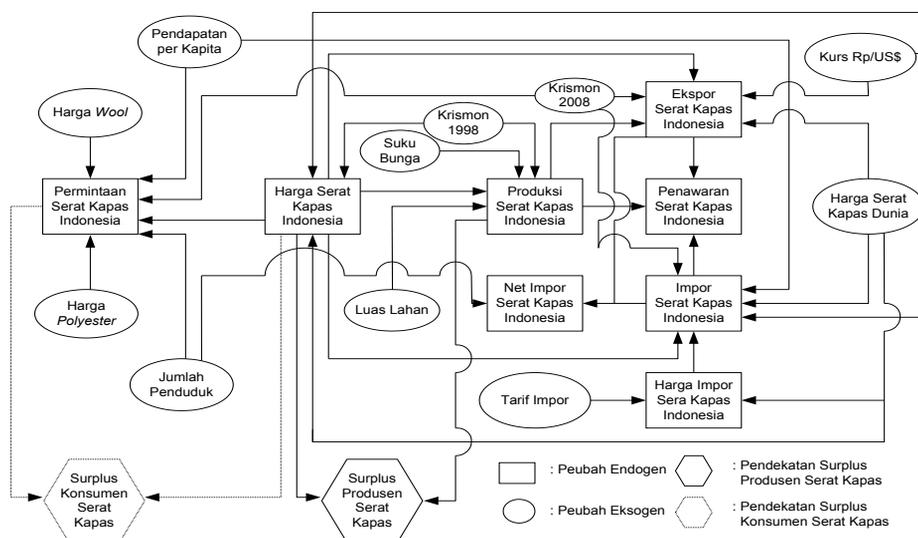
Penelitian terdahulu tentang ekonomi seratnya kapas masih jarang dilakukan, bahkan lebih banyak menganalisis strategi sebelum dan sesudah pencabutan subsidi ekspor seratnya kapas

di negara produsen serat kapas, seperti Arryanto tahun 2007¹¹, Jadin tahun 2007¹², Basuki, Sahid, dan Wanita tahun 2006¹³, dan Tahlim dan Prajogo tahun 2007¹⁴. Begitu pula analisis keterkaitan antara ekonomi serat kapas di dalam negeri dengan pasar internasional belum banyak dielaborasi.

Oleh sebab itu untuk menganalisis ekonomi serat kapas Indonesia yang terintegrasi dengan pasar luar negeri, diperlukan konstruksi model ekonomi. Kebijakan perdagangan, seperti tarif impor serat kapas, yang ditujukan untuk melindungi kepentingan petani serat kapas di dalam negeri dapat disimulasikan dampaknya. Hubungan

ekonomi antara peubah dalam model ekonomi serat kapas diformulasikan sebagai persamaan simultan untuk mengakomodasi kedinamisan interaksi antara peubah-peubah endogen dan eksogen.

Konstruksi masing-masing persamaan di dalam model didasarkan pada teori mikro ekonomi, makro ekonomi, dan perdagangan internasional dengan mempertimbangkan kriteria statistik dan ekonometrika. Persamaan-persamaan perilaku yang ditetapkan sebagai persamaan final merupakan hasil dari *trial and error* olah data untuk memenuhi *first order necessary condition*¹⁵ dari sisi ekonomi dan hasil empiris (Gambar 3).



Gambar 3. Model Ekonomi Serat Kapas di Indonesia

- 11 Sagala, A. (2007). Kebijakan Sektor Industri TPT dalam Mendukung Pengembangan Kapas dan Rami Pasca Pencabutan Subsidi Ekspor Kapas Negara Maju. Prosiding Lokakarya Nasional Kapas dan Rami. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan-Departemen Pertanian.
- 12 Djamaludin, J. C. (2007). Dampak strategis industri TPT dalam menanggapi pencabutan subsidi ekspor kapas negara maju. Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat. Diakses 30 Mei 2010 dari <http://balittas.litbang.deptan.go.id/ind/images/kapasrami/dampak%20strategis%20industri.pdf>.
- 13 Basuki, Sahid, dan Wanita, Op. Cit.
- 14 Sudaryanto, T. & P. U. Hadi. (2007). Analisis dampak pencabutan subsidi ekspor kapas negara maju terhadap ekonomi kapas Indonesia. Prosiding Lokakarya Nasional Kapas dan Rami. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan-Departemen Pertanian.
- 15 Koutsoyiannis. (1982). Theory of econometrics (6th ed.). London: The MacMillan Press Ltd.

• **Persamaan Produksi Serat Kapas Indonesia**

Persamaan produksi serat kapas diturunkan dari teori mikro ekonomi, fungsi produksi, sehingga dapat diketahui hubungan antara beberapa faktor produksi (input) dengan produksinya (*output*).

Produksi serat kapas dipengaruhi oleh harga serat kapas Indonesia, luas areal tanaman kapas, tingkat suku bunga sebagai proksi dari biaya-biaya produksi, tren waktu, dummy krisis ekonomi Indonesia tahun 1998, dan produksi serat kapas tahun sebelumnya.

$$PCl_t = a_0 + a_1HCIR_t + a_2LAC_t + a_3(IRRR_t - IRRR_{t-1}) + a_4TREN_t + a_5DK98 + a_6PCl_{t-1} + u_1 \dots\dots\dots (1)$$

Tanda dugaan parameter yang diharapkan adalah $a_1, a_2, a_4 > 0$; $a_3, a_5 < 0$; dan $0 < a_6 < 1$.

• **Persamaan Ekspor Serat Kapas Indonesia**

Jumlah ekspor serat kapas Indonesia relatif sangat kecil. Namun demikian persamaan ini menjadi penting dikonstruksikan dalam bentuk persamaan perilaku agar dapat diketahui faktor-faktor yang berpengaruh guna perkembangan ekspor serat kapas Indonesia di masa mendatang. Persamaan ekspor serat kapas diturunkan dari teori perdagangan

internasional sederhana dengan mempertimbangkan pengaruh luar negeri melalui harga serat kapas dunia, harga serat kapas Indonesia, nilai tukar Rupiah terhadap US\$ sebagai proksi daya saing, produksi serat kapas sebagai proksi penawaran serat kapas, tren waktu, dummy krisis ekonomi dunia tahun 2008, dan ekspor serat kapas Indonesia tahun sebelumnya.

$$ECl_t = b_0 + b_1HCWR_{t-1} + b_2(HCIR_t - HCIR_{t-1}) + b_3ERIR_{t-1} + b_4(PCl_{t-1}/LAC_{t-1}) + b_5TREN + b_6DK08 + b_7ECl_{t-1} + u_2 \dots\dots\dots (2)$$

Tanda dugaan parameter yang diharapkan adalah $b_1, b_3, b_4, b_5, b_6 > 0$; $b_2 < 0$; dan $0 < b_7 < 1$.

• **Persamaan Impor Serat Kapas Indonesia**

Persamaan impor serat kapas Indonesia berperan penting karena mendominasi dalam perdagangan serat kapas Indonesia. Secara umum peubah-

peubah dalam persamaan ini hampir sama dengan ekspor serat kapas, namun demikian peubah pendapatan penduduk per kapita dimunculkan sebagai bagian dalam teori *Balance of Payment* (makro ekonomi). Oleh sebab itu persamaan

impor serat kapas Indonesia dipengaruhi oleh harga impor serat kapas Indonesia, harga serat kapas Indonesia, pendapatan penduduk per kapita, dan dummy krisis ekonomi dunia tahun 2008.

$$ICI_t = c_0 + c_1HCIM_t + c_2HCIR_{t-1} + c_3(GDPR_t/POP_t) + c_4DK08 + u_3 \dots \dots \dots (3)$$

Tanda dugaan parameter yang diharapkan adalah $c_1, c_4 < 0$ dan $c_2, c_3 > 0$.

• **Persamaan Penawaran Serat Kapas Indonesia** identitas yang merupakan cerminan dari produksi serat kapas Indonesia, impor serat kapas Indonesia, dan ekspor serat kapas Indonesia.

Persamaan serat kapas Indonesia dikonstruksikan sebagai persamaan

$$SCI_t = PCI_t + ICI_t - ECI_t \dots \dots \dots (4)$$

• **Persamaan Permintaan Serat Kapas Indonesia** dari kombinasi lainnya. Permintaan serat kapas merupakan permintaan final yang dipengaruhi oleh harga serat kapas Indonesia, harga komoditas substitusinya (harga wool dan harga polyester), pendapatan penduduk per kapita, dummy krisis ekonomi dunia tahun 2008, dan permintaan serat kapas Indonesia tahun sebelumnya.

Fungsi permintaan serat kapas diturunkan dari kurva indifferen. Teori ini mengasumsikan jika seorang konsumen sanggup menyatakan kombinasi komoditas yang dikonsumsi yang dapat memberikan kepuasan yang lebih tinggi, sama, atau lebih rendah

$$DCI_t = d_0 + d_1(HCIR_t/HCIR_{t-1}) + d_2(HWWR_t*ERIR_t) + d_3(HPWR_t*ERIR_t) + d_4(GDPR_t/POP_t) + d_5DK08 + d_6DCI_{t-1} + u_4 \dots \dots \dots (5)$$

Tanda dugaan parameter yang diharapkan adalah $d_1, d_3, d_5 < 0$; $d_2, d_4 < 0$; dan $d_6 < 1$.

• **Persamaan Harga Serat Kapas Indonesia** dimana harga dapat pula dipengaruhi oleh permintaan ¹⁶. Harga serat kapas Indonesia diasumsikan berada dalam kondisi mendekati pasar persaingan sempurna, sehingga selain harga

Model Cobweb menjelaskan hubungan antara harga dan kuantitas permintaan dalam waktu yang berjalan,

16 Tomek, W. G. & K. L. Robinson. (1990). Agricultural product prices (3rd ed.). New York: Cornell University Press.

serat kapas Indonesia dipengaruhi oleh permintaannya juga dipengaruhi penawaran, harga serat kapas dunia, tren waktu, dan *dummy* krisis ekonomi Indonesia tahun 1998. Harga serat

kapas dunia sebagai peubah eksogen untuk menunjukkan Indonesia sebagai negara kecil terbuka dan posisinya sebagai *price taker* di dalam pasar serat kapas dunia.

$$HCIR_t = e_0 + e_1(SCI_t - SCI_{t-1}) + e_2(DCI_t)/(DCI_t - DCI_{t-1}) + e_3HCWR_{t-1} + e_4TREN_t + e_5DK98 + u_5 \dots\dots\dots (6)$$

Tanda dugaan parameter yang diharapkan adalah $e_1 < 0$ dan $e_2, e_3, e_4, e_5 > 0$.

• **Persamaan Net Impor Serat Kapas Indonesia**

Persamaan net impor serat kapas Indonesia dikonstruksikan sebagai

persamaan identitas yang dipengaruhi oleh impor serat kapas Indonesia dan ekspor serat kapas Indonesia.

$$INET_t = ICI_t - ECI_t \dots\dots\dots (7)$$

• **Persamaan Harga Impor Serat Kapas Indonesia**

Persamaan harga impor serat kapas Indonesia berbentuk persamaan identitas

yang di dalamnya terdapat harga serat kapas dunia dan tarif impor serat kapas Indonesia.

$$HCIM_t = HCWR_t + (HCWR_t * TAC_t) \dots\dots\dots (8)$$

Identifikasi Model Ekonomi Serat Kapas Indonesia

Menurut *order condition*, suatu persamaan dapat diidentifikasi jika jumlah peubah yang tercakup dalam persamaan lebih besar atau sama dengan jumlah seluruh peubah endogen dikurangi satu. Dalam studi ini, model yang dirumuskan memiliki delapan persamaan (G) yang terdiri dari enam persamaan struktural dan dua persamaan

identitas. Sementara itu terdapat 16 peubah *predetermined variables* terdiri dari 13 peubah eksogen dan tiga lag endogenous variables. Sehingga total peubah dalam model (K) adalah tujuh ditambah 16 sama dengan 23 peubah. Jumlah peubah dalam persamaan (M) adalah tujuh peubah. Sehingga berdasarkan kriteria *order condition* maka setiap persamaan struktural yang ada dalam model adalah *over identified*.

- **Metode Pendugaan Model Ekonomi Serat Kapas Indonesia**

Jika persamaan dalam model struktural semuanya *over identified* maka persamaan ini dapat diduga dengan metode LIML (*Limited Information Maximum Likelihood*), FIML (*Full Information Maximum Likelihood*), 2SLS (*Two Stage Least Squares*) atau 3SLS (*Three Stage Least Squares*).¹⁷ Metode yang digunakan dalam menduga parameter struktural di sini adalah 2SLS. Metode estimasi 2SLS dibentuk dengan asumsi (1) syarat gangguan harus memenuhi asumsi stochastic sama dengan nol, varians konstan dan kovarians sama dengan nol, (2) spesifikasi model struktural adalah tepat sekali sejauh menyangkut peubah predetermine, (3) jumlah pengamatan sampel adalah lebih besar dari jumlah peubah predetermine dalam model, dan (4) peubah penjelas tidak mengalami kolinearitas sempurna. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut maka uji Durbin-Watson (Dw) tidak valid untuk menduga persamaan struktural dari model persamaan simultan, terutama dengan adanya peubah endogen bedakala, sehingga digunakan uji Dh.

- **Validasi Model Ekonomi Serat Kapas Indonesia**

Validasi model bertujuan untuk menganalisis sejauh mana model tersebut dapat mewakili dunia nyata. Kriteria statistik validasi pendugaan model ekonomi yang digunakan adalah *Root Means Square Error* (RMSE), *Root Means Square Percent Error* (RMSPE), dan *Theil's Inequality Coefficient* (U-theil)¹⁸. Keeratan arah (*slope*) antara aktual dengan hasil yang disimulasi dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R^2). Pada dasarnya makin kecil nilai RMSPE dan U-theil dan makin besar nilai R^2 maka pendugaan model semakin baik.

- **Simulasi Model Ekonomi Serat Kapas Indonesia**

Kebijakan-kebijakan yang disimulasikan (*ex-ante*) tahun 2011-2020, yaitu, kenaikan tarif impor serat kapas, luas areal tanam kapas, dan kombinasinya.

Data

Data yang digunakan adalah time series tahun 1980-2009 dan dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti Badan Pusat Statistik, International Monetary Fund, Direktorat Jenderal Perkebunan, *United States Department of Agriculture*, Asosiasi Pertekstilan Indonesia, dan *International Cotton Advisory Committee*, serta website <http://www.indexmundi>.

17 Koutsoyiannis, Op. Cit.

18 Pindyck, R. S. & D. L. Rubinfeld. (1991). *Econometric model and economic forecast* (3rd ed.). New York: Mc Graw-Hill International Editions.

com. Selain itu, data bersatuan nilai uang dideflasi dengan indeks harga konsumen Indonesia tahun dasar 2000 untuk peubah-peubah di dalam negeri dan peubah-peubah luar negeri dideflasi dengan indeks harga konsumen dunia tahun dasar 2000.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Hasil pendugaan parameter dengan menggunakan metode 2SLS terhadap persamaan struktural menunjukkan indikator statistik yang baik. Nilai R² secara umum berkisar antara 0.65 sampai 0.96. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum peubah-peubah penjelas dalam persamaan perilaku mampu menjelaskan dengan baik peubah endogen. Besaran nilai statistik uji F umumnya tinggi, yaitu berkisar antara 7.31 sampai 102.10, yang mempunyai arti bahwa variasi peubah-peubah penjelas dalam setiap persamaan perilaku secara bersama-sama mampu menjelaskan dengan baik variasi peubah endogennya pada taraf $\alpha = 0.0001$ sampai $\alpha = 0.0002$, di samping itu semua tanda parameter dugaan telah sesuai dengan harapan dan logis dari sudut pandang teori ekonomi. Keterkaitan antar peubah dalam persamaan simultan seringkali banyak dijumpai masalah autokorelasi. Oleh sebab itu di dalam model ekonomi ini, penulis memprioritaskan kriteria ekonomi di atas kriteria statistik dan ekonometrika.

Berdasarkan hasil dugaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model

ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini cukup representatif dalam menjelaskan dampak kebijakan tarif impor serat kapas terhadap kesejahteraan petani serat kapas di Indonesia.

Pada model tersebut dapat diketahui bahwa dari delapan persamaan dalam model, persamaan yang memiliki nilai RMSPE lebih kecil dari 50 % berjumlah tujuh persamaan, sedangkan satu persamaan memiliki nilai RMSPE lebih besar dari 50 %. Ditinjau berdasarkan kriteria U-theil, terdapat tujuh persamaan yang mempunyai nilai U-theil lebih kecil dari 0.20 dan satu persamaan sisanya memiliki nilai U-theil lebih besar dari 0.20. Nilai U-theil tertinggi adalah 0.35 yaitu pada persamaan harga serat kapas Indonesia. Meskipun memiliki nilai U-theil tertinggi, persamaan ini memiliki nilai proporsi bias (UM) cukup kecil, yaitu 0.22. Dengan demikian, jika dilihat secara keseluruhan maka model ini cukup baik digunakan sebagai model pendugaan dan oleh karena itu model struktural yang telah dirumuskan tersebut juga dapat digunakan untuk simulasi peramalan.

Simulasi Kebijakan Tarif Impor Serat Kapas terhadap Perkembangan Ekonomi Serat Kapas Indonesia Tahun 2011-2020

Sebelum dilakukan simulasi kebijakan tarif impor serat kapas, nilai dasar dari simulasi menjelaskan bahwa produksi serat kapas belum mampu memenuhi sasaran produksi serat

kapas yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian sebesar 63 ribu ton pada tahun 2014. Berdasarkan ramalan nilai peubah endogen, produksi serat kapas Indonesia pada tahun 2014 hanya mampu mencapai 41.10 ribu ton atau diperlukan tambahan 21.90 %. Menurut Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat¹⁹, tantangan dalam pengembangan serat kapas di Indonesia cukup kompleks. Tantangan tersebut antara lain berupa ketidaktersediaan benih bermutu hingga kelangkaan modal petani, sedangkan di sisi lain ketersediaan sumber daya alam untuk pengembangan tanaman kapas berupa lahan kering ternyata cukup luas di luar Jawa, seperti Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Upaya-upaya yang dapat dilakukan pada sub sistem hulu, antara lain perbaikan varietas kapas yang tahan terhadap kekeringan melalui teknologi transgenik terus dikembangkan.²⁰ Sedangkan pada sisi usaha tani adalah penggunaan varietas unggul. Penelitian Thamrin tahun 2007²¹, menunjukkan bahwa menanam kapas Bollgard dibandingkan kapas Kanesia berpengaruh besar terhadap peningkatan produktivitas lahan di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, yang

meningkat sebesar 263,91 % dan diikuti dengan peningkatan pendapatan petani serat kapas sebesar 318,89 %. Pada sisi hilir, Indonesia dapat menerapkan kebijakan tarif impor, dimana kebijakan ini masih digunakan oleh beberapa negara sebagai bentuk proteksi maupun sanksi dagang. Salah satu contoh, Pemerintah Brazil pada awal tahun 2010 telah mengumumkan sanksi dagang terhadap sejumlah barang-barang Amerika Serikat sebagai balasan atas subsidi 'ilegal' Amerika Serikat kepada para petani serat kapas. Dalam hal ini WTO telah menyetujui sanksi tersebut, dimana Pemerintah Brazil dapat mengenakan tarif impor sebesar 100 % untuk serat kapas dan produk serat kapas.²²

Pada penelitian ini simulasi kebijakan tarif impor ditetapkan dengan besaran yang sifatnya arbitrase. Hasil olah data menunjukkan bahwa dampak kenaikan tarif impor akan menurunkan produksi serat kapas di dalam negeri dengan besaran yang relatif kecil. Hal ini terjadi karena tanaman serat kapas belum banyak diusahakan oleh petani meskipun agroekonomi Indonesia memiliki kecocokan dalam budidaya tanamannya. Budidaya tanaman pangan, seperti padi dan jagung, dan tanaman perkebunan,

19 Balittas. (2009). Kapas. Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat. Diakses 19 Maret 2012 dari http://balittas.litbang.deptan.go.id/ind/index.php?option=com_content&view=category&id=85&Itemid=79

20 Sulistyowati, E. (2009). Pemanfaatan teknologi transgenik untuk perakitan varietas unggul kapas tahan kekeringan. *Perspektif*, 8(2), pp.96-107.

21 Thamrin, S. (2007). Analisis pendapatan petani kapas Bollgard (bt) di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. *Jurnal Agrisistem*, 3(2), pp.70-76.

22 Suaramedia. (2010). Brazil terapkan sanksi dagang atas sengketa kapas. Diakses 19 Maret 2012 dari <http://www.suaramedia.com/ekonomi-bisnis/ekonomi/18439-brazil-terapkan-sanksi-dagang-atas-sengketa-kapas.html>.

seperti kelapa sawit, lebih menjanjikan secara ekonomi dibandingkan tanaman kapas. Selain peningkatan tarif impor serat kapas sebesar 50 %, ternyata hanya mampu menurunkan jumlah impor serat kapas Indonesia sebesar 5.22 %.

Hal ini menunjukkan apabila pada tahun 2020 pun, pasar serat kapas Indonesia masih akan didominasi oleh serat kapas impor yang saat ini mencapai 90 % (Tabel 1).

Tabel 1. Dampak Kebijakan Tarif Impor Serat Kapas terhadap Perkembangan Ekonomi Serat Kapas Indonesia, 2011-2020

Peubah	Satuan	Nilai Dasar	Simulasi (Persen)							
			01	02	03	04	05	06	07	08
PCI _t	Ribu Ton	43.4287	0.0016	0.0035	0.0101	0.0168	3.1120	0.0039	1.3590	1.3569
ECl _t	Ribu Ton	28.2868	0.0014	0.0028	0.0088	0.0148	-4.9299	0.0057	4.9504	4.9486
ICl _t	Ribu Ton	2582.6	-0.5227	-1.0455	-3.1325	-5.2195	-0.5227	-0.5227	-1.9631	-1.3359
SCl _t	Ribu Ton	2597.7	-0.5158	-1.0355	-3.1104	-5.1892	-0.4119	-0.5158	-1.9825	-1.3589
DCI _t	Ribu Ton	1888.7	0.0000	-0.0053	-0.0053	-0.0106	0.0000	0.0000	-0.1747	-0.1694
HCIR _t	US\$/Kg	1.3437	0.0149	0.0298	0.0967	0.1563	0.0074	0.0149	16.5364	16.5141
INET _t	Ribu Ton	2554.3	-0.5285	-1.0570	-3.1672	-5.2774	-0.4737	-0.5285	-2.0397	-1.4055
HCIM _t	US\$/Kg	0.8099	4.1240	8.2479	24.7685	41.2767	4.1240	4.1240	24.9537	19.9901

Keterangan : Simulasi 01 : Kenaikan tarif impor serat kapas sebesar 5%
 Simulasi 02 : Kenaikan tarif impor serat kapas sebesar 10%
 Simulasi 03 : Kenaikan tarif impor serat kapas sebesar 30%
 Simulasi 04 : Kenaikan tarif impor serat kapas sebesar 50%
 Simulasi 05 : Kenaikan tarif impor serat kapas sebesar 5% dan luas lahan kapas sebesar 10%
 Simulasi 06 : Kenaikan tarif impor serat kapas sebesar 5% dan tingkat suku bunga turun sebesar 17.25%
 Simulasi 07 : Kenaikan tarif impor serat kapas sebesar 5% dan harga kapas dunia naik sebesar 20%
 Simulasi 08 : Kenaikan harga kapas dunia sebesar 20%

Kenaikan tarif impor serat kapas yang disertai dengan kebijakan perluasan lahan tanaman kapas sebesar 10 % dan fenomena fluktuasi harga serat kapas dunia memberikan dampak positif terbesar terhadap produksi serat kapas di dalam negeri. Fluktuasi harga serat kapas dunia merupakan faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol, sedangkan luas lahan merupakan salah satu faktor produksi yang dapat dikontrol. Oleh

sebab itu program ekstensifikasi untuk tanaman kapas harus segera ditetapkan daerah pengembangannya dengan skala yang lebih luas. Program ekstensifikasi ini bukan hal yang mudah dilakukan karena adanya (1) kompetisi penggunaan lahan yang ketat oleh komoditas-komoditas lain yang secara ekonomi lebih menguntungkan, seperti padi, jagung, dan beberapa tanaman perkebunan lainnya, (2) alih fungsi lahan ke sektor

non-pertanian, seperti perumahan, perkantoran, dan lain-lain, dan (3) degradasi tanah. Studi kasus di delta Gediz, Turki, menunjukkan jika degradasi tanah berkontribusi menurunkan produksi serat kapas sebesar 34.4 %.²³

Simulasi Kebijakan Tarif Impor Serat Kapas terhadap Kesejahteraan Produsen Serat Kapas Indonesia Tahun 2011-2020

Efektivitas dari simulasi kebijakan tarif impor dapat dilakukan dengan menghubungkannya melalui dampaknya terhadap surplus produsen serat kapas di dalam negeri. Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan, maka secara umum kebijakan kenaikan tarif impor akan meningkatkan kesejahteraan produsen serat kapas di dalam negeri. Hal ini terjadi karena tarif impor akan menstimulasi kenaikan harga impor serat kapas Indonesia, sehingga harga serat kapas di dalam negeri juga meningkat, dimana pada akhirnya menjadi insentif bagi petani serat kapas untuk memproduksi serat kapas lebih banyak. Kondisi tersebut sesuai dengan teori dimana pengenaan tarif impor akan membuat surplus produsen yang lebih besar dibandingkan surplus konsumen.

Surplus petani serat kapas akan semakin besar pengaruh harga serat kapas dunia. Bahkan tanpa kebijakan

tarif impor, kenaikan harga serat kapas dunia secara signifikan memberikan keuntungan terbesar bagi petani serat kapas di dalam negeri (Simulasi 8). Hal ini karena harga serat kapas dunia telah menjadi peubah penting dan sekaligus sebagai sinyal bagi produsen dalam memproduksi. Peningkatan harga serat kapas dunia akan mempengaruhi peningkatan harga impor serat kapas Indonesia. Peningkatan harga serat kapas Indonesia tersebut lalu direspon oleh produsen serat kapas dengan meningkatkan produksinya. Oleh sebab itu keuntungan petani serat kapas akan meningkatkan sebesar US\$ 572.51 juta di masa mendatang. Bahkan kebijakan kenaikan tarif impor serat kapas sebesar 5 % ketika terjadi kenaikan harga serat kapas dunia juga masih memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani serat kapas (Simulasi 7). Di sisi lain, kondisi tersebut akan meningkatkan biaya input produksi bagi industri-industri yang menggunakannya sebagai bahan baku, sehingga pada akhirnya menurunkan daya saing. Salah satu contohnya yang terjadi pada pengusaha tekstil skala menengah di Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya dan Solokanjeruk, dimana usahanya terancam ditutup jika Pemerintah tidak segera meregulasi harga serat kapas tersebut.²⁴

23 Atis, E. (2006). Economic Impacts on Cotton Production Due to Land Degradation in the Gediz Delta, Turkey. *Land Use Policy*, 23, pp.181-186.

24 Tubasmedia. (2012). Pengusaha tekstil minta harga kapas diatur. Diakses 19 Maret 2012 dari <http://www.tubasmedia.com/berita/pengusaha-tekstil-minta-harga-kapas-diatur/>.

Tabel 2. Dampak Kebijakan Tarif Impor Serat Kapas terhadap Kesejahteraan Petani Serat Kapas Indonesia, 2011-2020

Surplus	Simulasi (Juta US\$)							
	01	02	03	04	05	06	07	08
Produsen	0.52	1.03	3.32	5.31	0.26	0.52	571.49	572.51
Konsumen	-0.38	-0.76	-2.46	-3.97	-0.19	-0.38	-420.04	-419.46

Keterangan : Simulasi 01 : Kenaikan tarif impor serat kapas sebesar 5%
 Simulasi 02 : Kenaikan tarif impor serat kapas sebesar 10%
 Simulasi 03 : Kenaikan tarif impor serat kapas sebesar 30%
 Simulasi 04 : Kenaikan tarif impor serat kapas sebesar 50%
 Simulasi 05 : Kenaikan tarif impor serat kapas sebesar 5% dan luas lahan kapas sebesar 10%
 Simulasi 06 : Kenaikan tarif impor serat kapas sebesar 5% dan tingkat suku bunga turun sebesar 17.25%
 Simulasi 07 : Kenaikan tarif impor serat kapas sebesar 5% dan harga kapas dunia naik sebesar 20%
 Simulasi 08 : Kenaikan harga kapas dunia sebesar 20%

Harga serat kapas dunia merupakan peubah eksogenus yang sulit dikontrol oleh Pemerintah Indonesia, sedangkan kebijakan tarif impor juga telah mengalami banyak perubahan dalam kesepakatan perdagangan internasional. Berbagai kemajuan dari hasil perundingan putaran Uruguay telah mendorong perdagangan yang lebih terbuka. Namun demikian laporan Asian Development Bank (ADB) menunjukkan bahwa halangan struktural dalam perdagangan, yaitu masalah yang terkait struktur ekonomi, sistem hukum, budaya bisnis, pajak, regime regulasi, tingkat korupsi, dan birokrasi, lebih membatasi pertumbuhan ekonomi daripada tingkat proteksi yang ada.²⁵ Kebijakan tarif impor yang notabene ditujukan untuk melindungi kepentingan pelaku serat kapas di dalam negeri cenderung dikurangi dan diganti dengan kebijakan halangan perdagangan yang

bukan berupa tarif. Oleh sebab itu pilihan kebijakan disimulasikan untuk menunjukkan kemungkinan yang paling realistis sehingga kesejahteraan petani serat kapas Indonesia dapat meningkat dan sekaligus mampu memberikan dampak positif terhadap pelaku-pelaku usaha lainnya.

Berdasarkan simulasi kebijakan yang dilakukan, maka kombinasi kebijakan tarif impor serat kapas naik 5 % dengan usaha ekstensifikasi tanaman kapas sebesar 10 % maupun dengan penurunan tingkat suku bunga sebesar 17.25 %, secara relatif masih memberikan keuntungan bagi petani serat kapas di dalam negeri. Ekstensifikasi tanaman kapas secara langsung akan meningkatkan produksi serat kapas Indonesia sebesar 3.11 % dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan petani serat kapas di dalam negeri sebesar US\$ 0.26

25 Brooks, D. H., D. Roland-Holst, & F. Zhai. (2005). Asia's long term growth and integration: reaching beyond trade policy barrier. Papers. Mandaluyong City: Asian Development Bank.

juta. Sedangkan penurunan tingkat suku bunga mampu meningkatkan produksi serat kapas Indonesia sebesar 0.0039 % dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan petani serat kapas di dalam negeri sebesar 0.52 %. Kedua simulasi tersebut memiliki arti penting untuk meningkatkan kemampuan petani serat kapas dari sisi internal dan mengurangi ketergantungan terhadap tarif impor. Seperti yang dijelaskan oleh Tahlim dan Prajogo ²⁶, bahwa produksi serat kapas di dalam negeri perlu ditingkatkan melalui *special effort* dengan memanfaatkan kenaikan harga serat kapas dunia. Selain meningkatkan produksi melalui perluasan areal, peningkatan produktivitas, perbaikan mutu serat kapas, dan areal kapas non-proyek sebaiknya diikutsertakan ke dalam proyek agar produksi dan pendapatan petani serat kapas meningkat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kebijakan menaikkan tarif impor serat kapas ternyata belum mampu meningkatkan produksi serat kapas, khususnya sesuai dengan target produksi serat kapas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian sebesar 63 ribu ton pada tahun 2014. Namun demikian kebijakan ini masih memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan petani serat kapas di dalam negeri.

Kombinasi kebijakan tarif impor dengan ekstensifikasi luas lahan tanaman kapas memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi serat kapas di dalam negeri, meskipun dampaknya relatif kecil terhadap kesejahteraan petani serat kapas dibandingkan kebijakan lainnya pada masa mendatang. Kombinasi kebijakan ini menjadi penting dalam rangka mengantisipasi kecenderungan dewasa ini untuk mengurangi mengenakan tarif impor dan sekaligus mendorong kemandirian Indonesia untuk memproduksi serat kapas di dalam negeri.

Selain itu kecenderungan kenaikan harga dunia serat kapas secara nyata memberikan dampak positif terbesar bagi kesejahteraan petani serat kapas, walaupun tanpa menerapkan kebijakan tarif impor serat kapas. Harga dunia serat kapas menjadi sinyal positif dan insentif bagi petani untuk meningkatkan produksinya.

Untuk selanjutnya, kebijakan tarif impor serat kapas perlu dilakukan secara gradual atau bertahap dengan mengikuti perkembangan kemampuan produksi serat kapas di dalam negeri melalui kebijakan ekstensifikasi luas lahan tanaman kapas yang dilakukan oleh Pemerintah. Pada akhirnya hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi serat kapas, kesejahteraan petani serat kapas, dan sekaligus *value added* industri TPT.

26 Sudaryanto dan Hadi, Op. Cit.

Menggalakkan kembali produksi serat kapas dan memfasilitasi perkembangan serat non- kapas di masa mendatang, seperti rami, rayon, serat domba, dan serat propylene, sehingga mengurangi ketergantungan yang sangat tinggi terhadap serat kapas sebagai bahan baku utama.

Penelitian lanjutan diharapkan dapat mengaitkan antara pasar serat kapas di dalam negeri dengan industri TPT secara simultan, sehingga analisis yang diperoleh menjadi lebih komprehensif.

Selain itu pasar serat kapas dunia dielaborasi dengan mendekomposisi negara-negara pengeksport serat kapas yang dihubungkan dengan pasar serat kapas Indonesia. Konstruksi model yang dibangun akan memberikan penjelasan yang lebih baik tentang faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi yang terjadi di negara pengeksport tersebut bagi impor serat kapas Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Atis, E. (2006). Economic impacts on cotton production due to land degradation in the Gediz Delta, Turkey. *Land Use Policy*, 23, pp.181-186.
- Balittas. (2009). *Kapas*. Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat. Diakses pada tanggal 19 Maret 2012 dari http://balittas.litbang.deptan.go.id/ind/index.php?option=com_content&view=category&id=85&Itemid=79.
- Basuki, T., M. Sahid, & Y. P. Wanita. (2006). *Pengembangan kapas di Indonesia dan permasalahannya*. Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat. Diakses pada tanggal 4 Maret 2010 dari <http://balittas.litbang.deptan.go.id/ind/images/kapasrami/pengembangan%20kapas%20di%20indonesia.pdf>
- Brooks, D. H., D. Roland-Holst, & F. Zhai. (2005). *Asia's long term growth and integration: reaching beyond trade policy barrier*. Papers. Mandaluyong City: Asian Development Bank.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2009). *Diskusi Perkapasan Nasional Dengan Tema: Strategi dan Kebijakan Pengembangan Budidaya Kapas Nasional*. Diskusi. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan-Kementerian Pertanian.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2010). *Luas Areal dan Produksi Perkebunan Seluruh Indonesia Menurut Pengusahaan*. Direktorat Jenderal Perkebunan. Diakses pada tanggal 19 Maret 2010 dari <http://ditjenbun.deptan.go.id/cigraph/index.php/viewstat/komodititutama/12-Kapas>.
- Djamaludin, J. C. (2007). *Dampak strategis industri TPT dalam menanggapi pencabutan subsidi ekspor kapas negara maju*. Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat. Diakses pada tanggal 30 Mei 2010 dari <http://balittas.litbang.deptan.go.id/ind/images/kapasrami/dampak%20strategis%20industri.pdf>.
- Dunn, R. M. Jr. & J. H. Mutti. (2004). *International economics* (6th ed.). London: Routledge Taylor and Francis Group.

- Falanta, E. (2011). Walau harga naik, industri tekstil tetap genjot impor kapas. Diakses pada tanggal 6 Maret 2012 dari <http://industri.kontan.co.id/news/walau-harga-naik-industri-tekstil-tetap-genjot-impor-kapas-1/2011/03>.
- Ina & Dwi. (2008). Kapas impor sulitkan industri TPT nasional. Diakses pada tanggal 18 Maret 2010 dari http://www.infogoe.com/viewstory/2008/07/25/kapas_impор_sulitkan_industri_tpt_nasional/?url=http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=14045.
- Kementerian Pertanian. (2010). Rencana strategis Kementerian Pertanian tahun 2010-2014. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Koutsoyiannis. (1982). *Theory of econometrics* (6th ed.). London: The MacMillan Press Ltd.
- Pindyck, R. S. & D. L. Rubinfeld. (1991). *Econometric model and economic forecast* (3rd ed.). New York: Mc Graw-Hill International Editions.
- Sagala, A. (2007). Kebijakan sektor indutri TPT dalam mendukung pengembangan kapas dan rami pasca pencabutan subsidi ekspor kapas negara maju. Prosiding Lokakarya Nasional Kapas dan Rami. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan-Departemen Pertanian.
- Suaramedia. (2010). Brazil terapkan sanksi dagang atas sengketa kapas. Diakses pada tanggal 19 Maret 2012 dari <http://www.suaramedia.com/ekonomi-bisnis/ekonomi/18439-brazil-terapkan-sanksi-dagang-atas-sengketa-kapas.html>.
- Sudaryanto, T. & P. U. Hadi. (2007). Analisis dampak pencabutan subsidi ekspor kapas negara maju terhadap ekonomi kapas Indonesia. Prosiding Lokakarya Nasional Kapas dan Rami. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan-Departemen Pertanian.
- Sulistiyowati, E. (2009). Pemanfaatan teknologi transgenik untuk perakitan varietas unggul kapas tahan kekeringan. *Perspektif*, 8(2), pp.96-107.
- Thamrin, S. (2007). Analisis pendapatan petani kapas Bollgard (bt) di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. *Jurnal Agrisistem*, 3(2), pp.70-76.
- Tomek, W. G. & K. L. Robinson. (1990). *Agricultural product prices* (3rd ed.). New York: Cornell University Press.
- Tubasmedia. (2012). Pengusaha tekstil minta harga kapas diatur. Diakses pada tanggal 19 Maret 2012 dari <http://www.tubasmedia.com/berita/pengusaha-tekstil-minta-harga-kapas-diatur/>.
- W. I, Dadang, Yan, Selamat, M. Azis, T. A. A. Sholeh, F. Faza, & K. Haryanto. (2007). Bisnis kapas mulai bernapas. Diakses pada tanggal 19 Maret 2010 dari http://www.agrina-online.com/show_article.php?rid=7&aid=1039.

Lampiran 1. Peubah-Peubah yang digunakan dalam Penelitian

No.	Peubah	Keterangan	Satuan
1.	DCI_t	Jumlah permintaan serat kapas Indonesia pada tahun t	Ribu ton
2.	DCI_{t-1}	Jumlah permintaan serat kapas Indonesia tahun t-1	Ribu ton
3.	DK98	<i>Dummy</i> krisis ekonomi Indonesia tahun 1998	-
4.	DK08	<i>Dummy</i> krisis ekonomi dunia tahun 2008	-
5.	ECI_t	Jumlah ekspor serat kapas Indonesia pada tahun t	Ribu ton
6.	ECI_{t-1}	Jumlah ekspor serat kapas Indonesia pada tahun t-1	Ribu ton
7.	$ERIR_t$	Nilai tukar Rp/US\$ pada tahun t	Rp/US\$
8.	$ERIR_{t-1}$	Nilai tukar Rp/US\$ pada tahun t-1	Rp/US\$
9.	$GDPR_t$	PDB Indonesia pada tahun t	Rp. miliar
10.	$HCIR_t$	Harga serat kapas Indonesia pada tahun t	US\$/kg
11.	$HCIR_{t-1}$	Harga serat kapas Indonesia pada tahun t-1	US\$/kg
12.	$HCWR_t$	Harga serat kapas dunia pada tahun t	US\$/kg
13.	$HCWR_{t-1}$	Harga serat kapas dunia pada tahun t-1	US\$/kg
14.	$HPWR_t$	Harga <i>polyester</i> dunia pada tahun t	US\$/kg
15.	$HWWR_t$	Harga <i>wool</i> dunia pada tahun t	US\$/kg
16.	$HCIM_t$	Harga impor serat kapas Indonesia tahun t	US\$/kg
17.	$IHKI_t$	Indeks harga konsumen Indonesia tahun t	Indeks
18.	$IHKA_t$	Indeks harga konsumen dunia tahun t	Indeks
19.	INF_t	Tingkat Inflasi Indonesia tahun t	Persen
20.	$INET_t$	<i>Net</i> impor serta kapas Indonesia tahun t	Ribu ton
21.	ICI_t	Jumlah impor serat kapas Indonesia pada tahun t	Ribu ton
22.	ICI_{t-1}	Jumlah impor serat kapas Indonesia pada tahun t-1	Ribu ton
23.	$IRRR_t$	Tingkat suku bunga bank umum tahun t	Persen
24.	$IRRR_{t-1}$	Tingkat suku bunga bank umum tahun t-1	Persen
25.	LAC_t	Luas areal tanam serat kapas pada tahun t	Hektar
26.	LAC_{t-1}	Luas areal tanam serat kapas pada tahun t-1	Hektar
27.	PCI_t	Jumlah produksi serat kapas Indonesia tahun t	Ribu ton
28.	PCI_{t-1}	Jumlah produksi serat kapas Indonesia tahun t-1	Ribu ton
29.	POP_t	Jumlah penduduk Indonesia pada tahun t	Juta jiwa
30.	SCI_t	Jumlah penawaran serat kapas Indonesia tahun t	Ribu ton
31.	SCI_{t-1}	Jumlah penawaran serat kapas Indonesia tahun t-1	Ribu ton
32.	TAC_t	Tarif impor kapas Indonesia pada tahun t	Persen
33.	TAC_{t-1}	Tarif impor kapas Indonesia pada tahun t-1	Persen
34.	$TREN_t$	Tren waktu	-

Keterangan:

- * Peubah tingkat suku bunga merupakan tingkat suku bunga bank umum untuk kegiatan investasi.
- * Indeks harga konsumen dunia diproksi dengan indeks harga konsumen Amerika Serikat.
- * Harga polyester dan wool diproksi dengan menggunakan harga dunianya.

POTENSI PERDAGANGAN DAN INVESTASI SERAT RAYON DI INDONESIA

The Potency Trade and Investment of Rayon in Indonesia

Rahayu Ningsih

Calon Peneliti pada Pusat Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan, Jl. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta, ningchemist@yahoo.com

Naskah diterima: 18 Januari 2012

Disetujui diterbitkan: 22 Juni 2012

Abstrak

Indonesia masih menghadapi kelangkaan serat rayon sebagai bahan baku industri tekstil meskipun saat ini Indonesia merupakan salah satu produsen utama serat rayon. Kelangkaan serat rayon diperkirakan disebabkan oleh kecenderungan produsen domestik yang mengekspor sehingga pasokan serat rayon untuk pasar domestik menurun. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan perdagangan dan investasi serat rayon di Indonesia. Disimpulkan bahwa permasalahan kelangkaan serat rayon disebabkan oleh masih rendahnya kapasitas produksi industri serat rayon sehingga produksinya belum mampu memasok kebutuhan domestik. Untuk itu diperlukan kebijakan yang lebih kondusif terutama di sektor kehutanan sehingga dapat mendorong pengembangan investasi industri serat rayon di Indonesia.

Kata Kunci: Serat Rayon, Investasi, Tekstil dan Produk Tekstil

Abstract

Indonesia has been facing the shortage of rayon fiber eventhough Indonesia is one of main producers. The shortage of rayon fiber is due to the tendency of producers to export rather than supply the domestic markets; so the supply of rayon fiber is then decreased. This study aims to analyze the problems of rayon fiber related to trade and investment policy of rayon industry in Indonesia. It concludes that the scarcity of rayon was caused by the low of production capacity. So, it needs to develop the investment of rayon industry. Meanwhile, there is still a bottleneck problem of investment in rayon industry. Then, the condussive policy especially in forestry sector is necessary to support the development of investment of rayon industry in Indonesia.

Keywords: Rayon Fiber, Investment, Textile and Textile Product

JEL Classification: E22, L67

PENDAHULUAN

Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) merupakan salah satu dari sepuluh komoditi utama ekspor Indonesia dan sebagai salah satu penghasil devisa ekspor bagi Indonesia. Tekstil dan Produk Tekstil juga merupakan komoditi dengan nilai ekspor terbesar kedua setelah *fats, oils and waxes*. Pada tahun 2009, kontribusi ekspor TPT terhadap total ekspor non migas Indonesia adalah sebesar 9,5%. Di tahun yang sama, total nilai ekspor TPT Indonesia turun sekitar 8,67% dibandingkan tahun sebelumnya (2008) yaitu dari US\$ 10,14 milyar menjadi US\$ 9,26 milyar. Namun, selama periode Januari-Mei 2010 total nilai ekspor TPT Indonesia naik sekitar 18,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu dari US\$ 3,57 milyar menjadi US\$ 4,23 milyar (Badan Pusat Statistik, 2010).

Sebagai salah satu industri hulu dari TPT, industri serat memiliki peranan penting dalam mengembangkan industri menengah dan industri hilir TPT. Perkembangan ekspor serat rayon Indonesia juga menunjukkan perkembangan yang baik. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Kementerian Perdagangan (2010), selama periode 2005-2009 rata-rata laju pertumbuhan total nilai dan volume ekspor serat rayon naik masing-

masing sekitar 19,15 % dan 13,50 % per tahun. Pada periode Januari-April 2010 total ekspor serat rayon baik nilai maupun volume juga naik masing-masing sekitar 51,99% dan 8,12% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Namun demikian, peningkatan ekspor serat rayon tersebut dikhawatirkan menyebabkan berkurangnya pasokan serat rayon untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Hal ini sebagaimana dikeluhkan oleh pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yang menginformasikan bahwa industri pemintalan dalam negeri mengalami kelangkaan bahan baku rayon. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku rayon, industri pemintalan dalam negeri harus mengimpor serat rayon¹. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dari data perdagangan yang menunjukkan kecenderungan impor serat rayon yang terus meningkat. Pada periode Januari-April 2010 total impor serat rayon baik nilai maupun volume naik masing-masing sekitar 64,85% dan 36,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan investasi industri serat buatan di Indonesia belum mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dari data jumlah perusahaan serat buatan

¹ Sebagaimana surat yang disampaikan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) kepada Menteri Perdagangan RI No.097/API/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 perihal Pengadaan Bahan Baku Rayon.

di Indonesia yang sejak tahun 2002 hingga 2006 tetap berjumlah 28 perusahaan. Bahkan, perusahaan serat rayon yang ada di Indonesia hanya ada dua perusahaan. Hal ini mengakibatkan ketergantungan terhadap kedua perusahaan tersebut dalam memasok kebutuhan serat rayon sebagai salah satu bahan baku industri tekstil di dalam negeri. Melihat kondisi tersebut, Indonesia memiliki peluang yang cukup baik untuk mengembangkan investasi di industri serat rayon terlebih peluang kebutuhan akan penggunaan serat rayon bagi industri TPT baik dalam maupun luar negeri masih terbuka luas. Hal ini dikarenakan karakteristik serat rayon yang bersifat ramah terhadap lingkungan.

Di sisi lain, upaya untuk mendorong investasi industri serat rayon masih menghadapi beberapa kendala diantaranya adalah mengenai isu lingkungan. Salah satu kendala masih sulitnya industri serat rayon berkembang diantaranya adalah masalah pengolahan limbah (*wasting treatment*) hasil olahan pabrik pengolah rayon. Di samping itu, industri ini juga harus berkompetisi dengan industri kertas dalam mendapatkan bahan bakunya berupa *dissolving pulp* yang juga berasal dari bahan baku kayu.

Dalam rangka mengetahui lebih dalam permasalahan kelangkaan serat rayon, tidak hanya dilakukan telaah mengenai kondisi industri serat rayon itu sendiri, melainkan perlu juga dilakukan studi/kajian mengenai kebijakan secara menyeluruh baik meliputi aturan dan persyaratan mengenai penanaman modal bagi industri serat rayon maupun kebijakan di sektor terkait yakni di sektor perindustrian dan kehutanan.

Kajian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi permasalahan, potensi produksi, perdagangan dan investasi serat rayon di Indonesia, dan (2) menganalisis kebijakan dan permasalahan terkait investasi serat rayon.

TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa studi mengenai daya saing produk tekstil telah banyak dilakukan, diantaranya oleh Lita² yang menggunakan pendekatan *Total Factor Productivity* (TFP) untuk menganalisis daya saing industri tekstil dalam negeri. Disimpulkan bahwa Indonesia merupakan produsen tekstil dengan daya saing berada pada urutan ketiga di wilayah Asia Tenggara. Dengan menggunakan TFP, diperoleh hasil bahwa terdapat 3 perusahaan di Indonesia yang termasuk efisien karena

2 Pratiwi, Lita Indah. (2012). *Analisis Daya Saing Ekspor Industri Tekstil Dalam Menghadapi AFTA (Berorientasi Pada Asia Tenggara) Dengan Perhitungan Total Factor Productivity*. Diunduh pada bulan Juni 2012 dari <http://library.gunadarma.ac.id/repository/view/28225/analisis-daya-saing-ekspor-industri-tekstil-dalam-menghadapi-afta-berorientasi-pada-asia-tenggara-dengan-perhitungan-total-factor-productivity.html>.

telah melaksanakan *Total Factor Productivity* dengan baik sehingga perusahaan mampu menghasilkan laba (*output*) dari penjualannya (*input*), dan siap untuk bersaing di era AFTA saat ini.

Selain itu, studi yang mempelajari mengenai daya saing produk tekstil juga telah dilakukan oleh Sulistiawati³. Menurut Sulistiawati, perdagangan produk tekstil mengalami peningkatan kontribusi (2003-2007) mencapai angka rata-rata diatas 18% dan menguasai pangsa pasar ekspor mencapai 20,25% dari total nilai ekspor non migas di Indonesia. Pada tahun 2003 hingga tahun 2007 produksi meningkat sebesar 35% dengan ditopang oleh kenaikan investasi sebesar 29 persen dan penyerapan tenaga kerja pada tahun yang sama meningkat sebesar 0,63. Sulistiawati menyimpulkan bahwa daya saing industri TPT Indonesia, berdasarkan analisis RCA (*Revealed Comparative Advantage*) positif sehingga dapat dikatakan bahwa daya saing industri tekstil cenderung kuat, baik di kawasan ASEAN secara keseluruhan maupun antar negaranegara anggota ASEAN sehingga industri tekstil dapat dijadikan salah satu industri andalan yang strategis untuk memasuki ASEAN *Economic Community* pada tahun 2015.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Analisis yang digunakan pada kajian ini adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk memaparkan hasil temuan berupa data dan informasi baik yang sifatnya kualitatif maupun kuantitatif.

Data

Data yang digunakan terdiri dari data sekunder dan data primer. Data yang dikumpulkan dalam kajian ini dilakukan dengan cara studi literatur dan survei di lapangan. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber informasi dan instansi terkait (Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kehutanan). Sedangkan pengumpulan data primer dilakukan dengan cara survei dan wawancara langsung kepada responden di lapangan dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam menentukan responden adalah *purposive sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Industri Serat Rayon Indonesia

Industri serat rayon merupakan bagian dari industri serat buatan. Saat ini

³ Sulistiawati. (2010). Analisis Kinerja dan Daya Saing Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia Menuju ASEAN Economic Community Tahun 2015. Diunduh bulan Juni 2012 dari <http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian>.

Indonesia merupakan salah satu produsen serat buatan dunia terutama untuk serat polyester (PSF) dan rayon. Karakteristik industri ini merupakan industri yang padat modal karena menggunakan “*advance technology*” sehingga daya saingnya ditentukan oleh besaran biaya energi. Di Indonesia perusahaan serat rayon buatan

didominasi oleh investasi asing terutama Jepang untuk PSF dan India serta Austria untuk rayon. Mengenai gambaran kinerja industri serat buatan di Indonesia baik dilihat dari jumlah perusahaan, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, kapasitas dan perdagangan (ekspor dan impor) dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kinerja Industri Serat Buatan Indonesia

Deskripsi	Satuan	Tahun					2007-2008 (%)	2004-2008 (%)
		2004	2005	2006	2007	2008		
Jumlah Perusahaan	Unit	28	28	28	28	30	7,14	1,79
Nilai Investasi	US\$ (Juta)	11.929	11.929	12.306	12.306	12.663	2,9	1,52
Kapasitas	Ton	1.077.615	1.077.615	1.077.615	1.105.255	1.184.201	7,14	2,43
Tenaga Kerja	Orang	29.447	29.447	29.447	29.447	30.147	2,38	0,48
Nilai Produksi	US\$ (Ribu)	679.000	758.000	784.000	915.120	1.007.900	10,14	10,48
Volume Produksi	Ton	796.329	752.000	835.901	976.228	1.008.992	3,36	6,43
Nilai Ekspor	US\$ (Ribu)	197.198	243.323	285.788	343.075	444.673	29,61	22,63
Nilai Impor	US\$ (Ribu)	955.539	801.295	838.373	1.127.862	1.636.543	45,10	17,03
Volume Ekspor	Ton	152.237	192.231	228.259	243.443	270.661	11,18	15,71
Volume Impor	Ton	641.851	598.131	637.746	805.209	916.658	13,84	9,98
Utilisasi	%	73,9	69,78	77,57	88,33	85,20	-3,53	3,98

Sumber: Kementerian Perindustrian (2010)

Serat rayon memiliki gambaran dan karakteristik yang spesifik dibandingkan produk serat alam dan serat buatan lainnya. Benang rayon (produk turunannya) merupakan benang yang dibuat dari serat sintetis yang diregenerasi sehingga strukturnya sama dengan serat selulosa yang lain. Salah satu karakteristik benang rayon adalah memiliki kilap yang tinggi dan warnanya lebih putih dibandingkan dengan benang *cotton* (kapas). Berdasarkan bentuk dan jenisnya, benang rayon terbagi menjadi dua yaitu:

- Benang Filament Rayon yang dibuat dari sekelompok (15-120) serat-serat rayon yang panjangnya tak terhingga, dengan jumlah antihan sedikit (100 antihan per meter), kecuali untuk kain yang mempunyai efek tertentu misalnya pada *voile* dan *crepe*.
- Benang Staple Rayon yang dibuat dari potongan-potongan filament rayon dengan panjang tertentu yang disesuaikan dengan panjang serat kapas atau serat wool, yang kemudian dipintal.

Pada umumnya penggunaan benang rayon adalah sebagai berikut:

- Benang rayon dari serat rayon kupromunium digunakan khusus untuk bahan pakaian yang halus dan baik mutunya, kaos kaki wanita dan pakaian dalam wanita (*lingerie*), kaos (*knitting*) dan kemeja batik (tenun).

- Benang rayon dari serat rayon viscose digunakan untuk bahan pakaian, benang renda dan untuk bahan pelapis.

Secara lebih lengkap mengenai pemanfaatan serat rayon untuk produk tekstil serta karakteristiknya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Ragam Hasil Akhir Serat Rayon (Viscose) dan Campurannya

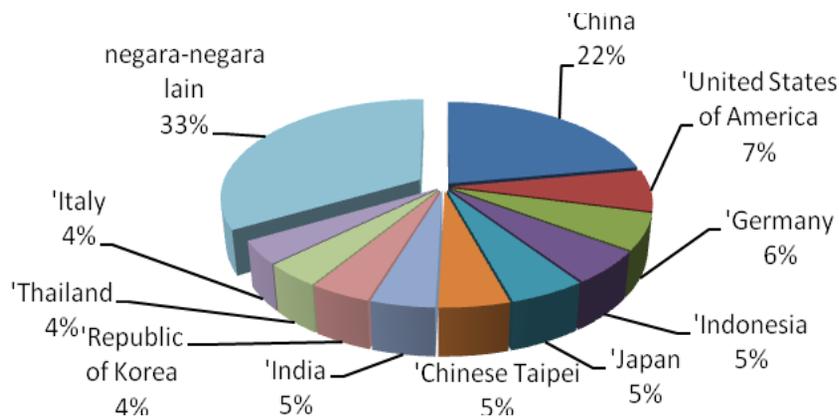
No.	Hasil Akhir	Jenis Campuran	Alasan pemakaian Serat Kapas Rayon (iscose)
1.	Pakaian tipis	murni rayon (viscose)	daya serap tinggi, lembut di tangan, mudah dipintal dan mudah dicelup
		dicampur dengan kapas atau polyester	sangat tahan terhadap perlakuan resin
2.	Pakaian dalam	dicampur dengan kapas	daya serap tinggi, kualitas benang yang lebih baik, pengurangan biaya untuk penggunaan kapas tingkat rendah
3.	Perabotan	murni rayon (viscose)	daya serap tinggi, warna yang cemerlang, mudah dipintal dan mudah dicelup
4.	Lapisan dan lapisan dalam	murni rayon (viscose)	daya serap tinggi, kualitas benang, pencelupan yang baik
5.	Pakaian pria	dicampur dengan polyester	daya serap tinggi, lembut di tangan, kecerahan, sangat tahan terhadap pengolahan resin, kemungkinan untuk menggunakan 60 mm cut
6.	Karpet dan moquettes	murni, dicampur dengan polyamide atau wol	bersifat tidak statis, kecerahan, pencelupan yang baik, biaya rendah
7.	Selimut	murni, dicampur acrylic atau dengan wol	daya serap tinggi, lembut di tangan, pencelupan yang baik, gaya pegas yang baik untuk tipe berkerut, biaya rendah
8.	Untuk kesehatan	murni, dicampur dengan kapas	daya serap tinggi, lack of optical bleachings, tidak kotor, benang beraturan
9.	Taplak meja	dicampur dengan kapas	daya serap tinggi, kecerahan, sangat tahan terhadap perlakuan resin, mudah dicelup dan pencetakan yang baik
10.	Untuk perindustrian	murni, dicampur dengan kapas	keteraturan, tingkat kebersihan tinggi, tahan terhadap pengolahan thermal dan keausan, biaya rendah
11.	Bantalan untuk kulit buatan	murni, dicampur dengan kapas	daya serap resin yang baik, tahan terhadap pengolahan thermal, benang beraturan
12.	Katun-wol kesehatan	murni, dicampur dengan kapas	daya serap tinggi, tidak ada optical bleaching kekotoran, keteraturan pemotongan, tidak ada pengolahan hydrophilic
13.	Bahan bukan tenunan	murni, dicampur dengan sintetis	daya serap tinggi, keteraturan, mudah diproses

Sumber: API (2009)

Perkembangan Perdagangan dan Investasi Serat Buatan dan Serat Rayon

Dalam perdagangan serat buatan (dimana serat rayon merupakan bagiannya) di dunia, China merupakan

eksportir utama dengan kontribusi 22% dari total ekspor dunia di tahun 2009, sementara kontribusi Indonesia sebesar 5%. Kontribusi ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk kontributor utama serat buatan dunia.

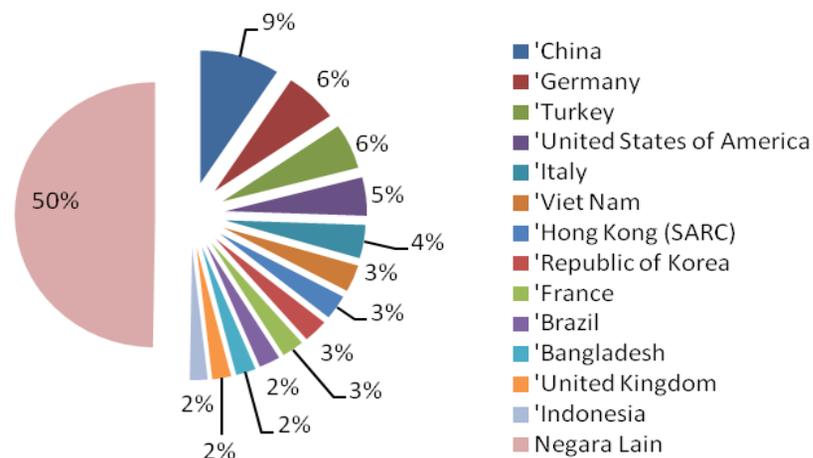


Gambar 1. Negara-negara Eksportir Utama Serat Buatan, 2010

Sumber: Comtrade (2010)

Sementara itu dari sisi impor, pasar dunia relatif lebih terdiversifikasi. China pada tahun 2009 adalah importir terbesar rayon dunia dengan total impor sebesar

9% rayon dunia. Indonesia sendiri berada pada urutan ke 13 (tiga belas) importir rayon dunia dengan tingkat impor hampir 3 %.



Gambar 2. Negara-negara Importir Utama Serat Buatan, 2010

Sumber: Comtrade (2010)

Perkembangan perdagangan serat rayon di dalam negeri sangat dipengaruhi oleh produksi dari 2 (dua) perusahaan besar yang eksis di Indonesia yakni PT. Indo Bharat Rayon (PT.IBR) dan PT. South Pacific Viscose (PT.SPV). Saat

ini di Indonesia hanya terdapat dua perusahaan tersebut dimana keduanya merupakan perusahaan modal asing (PMA) yang telah beroperasi sejak tahun 1980-an.

Berdasarkan data (Tabel 3) produksi serat rayon meningkat dari yang diperoleh dari kedua perusahaan tahun 2005 hingga 2009 yakni dari 259 tersebut, menunjukkan bahwa jumlah ribu ton menjadi 334 ribu ton.

Tabel 3. Perkembangan Produksi Serat Rayon di Indonesia, 2005-2010 (Ton)

Produksi*	2005	2006	2007	2008	2009	Jan-May 2010
PT. IBR	111.456,482	134.783,636	158.326,000	155.862,000	174.548,000	78.986,000
PT. SPV	148.000,000	152.000,000	155.597,000	148.580,000	160.057,000	82.097,000
Total IBR+SPV	259.456,482	286.783,636	313.923.000	304.442,000	334.605,000	161.083,000
Ekspor (Ton)	2005	2006	2007	2008	2009	Jan-May 2010
PT. IBR (%)	17.232,910 (15,37)	24.720,000 (18,03)	25.549,000 (16,01)	38.936,000 (26,47)	57.510,000 (31,80)	25.364,000 (31,55)
PT. SPV (%)	66.000,000 (45,52)	62.000,000 (40,79)	68.363,000 (43,95)	72.228,000 (54)	85.807,000 (51,57)	41.328,000 (50,68)
Total IBR+SPV	83.232,910	86.720,000	93.912,000	117.164,000	143.317,000	66.692,000
Lokal (Ton)	2005	2006	2007	2008	2009	Jan-May 2010
PT. IBR	94.920,370 (84,63)	112.407,270 (81,97)	134.044,000 (83,99)	108.139,000 (73,53)	123.315,000 (68,20)	55.039,000 (68,45)
PT. SPV	79.000,000 (54,48)	90.000,000 (59,21)	87.188,000 (56,05)	66.639,000 (46)	80.561,000 (48,43)	40.215,000 (49,32)
Total IBR+SPV	173.920,370	202.407,270	221.768,000	174.778,000	203.876,000	95.254,000**
Impor (Ton)	3.934,030	9.583,300	52.000,000	131.222,000	84.524,000	43.248,000**
Kebutuhan DN (Lokal+Impor)	177.854,400	211.990,570	274.000,000	306.000,000	288.400,000	138.500,000**

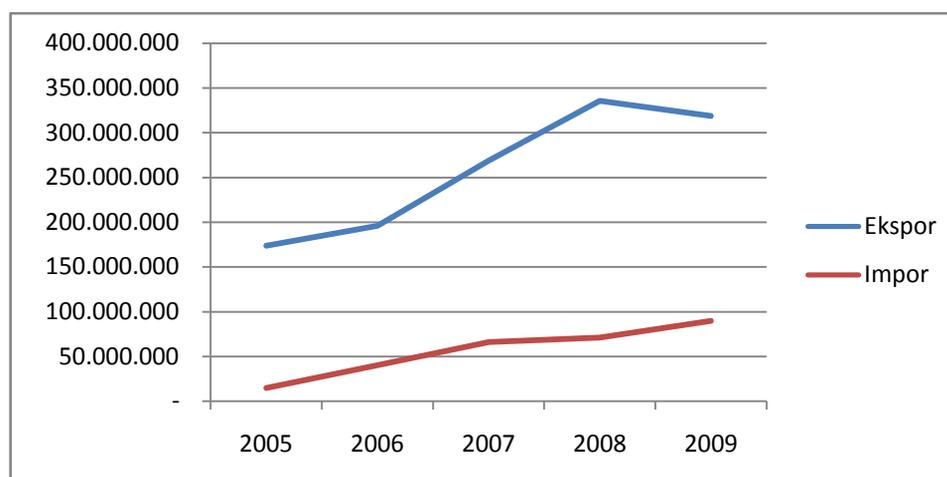
Sumber: IBR & SPV (2010)

Catatan:

* Produksi riil pada tahun yang bersangkutan, dimana jumlah ekspor dan pemasaran lokal tidak sama dengan produksi riil karena adanya stock tahun yang lalu yang diekspor/dipasarkan pada tahun berikutnya.

** Prognosa

Secara absolut, ekspor Indonesia 2009 atau tumbuh sebesar 19,15%. menunjukkan tren yang meningkat dari Namun demikian ekspor rayon sedikit sekitar 170 juta US\$ pada tahun 2005 mengalami penurunan pada periode menjadi sekitar 320 juta US\$ pada tahun 2008-2009.



Gambar 3. Ekspor dan Impor Serat Rayon Indonesia (Juta US\$)

Sumber: Pusdatin, Kementerian Perdagangan (2010)

Sejalan dengan kenaikan ekspor, selama periode yang sama impor serat rayon Indonesia juga terus mengalami kenaikan secara absolut yaitu dari sekitar 14,6 juta US\$ pada tahun 2005 menjadi sekitar 89,5 juta US\$ pada tahun 2009 atau tumbuh sebesar 51,96 per tahun. Hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan atas impor serat rayon selama 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa terjadinya peningkatan impor dikarenakan terjadinya kelangkaan serat rayon di pasar domestik. Hal ini juga ditunjukkan oleh volume impor yang naik dari 7 ribu ton pada tahun 2005 menjadi 30 ribu ton pada tahun 2009.

Realisasi Investasi Industri Tekstil di Indonesia

Selama tahun 2009, realisasi investasi dalam negeri (PMDN) untuk industri tekstil di Indonesia merupakan investasi terbesar keenam setelah investasi di industri kimia dan farmasi, industri pengolahan makanan, industri jasa lainnya, industri listrik, gas dan air, dan industri konstruksi dengan total nilai investasi sebesar Rp. 2,6 triliun dengan jumlah proyek sebanyak 23. Sementara,

untuk investasi asing (PMA) menempati urutan ke-12 dengan total nilai investasi sebesar US\$ 251, 4 juta dengan sejumlah 66 proyek.

Nilai investasi di industri tekstil dan produk tekstil yang tercatat secara agregat oleh Pusdatin Badan Koordinasi Penanaman Modal - BKPM (2010) sejak 1 Januari tahun 2005 hingga 31 Desember 2009 mencapai lebih US\$ 1 juta untuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan lebih dari Rp.5,3 triliun untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Total jumlah proyek untuk PMA adalah sebanyak 288 proyek dan untuk PMDN sebanyak 80 proyek yang tersebar di beberapa wilayah propinsi. Lokasi dengan sebaran industri terbesar adalah Jawa Barat, Banten dan Jawa Tengah. Secara rinci, nilai investasi tekstil untuk PMA dan PMDN di seluruh lokasi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.

Berdasarkan informasi dari BKPM dan pelaku di sektor TPT diinformasikan bahwa besarnya nilai investasi di sektor hulu (termasuk diantaranya industri serat rayon) memerlukan nilai investasi yang jauh lebih besar dibandingkan investasi di sektor hilirnya.

Tabel 4. Realisasi Investasi PMA dan PMDN, 2009*

Sektor/Lokasi	Total PMA		Total PMDN	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
		(US\$. 000)		(Rp.000.000)
Industri Tekstil	288	1.088.409	80	
Sumatera Utara	1	1.250,00		
Kepulauan Riau	2	800		
DKI Jakarta	20	36.533,81	3	17.000,00
Jawa Barat	164	543.401,44	50	2.998.354,85
Jawa Tengah	29	353.994,79	12	481.769,50
D I. Yogyakarta	3	2.780,00	2	36.330,02
Jawa Timur	16	52.704,98	6	478.977,34
Banten	41	90.623,60	7	1.303.446,56
Bali	11	4.620,69		
Sulawesi Selatan	1	1.700,00		
Total	288	1.088.409,31	80	5.315.878,28

Sumber: BKPM (2010)

Analisis Kebijakan Terkait Pengembangan Investasi Serat Rayon

Kebijakan investasi yang berlaku untuk industri serat rayon pada prinsipnya berlaku umum di semua sektor industri lainnya. Peraturan yang memayungi investasi atau penanaman modal adalah Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hal yang membedakan antara aturan yang berlaku di satu sektor dengan sektor lainnya adalah persyaratan-persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Kementerian Teknis terkait sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Berdasarkan Perpres

tersebut, bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu: bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi; bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan; bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya; bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus. Menurut Perpres No.36 tersebut, industri serat rayon merupakan kategori bidang usaha yang terbuka untuk investasi. Hal ini berarti tidak ada persyaratan perijinan khusus dari kementerian teknis terkait.

Di samping kebijakan umum mengenai penanaman modal, ketentuan mengenai pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal adalah sesuai dengan Peraturan Kepala (Perka) Badan Koordinasi Penanaman Modal No.12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal. Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No 176 tahun 2009⁴ tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal. Selama tahapan ini investor diberi waktu selama 5 (lima) tahun untuk mencari lahan, membangun gedung dan pabrik sekaligus mengurus IMB, serta mencari tenaga kerja. Dalam tahapan ini investor masih diperbolehkan merubah kategori jenis usahanya namun setelah 5 (lima) tahun sudah tidak diperbolehkan lagi. Umumnya investor dapat menyelesaikan tahapan ini dalam waktu 2 (dua) tahun.

Analisis Kebijakan Terkait Pengembangan Investasi Industri Serat Rayon

Berdasarkan Perpres No 36 tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, industri serat

rayon merupakan salah satu industri yang termasuk dalam kategori industri yang terbuka untuk investasi. Hal ini berarti bahwa industri serat rayon bukan termasuk kategori industri yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. Industri serat rayon juga bukan termasuk kategori industri yang terbuka dengan persyaratan. Sesuai kategori yang ditetapkan dalam Perpres tersebut bahwa jenis bidang usaha terbuka dengan persyaratan merupakan bidang usaha yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu; bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi; bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan; bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya; bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; maupun bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus. Oleh karena itu tidak diperlukan ijin khusus dari kementerian terkait melainkan hanya jenis ijin usaha yang sifatnya berlaku umum.

Terkait pengembangan investasi, sesuai ketentuan UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta peraturan turunannya, industri serat rayon memiliki peluang besar yang sama dengan industri lainnya karena pemerintah telah mengeluarkan kebijakan

⁴ Berdasarkan ketentuan pada pasal 18 Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, importasi yang dilakukan dalam rangka penanaman modal dapat diberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk. Pemberian fasilitas ini dalam rangka peningkatan investasi di dalam negeri untuk mendorong perekonomian nasional di tengah persaingan global.

melalui pemberian berbagai fasilitas baik yang bersifat fiskal maupun non fiskal guna mendukung investasi baik yang sifatnya modal asing (PMA) maupun modal dari dalam negeri (PMDN). Dalam proses pendirian dan operasionalisasi perusahaan, investasi di beberapa sektor termasuk industri serat rayon merupakan industri yang memperoleh fasilitas dalam bentuk pembebasan bea masuk untuk barang modal dan bahan baku. Menurut ketentuan dalam pasal 2 ayat (3) PMK No 176 tahun 2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal, pemberian fasilitas pembebasan bea masuk diberikan selama mesin, barang dan bahan yang diimpor masuk dalam kategori barang dan bahan yang belum diproduksi di dalam negeri, sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, atau sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

Kebijakan lain yang terkait dengan pengembangan investasi adalah kebijakan mengenai pemberian fasilitas dalam bentuk penangguhan bea masuk, pembebasan Cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor untuk bahan baku yang diimpor oleh pengusaha yang berada dalam Kawasan Berikat. Ketentuan ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005

tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat (pasal 14). Pemberian fasilitas ini adalah dalam rangka untuk mendorong dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia.

Meskipun industri serat rayon merupakan industri yang masuk dalam kategori terbuka untuk investasi namun perkembangan investasi di industri serat rayon kenyataannya masih menemui banyak kendala. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh data yang diperoleh dari BKPM bahwa sejak tahun 2002 hingga 2008 tidak ada penambahan realisasi investasi (jumlah perusahaan) industri yang memproduksi serat rayon. Hal ini menunjukkan indikasi adanya kendala dalam mengembangkan investasi di industri serat rayon ini.

Analisis Kelangkaan Bahan Baku Rayon di Dalam Negeri

Saat ini industri pemintalan domestik tengah mengalami kelangkaan serat rayon sebagai bahan baku. Bahkan, kelangkaan serat rayon mendorong asosiasi industri hilir tekstil (Asosiasi Pertekstilan Indonesia/API) mengirimkan surat kepada Menteri Perdagangan dalam bentuk permohonan pengenaan bea keluar atas ekspor serat rayon. API beranggapan bahwa ekspor yang dilakukan oleh 2 (dua) produsen utama telah mengakibatkan pasokan serat rayon untuk pasar domestik berkurang. Untuk itu API mengusulkan agar pemerintah

c.q Menteri Perdagangan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk pengenaan bea keluar serat rayon sehingga dapat menekan laju ekspornya.

Namun demikian, usulan pengenaan bea keluar atas serat rayon dinilai belum memiliki alasan yang kuat karena di samping produk serat rayon bukan merupakan jenis produk yang diatur tata niaganya, pengenaan bea keluar atas serat rayon juga harus memiliki justifikasi yang kuat sehingga serat rayon memang termasuk dalam kategori komoditi yang dapat dikenakan bea keluar sebagaimana yang tertuang dalam PP No. 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor.

Menurut pasal 2 ayat (1) PP tersebut, pengenaan Bea Keluar (BK) atas suatu produk tertentu adalah bertujuan untuk: (1) menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri; (2) melindungi kelestarian sumber daya alam; (3) mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; atau (4) menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri. Jika melihat pada ketentuan pada poin 1 (satu) yakni dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri maka memungkinkan pemerintah untuk mengenakan bea keluar serat rayon. Namun, pemerintah tidak serta merta dapat mengenakan bea keluar sebelum melalui prosedur konsultasi publik yang melibatkan seluruh *stakeholder*.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan apakah produsen

serat rayon Indonesia memiliki status sebagai Pengusaha di Dalam Kawasan Berikat (PDKB). Bagi perusahaan yang tergolong dalam PDKB, pemerintah telah memberikan beberapa fasilitas sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat (KB) yakni dalam bentuk penangguhan bea masuk (BM), pembebasan Cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor. Segala bentuk fasilitas tersebut diberikan dalam rangka mendorong ekspor. Oleh karena itu, kebijakan pengenaan bea keluar menjadi kontra produksi dengan filosofi kebijakan kawasan berikat. Hal ini dikarenakan melalui kebijakan bea keluar pemerintah bertujuan ingin menekan laju ekspor serat rayon. Namun di sisi lain, perusahaan yang berada di kawasan berikat juga didorong untuk melakukan/meningkatkan ekspor dengan mendapatkan fasilitas sebagaimana tersebut di atas. Bahkan, menurut ketentuan dalam PMK tersebut, prosentase penjualan produk dari PDKB juga diatur lebih jauh. Menurut ketentuan pada pasal 10 PMK tersebut, batasan penjualan barang hasil produksi KB ke DPIL (termasuk penjualan lokal) yaitu :

- a. sebanyak-banyaknya 50% dari jumlah nilai hasil produksi tahun berjalan, untuk barang yang tidak memerlukan proses lebih lanjut dan dapat berfungsi sendiri tanpa bantuan

- barang lainnya serta digunakan oleh konsumen akhir;
- b. sebanyak-banyaknya 60% dari jumlah nilai hasil produksi tahun berjalan, untuk barang selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Berdasarkan pasal tersebut, maka apabila PDKB akan menjual barang hasil produksi ke daerah pabean lainnya (DPIL), maka akan dikenakan BM, Cukai, PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor (Pasal 17) atau dengan kata lain fasilitas sebagaimana tertuang dalam pasal 14 akan dibatalkan. Bahkan apabila PDKB menjual barang hasil produksinya ke pasar lokal (yang tidak memiliki fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan/atau ke PKB/PDKB) melebihi prosentase yang ditetapkan, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi. Oleh karena itu perusahaan yang berstatus PDKB tidak dapat begitu mudahnya menjual barang hasil produksinya ke pasar domestik karena dengan status yang dimiliki oleh perusahaan tersebut sebagai PDKB. Di samping itu juga apabila perusahaan tersebut menjual produknya ke pasar domestik, maka harus melalui prosedur administrasi dan perhitungan yang rumit.

Berdasarkan hasil analisis mengenai berbagai ketentuan terkait investasi, maka kelangkaan rayon di pasar dalam negeri tidak serta merta diakibatkan oleh keengganan produsen serat rayon dalam negeri untuk menjualnya ke pasar domestik sebagaimana dikeluhkan oleh

asosiasi yang mewakili produk turunan tekstil. Data perdagangan (Tabel 2.7) menunjukkan bahwa prosentase penjualan PT. SPV (yang berstatus Pengusaha Dalam Kawasan Berikat) ke pasar domestik selama periode 2005-2009 adalah sebesar 46%-59%. Hal ini dikarenakan batas maksimal penjualan ke pasar selain ekspor maksimal 60% (lihat pasal 10 PMK 101 tahun 2005). Hal ini berarti kedua perusahaan tersebut tidak menyalahi ketentuan dan telah memenuhi kebutuhan domestik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bahkan untuk PT. IBR telah menjual produknya ke pasar domestik dengan prosentase lebih dari 60 %. Oleh karena itu sebelum melakukan ekspor, sebaiknya produsen serat rayon memasok industri pengguna di dalam negeri melalui program kemitraan.

Untuk itu pemerintah perlu merumuskan kebijakan lain yang lebih sesuai misalnya dengan mendorong investasi bagi industri serat rayon. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi sehingga suplai serat rayon dalam negeri akan meningkat. Di samping itu, dengan adanya penambahan jumlah perusahaan serat rayon juga akan mengurangi karakteristik kartel dalam perdagangan serat rayon yang selama ini terjadi di pasar domestik.

Pengembangan investasi serat rayon menjadi hal yang sangat krusial karena peningkatan permintaan serat rayon yang tidak diimbangi oleh penambahan investasi industrinya akan mengakibat-

kan industri pemintalan di Indonesia akan terus menerus mengalami masalah kelangkaan bahan baku. Terlebih saat ini sekitar lebih dari 40% dari total produksi rayon nasional diperuntukkan untuk pasar ekspor. Dari total kapasitas terpasang produksi serat rayon nasional tersebut, hanya sekitar 120.000 ton yang dipasok ke dalam negeri, yakni sekitar 90.000 ton dipasok oleh SPV dan sisanya 30.000 ton dipasok oleh PT Indo Bharat Rayon. Sisa produksi lainnya di ekspor ke manca negara seperti Jepang, Korea Selatan, Cina, Thailand, India, dan Timur Tengah. Jika masalah kelangkaan serat rayon berlanjut terus dikhawatirkan akan mengancam eksistensi industri pemintalan benang dalam negeri. Hal ini tentu akan berdampak pada kinerja ekonomi bangsa Indonesia karena industri benang merupakan salah satu bagian dari industri TPT yang hingga saat ini masih memberikan kontribusi signifikan terhadap total nilai ekspor nasional.

Kendala dalam Mengembangkan Investasi Serat Rayon di Indonesia

Berdasarkan hasil riset salah satu perusahaan serat dunia, potensi pasar serat rayon dunia diprediksi akan terus tumbuh. Khusus untuk kawasan Asia, pasar serat rayon akan tumbuh 10% menjadi 62% pada 6 tahun ke depan. Ini belum termasuk China yang diprediksi menguasai 19% pasar dunia atau naik 3% dari kondisi 2009. Adapun pasar Eropa dan Amerika justru akan

mengalami penurunan pangsa pasar. Eropa diproyeksikan turun dari 39% pada 2009 menjadi 30% pada 2015, sementara Amerika turun dari 8% menjadi 7%. Oleh karena itu potensi pasar untuk serat rayon masih terbuka sangat luas. Hal ini berarti bahwa investasi serat rayon masih sangat potensial bagi Indonesia.

Meskipun peluang pasar tekstil di dalam dan luar negeri masih terbuka luas, namun Indonesia belum tentu dapat memanfaatkan peluang pasar tersebut. Karena, meskipun peluang cukup terbuka lebar, Indonesia hingga kini masih memiliki sejumlah hambatan yang cukup serius untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus produktivitas, serta daya saing produk tekstilnya di pasar global. Dari sisi kualitas dan jumlah mesin misalnya. Dari sekitar 8 juta lebih unit mesin TPT yang ada, sekitar 80 persen diantaranya merupakan mesin-mesin tua yang berusia diatas 20 tahun. Itu sebabnya meskipun jumlah mesin yang tercatat cukup banyak, mesin yang benar-benar beroperasi hanya sebagian kecil.

Kenyataan lain menunjukkan bahwa meskipun industri tekstil yang terdapat di Indonesia telah terintegrasi dari hulu hingga hilir, namun sinergi antara industri hulu dan hilir belum mampu menciptakan industri tekstil yang berdaya saing tinggi. Bahkan keberadaan industri hulu yang semula ditujukan agar dapat mensuplai kebutuhan bahan baku bagi industri hilir belum dapat terealisasi sepenuhnya⁵. Masih banyak industri hilir domestik

seperti garmen yang harus mengimpor kain dan benang dari Cina dikarenakan kualitas dan spesifikasinya lebih sesuai dengan kebutuhan dan harganya yang juga lebih kompetitif. Hal ini sebagaimana dikeluhkan oleh salah satu perusahaan garmen berstatus PMA yang harus mengimpor benang dan kain berbahan rayon dari Cina. Dikeluhkan bahwa produk sejenis (benang dan kain berbahan rayon) sangat sulit dicari di dalam negeri dan meskipun dihasilkan industri dalam negeri terkadang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan sehingga perusahaan tersebut terpaksa harus mengimpor dari Cina. Di samping itu, industri hulu dalam negeri juga belum bisa menghasilkan produk yang mampu secara konsisten menyediakan kebutuhan industri hilir dalam negeri. Industri hulu yang ada lebih cenderung menghasilkan produk yang digemari oleh selera pasar yang bersifat sementara.

Di sisi lain, pengembangan industri serat rayon menghadapi kendala dalam hal produk samping hasil proses kimia dalam menghasilkan rayon. Selama proses kimia tersebut dihasilkan limbah yang membahayakan bagi lingkungan. Oleh karena itu diperlukan sistem pengolahan limbah yang memerlukan

teknologi tinggi sehingga tidak membahayakan bagi lingkungan sekitar. Penggunaan teknologi tinggi terutama untuk sistem pengolahan limbah menyebabkan investasi di industri serat rayon membutuhkan modal yang sangat besar. Dan hal ini yang mengakibatkan masih sangat minimnya investasi di industri serat rayon⁶. Bahkan, terdapat satu perusahaan yang harus menutup kegiatan produksinya karena diprotes oleh penduduk setempat. Perusahaan ini diprotes oleh masyarakat karena limbah perusahaan ini mengakibatkan pencemaran lingkungan di sekitarnya⁷. Akibatnya, sampai saat ini pengembangan investasi serat rayon di Indonesia belum berkembang.

Selain itu, kendala lain yang dihadapi oleh para investor untuk mendirikan industri serat rayon diantaranya adalah kendala belum cukup tersedianya bahan baku bagi serat rayon yaitu dissolving pulp (bubur kertas)⁸. Kenyataan juga menunjukkan bahwa telah terjadi perebutan antara industri serat rayon dengan industri kertas dalam memperoleh bubur kertas. Terlebih saat ini, bubur kertas masih banyak diimpor oleh Indonesia terutama untuk kebutuhan industri kertas dan industri

5 Sebagaimana tertuang dalam Roadmap Industri TPT (Strategi Pengembangan 2004-2025) yang ingin mewujudkan industri serat buatan sebagai sub-sektor yang berorientasi di pasar domestik sebagai industri yang menyediakan bahan baku bagi industri pemintalan, pertununan dan perajutan.

6 Indotextiles. (2010). Investment for Rayon Fiber, Diunduh pada bulan September 2010 dari http://www.indotextiles.com/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=72.

7 Syahriah R. (2004). Tinjauan Kasus Terhadap PT. Toba Pulp Lestari D/H PT. Inti Indorayon Utama. Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

8 Risinfo. (2010). Toba Pulp Lestari to expand capacity of dissolving pulp in Indonesia. Diunduh pada bulan September 2010 dari <http://www.risinfo.com/techchannels/pulping/Toba-Pulp-Lestari-to-expand-capacity-of-dissolving-pulp-in-Indonesia.html>.

serat rayon. Saat ini, produsen serat rayon masih mengimpor bubur kertas untuk bahan baku produksinya. Impor bubur kertas terpaksa dilakukan karena industri penghasil bubur kertas di Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri. Terlebih spesifikasi *dissolving pulp* yang diperlukan oleh industri serat rayon mensyaratkan grade yang lebih tinggi dibandingkan *dissolving pulp* yang digunakan untuk industri kertas. Hal ini menjadi alasan logis bahwa salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan oleh investor sebelum memutuskan untuk mendirikan suatu industri adalah dengan memperhatikan ketersediaan bahan baku bagi industrinya.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai kebijakan di sektor kehutanan. Kebijakan di sektor kehutanan sangat terkait dengan investasi serat rayon. Kebijakan yang kondusif di sektor kehutanan akan mendorong terciptanya iklim investasi terutama di industri yang berbasis hasil hutan. Seperti diketahui bahwa *dissolving pulp*/bubur kertas (bahan baku serat rayon) merupakan salah satu produk olahan hasil hutan berbahan dasar kayu. Jika industri bubur kertas telah tumbuh dengan baik di Indonesia, maka hal ini akan mendorong investor untuk menanamkan modal untuk industri turunannya seperti misalnya industri serat rayon karena jaminan bahan baku bagi industrinya telah tersedia di dalam negeri. Hal ini juga sejalan dengan Rencana Aksi. Salah satu

sasaran rencana aksi Pengembangan Industri Serat Buatan yang disusun oleh Kementerian Perindustrian adalah untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Sementara Rencana Aksi jangka panjangnya (2006-2025) adalah mempersiapkan sektor industri pulp kayu agar dapat memproduksi *dissolving pulp* untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi industri rayon (substitusi impor).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kelangkaan serat rayon sebagai bahan baku industri pemintalan bukan semata-mata disebabkan oleh produsen dalam negeri yang cenderung melakukan ekspor serat rayon, melainkan lebih disebabkan oleh rendahnya jumlah serta kapasitas produksi serat rayon di dalam negeri. Terbatasnya jumlah produksi disebabkan oleh masih minimnya jumlah perusahaan/produsen serat rayon domestik. Di samping itu, kecenderungan produsen serat rayon domestik untuk melakukan ekspor sejauh ini tidak menyalahi aturan/ketentuan yang ada.

Pengembangan produksi serat rayon melalui investasi sangat penting guna mendukung pengembangan industri turunan tekstil di dalam negeri sehingga mampu mendorong perdagangan produk tekstil dan turunannya. Oleh karena itu, dalam upaya mengatasi permasalahan kelangkaan serat rayon domestik, pemerintah perlu mendorong pengembangan investasi industri serat rayon. Pengembangan investasi terutama

diarahkan bagi investor yang akan mengorientasikan hasil produksinya untuk pasar domestik. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi nasional sehingga suplai serat rayon dalam negeri akan meningkat.

Untuk mendorong investasi industri serat rayon, salah satu kebijakan yang perlu diperhatikan pula adalah kebijakan yang lebih kondusif di sektor kehutanan. Kebijakan yang kondusif di sektor kehutanan akan mendorong investasi di sektor yang lebih hulu yaitu industri *dissolving pulp*. Saat ini, belum tersedia industri domestik yang mampu memproduksi *dissolving pulp* (*grade tinggi*) yang dapat digunakan sebagai bahan baku serat rayon. Jika industri *dissolving pulp* dalam negeri sudah mampu memasok kebutuhan dalam negeri maka hal ini akan menghilangkan kekhawatiran investor akan kelangkaan bahan baku untuk produksi serat rayon sehingga hal ini akan lebih mendorong pengembangan investasi di industri serat rayon.

DAFTAR PUSTAKA

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). (2009). *Jenis dan Karakteristik Serat Rayon*. Jakarta: API.

Badan Pusat Statistik. (2010). *Data Ekspor dan Impor*.

Comtrade. (2010). *Trade Statistics for International Business Development*. Diunduh pada bulan Agustus 2010 dari <http://www.trademap.org>.

Datacon. (2010). *Laporan Market Intelijen, Perkembangan Industri Pemintalan Indonesia Tahun 2009*. Diunduh pada bulan September 2010 dari <http://www.datacon.co.id/Tekstil1-2009Pintal.html>.

Direktorat Industri TPT, Kementerian Perindustrian. (2010). *Data Kinerja Industri Serat Buatan Indonesia*.

Indotextiles. (2010). *Investment for Rayon Fiber*, Diunduh pada bulan September 2010 dari http://www.indotextiles.com/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=72.

Kementerian Perindustrian. (2007). *Road Map Industri Tekstil dan Produk Tekstil, Strategi Pengembangan 2004-2025*.

Kementerian Perindustrian. (2009). *Facts and Figures, Indonesia Textile Industry, Periode 2004-2008*, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil.

Pratiwi, Lita Indah. (2012). *Analisis Daya Saing Ekspor Industri Tekstil Dalam Menghadapi AFTA (Berorientasi Pada Asia Tenggara) Dengan Perhitungan Total Factor Productivity*. Diunduh pada bulan Juni 2012 dari <http://library.gunadarma.ac.id/repository/view/28225/analisis-daya-saing-ekspor-industri-tekstil-dalam-menghadapi-afta-berorientasi-pada-asia-tenggara-dengan-perhitungan-total-factor-productivity.html>.

Pusat Data dan Informasi, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan. (2010). *Data ekspor dan Impor produk tekstil*.

- Pusat Data dan Informasi BKPM. (2010). Realisasi Investasi PMA dan PMDN.
- Puslitbang Iklim Usaha Perdagangan, Kementerian Perdagangan. (2010). Surat Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) No.097/API/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 perihal Pengadaan Bahan Baku Rayon.
- Risinfo. (2010). Toba Pulp Lestari to expand capacity of dissolving pulp in Indonesia. Diunduh pada bulan September 2010 dari <http://www.risiinfo.com/techchannels/pulping/Toba-Pulp-Lestari-to-expand-capacity-of-dissolving-pulp-in-Indonesia.html>.
- Sekretaris Negara. (2010). Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Diunduh pada bulan Agustus 2010 dari <http://www.setneg.go.id>
- Sekretaris Negara. (2010). Peraturan Presiden No 36 tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Diunduh pada bulan Agustus 2010 dari <http://www.setneg.go.id>.
- Sulistiawati. (2010). Analisis Kinerja dan Daya Saing Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia Menuju ASEAN Economic Community Tahun 2015. Diunduh bulan Juni 2012 dari <http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian>.
- Syahriah R. (2004). Tinjauan Kasus Terhadap PT. Toba Pulp Lestari D/H PT. Inti Indorayon Utama. Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

